



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2021



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA

2022

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas hikmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2021 dapat disusun. LAKIP Dinas Kesehatan

Kabupaten Jayapura merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bidang Kesehatan yang dituangkan didalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Tahun 2017 – 2022 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dibuat secara periodik yang memuat informasi mengenai kinerja instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dan bermanfaat untuk dapat lebih mendorong kinerja Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan serta melaksanakan tugas pemerintah dalam pembangunan kesehatan secara baik dan benar di wilayah Kabupaten Jayapura. Penyusunan LAKIP ini berpedoman Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah., Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Diharapkan dengan tersusunnya LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dapat diperoleh gambaran tentang realisasi kinerja Dinas Kesehatan yang tertuang didalam analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas

sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD bidang Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan untuk tahun bersangkutan. Materi LAKIP juga memuat informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Daerah khususnya Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura didalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Disamping itu LAKIP Dinas Kesehatan merupakan bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan serta bentuk pertanggung jawaban kinerja Dinas Kesehatan kepada para *stakeholders*.

Kiranya LAKIP Dinas Kesehatan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura guna memperbaiki kekurangan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Jayapura. Semoga Tuhan senantiasa mendampingi dan memberkati segala bentuk upaya yang dilakukan guna mewujudkan kemandirian masyarakat Jayapura dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. “ ***KENAMBAI UMBAI RAI MAI***“ ***Satu utuh ceria berkarya meraih kejayaan***”.

Sentani, Januari 2022



Khairul Lie, SKM, M.Kes

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19650417 199003 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS KESEHATAN



Jln. Raya Sentani Depapre No.1, Kompleks Kantor Bupati, Sentani 99352

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021, sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan Standart Akutansi Pemerintah.

Sentani, Januari 2022

KEPALA DINAS,



Khairul Lie, SKM, M.Kes

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19650417 199003 1 011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam melaksanakan maksud diatas, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura melalui Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 tentang OPD Kabupaten Jayapuran menyelenggarakan pemerintahan di sector kesehatan. Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan kinerjanya, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura sebagai instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disampaikan kepada Bupati Jayapura. Tim penyusun LAKIP berusaha menyusun Laporan akuntabilitas tersebut sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lemabaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada presiden selaku kepala pemerintahan .

Dalam rangka pertanggungjawaban atau pengelolaan kinerjanya, Dinas Kesehatan sebagai instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas



Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disampaikan kepada Bupati. Disamping itu penyusunan LAKIP ini juga ditujukan sebagai upaya untuk mengevaluasi kinerja organisasi untuk menentukan upaya perbaikan kinerja Dinas Kesehatan di masa yang akan datang

Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang tersebar hampir di seluruh Distrik di wilayah Kabupaten Jayapura dan adanya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan baik secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta pelayanan kesehatan dasar ke daerah terpencil/terisolir secara berkala merupakan gambaran / bukti nyata adanya upaya Dinas Kesehatan dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan guna mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan mandiri. Namun upaya-upaya yang dilakukan tidak selamanya dapat menunjukkan hasil yang langsung dirasakan/dimanfaatkan oleh masyarakat luas, oleh karena itu diperlukan suatu alat ukur yang dapat melihat berhasil tidaknya suatu program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan jaringannya. Kesemuanya itu dapat dituangkan dalam laporan hasil kinerja instansi dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura yang merupakan Laporan Evaluasi Kinerja Dinas dalam upaya peningkatan Pembangunan dibidang kesehatan secara komprehensif baik yang bersifat Promotif, Preventif, kuratif dan Rehabilitatif.

Tahun 2021 merupakan masa pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh pada pelaksanaan kinerja Pemerintah Daerah, termasuk sektor Kesehatan. Kebijakan Refocussing Anggaran untuk mendukung pelaksanaan penanganan Covid-19, kebijakan PPKM, Vaksinasi Covid-19 dan terjadinya gelombang 2 Covid 19 dengan munculnya virus delta pada bulan Juli 2021, mempengaruhi pelaksanaan RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura tahun 2021.

1.2 Gambaran Umum

1. Karakteristik Lokasi dan Gambaran Geografis

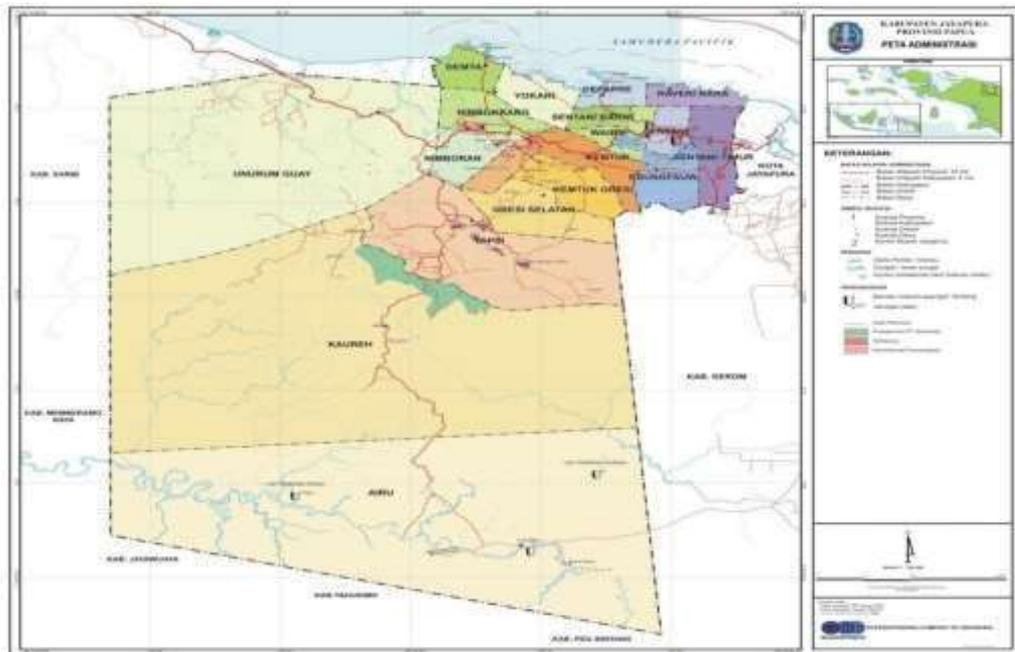
Berdasarkan tinjauan Astronomi maka Kabupaten Jayapura terletak pada $139^{0}44'$ – $140^{0}63'$ BT dan $2^{0}19'$ LU – $2^{0}84'$ LS (penentuan didasarkan titik koordinat pada peta land cover Papua dengan skala 1 : 250.000 tahun 2002).

Kabupaten Jayapura Memiliki luas wilayah sebesar $17,516 \text{ km}^2$, yang terdiri dari 19

distrik , 5 Kelurahan dan 139 kampung. Kabupaten Jayapura terletak dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Samudera Pasifik dan Kabupaten Sarmi
- Sebelah Timur : Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pegunungan Bintang
- Sebelah Barat : Kabupaten Sarmi

Gambar 1.1 PETA WILAYAH KABUPATEN JAYAPURA



Sumber: Perda Nomor 21 Tahun 2009 Rencana Tata Ruang Wilayah tahun **2008-2028 Kabupaten Jayapura**

2. Iklim

Berdasarkan hasil pencatatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah Sentani tahun 2020 suhu udara rata-rata minimum berkisaran antara 27,5–28,7 Celcius. Kelembapan udara rata-rata 72 – 76. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November 253.4 mm dan terendah pada bulan Desember 57.7 mm.

3. Suhu

Berdasarkan hasil pencatatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika untuk wilayah Sentani tahun 2020 suhu udara rata-rata maksimum Rata-rata berkisar antara 32.1.°– 34.0° Celcius dan suhu udara Rata-rata minimum 23.3°-24.6°C.

4. Kelembaban

Kelembaban udara Kabupaten Jayapura yang diperoleh dari stasiun meteorologi dan geofisika (stasiun Sentani dan Stasiun Genyem), menunjukkan kelembaban udara di Kabupaten Jayapura tahun 2020 berkisar 72 – 76.

5. Curah Hujan

Tahun 2021 Curah hujan di Kabupaten Jayapura berfluktuasi Curah hujan tertinggi pada bulan November dengan curah hujan sebesar 253.4 mm dan terendah pada bulan Desember 57.7 mm. Hari hujan tertinggi di Kabupaten Jayapura pada Bulan Maret 24 hari dan terendah pada bulan Mei 18 hari.

6. Sarana Komunikasi, Transportasi dan Penerangan

Sarana Komunikasi antara Dinas Kesehatan dengan Puskesmas pada umumnya sudah menggunakan telepon Cellular baik melalui jaringan regular maupun dengan jaringan V-sat. Seluruh Puskesmas yang belum memiliki internet dari TELKOM, telah tersambung V-Sat sehingga seluruh Puskesmas telah memiliki akses komunikasi internet.

Alat transportasi dari Kabupaten ke Distrik sebagian besar lewat darat, 2 Distrik dijangkau lewat laut yakni Distrik Yokari dan Revenirara dan 1 Distrik dijangkau lewat danau yakni Distrik Ebungfauw.

Sarana Penerangan untuk Puskesmas dari 20 Puskesmas yang ada 16 Puskesmas sudah menggunakan listrik dari PLN, namun belum seluruhnya bisa berfungsi 24 jam dan 4 diantaranya menggunakan solarsel yakni; Puskesmas Yokari, Airu, Pagai dan Saduyap.

7. Situasi Derajat Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan merupakan aspek terpenting dalam pembangunan manusia yang berkualitas yang dimulai sejak janin dalam kandungan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2018 tentang standar pelayanan Minimal serta Permendagri nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal dan ditindaklanjuti dengan Permenkes N0.4 Tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu Pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan maka Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura terus berbenah meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya baik dari segi akses pelayanan kesehatan maupun dari segi kualitas layanan. Kabupaten Jayapura memiliki Satu Rumah sakit tipe C yaitu Rumah sakit Umum daerah Yowari serta satu rumah sakit tingkat 4 AU Silas Papare. Terdapat 21 Puskesmas yang berada diwilayah pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dengan 6 Puskesmas Rawat Inap dan 15 Puskesmas Rawat Jalan dengan status 15 Puskesmas sudah terakreditasi dan 6 Puskesmas akan di akreditasi pada tahun 2021 dan 2022 , sedangkan jaringan penunjang pelayanan kesehatan lainnya terdapat 69 Puskesmas Pembantu dan 19 Polindes , 29 unit puskesmas keliling roda 4 dan 3 unit pusling air serta disetiap puskesmas di sediakan juga pusling roda dua. Kabupaten Jayapura juga memiliki satu UPTD PSC 119 Hasale Hokhosobo yang telah terkoneksi dengan NCC 119 Kementrian Kesehatan guna memberikan layanan pre- hospital kepada masyarakat dengan memiliki 2 armada ambulance serta satu kantor layanan.

Sumber daya tenaga kesehatan juga terus ditingkatkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya dengan melakukan rekrutmen tenaga kontrak yang didistribusi diseluruh wilayah kerja dinas kesehatan kabupaten jayapura dan dilakukan penigkatankapasitas sumber daya dengan adanya pelatihan, bimbingan teknis maupun peningkatan tingkat pendidikan pada jenjang pendidikan kesehatn yang lebih tinggi.

Indikator derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah dapat dilihat dari tingginya umur harapan hidup seseorang, angka kematian bayi dan angka kematian ibu maternal serta menurunnya angka prevalensi gizi kurang pada anak balita. Sesuai Indikator RPJMD Kabupaten Jayapura 2017 – 2022 maka indikator derajat kesehatan masyarakat untuk umur harapan hidup diharapkan dapat mencapai usia 68,00 tahun pada tahunn 2022,



angka kematian bayi menjadi $<23/1000$ kelahiran hidup dan angka kematian ibu maternal $<220/100.000$ kelahiran hidup, serta angka prevalensi gizi kurang pada balita maksimal $<10\%$.

Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Jayapura yang diperoleh dari data statistik tahun 2021 mencapai 67,5 tahun, sementara angka kematian bayi pada tahun 2021 sebesar $30,7/1000$ KLH, angka kematian ibu sebesar $195,8/100.000$ KLH, prevalensi gizi kurang pada anak balita 1,81 % pada tahun 2021. Dari data tersebut angka kematian Ibu dan prevalensi balita gizi kurang sudah mencapai bahkan dibawah angka standar nasional, termasuk angka kematian Bayi. Namun demikian upaya-upaya penanggulangan tetap harus dilakukan guna mencegah meningkatnya kasus-kasus tersebut menjadi suatu kasus kejadian luar biasa. Secara umum dapat disimpulkan bahwa derajat kesehatan masyarakat kabupaten Jayapura masih dibawah standar nasional.

8. Sarana Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan kabupaten jayapura memiliki sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Sarana fasilitas layanan kesehatan antara lain 2 Rumah Sakit, 21 Puskesmas, 69 Puskesmas Pembantu dan 19 Polindes. Disamping itu terdapat sarana kesehatan swasta yang turut membantu layanan kesehatan di Kabupaten Jayapura. Hal tersebut dapat terlihat dalam tabel dibawah ini



Tabel 1.1
Gambaran Sarana Kesehatan di kabupaten Jayapura tahun 2021

NO	FASILITAS KESEHATAN	PEMILIKAN/PENGELOLA						JUMLAH
		KEMENKES	PEM.PROV	PEM.KAB/KOTA	TNI/POLRI	BUMN	SWASTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RUMAH SAKIT								
1	RUMAH SAKIT UMUM			1	1			2
2	RUMAH SAKIT KHUSUS							-
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA								
1	PUSKESMAS RAWAT INAP			6				6
	- JUMLAH TEMPAT TIDUR			45				45
2	PUSKESMAS NON RAWAT INAP			15				15
3	PUSKESMAS KELILING			29				29
4	PUSKESMAS PEMBANTU/polindes			88				88
SARANA PELAYANAN LAIN								
1	RUMAH BERSALIN						6	6
2	KLINIK PRATAMA				2		7	9
3	KLINIK UTAMA				0			-
4	BALAI PENGOBATAN						5	5
5	PRAKTIK DOKTER BERSAMA							-
6	PRAKTIK DOKTER UMUM PERORANGAN							-
7	PRAKTIK DOKTER GIGI PERORANGAN			1				1
8	PRAKTIK DOKTER SPESIALIS PERORANGAN							-
9	PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL							-
10	BANK DARAH RUMAH SAKIT							-
11	UNIT TRANSFUSI DARAH			1				1
SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN								
1	INDUSTRI FARMASI							-
2	INDUSTRI OBAT TRADISIONAL							-
3	USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL							-
4	PRODUKSI ALAT KESEHATAN							-
5	PEDAGANG BESAR FARMASI							-
6	APOTEK							-
7	APOTEK PRB							-
8	TOKO OBAT							-
9	TOKO ALKES							-

Disisi lain pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan tetap terus dilakukan guna meningkatkan akses pelayanan. Dari 19 Distrik semua sudah tersedia sarana Puskesmas, 6 diantaranya adalah puskesmas dengan fasilitas perawatan, 15 Puskesmas Non perawatan, 69 Puskesmas Pembantu (Pustu), 19 Polindes (Pondok bersalin desa) 29 unit puskesmas keliling (pusling)/Ambulans roda 4, 3 unit pusling air serta disetiap puskesmas di sediakan juga pusling roda 2.

Tugas dan Fungsi Serta Peran Strategis

Berdasarkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi Pada Badan Daerah Tipe A Kabupaten Jayapura pada Bab II Susunan Organisasi Bagian kesatu Dinas Kesehatan pasal 4 ayat 1 dan 2, kedudukan Dinas Kesehatan kabupaten Jayapura merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja bertanggungjawab dalam pelaksanaan Misi 1 yaitu Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Peran strategis ini merupakan bagian integral Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Derajat Kesehatan, karena derajat kesehatan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang dilaksanakan oleh SKPD lain, seperti pendapat Hendrik L. Blum sebagai berikut :

Gambar 1.2

Teori Derajat Kesehatan Hendrik Blum



Derajat Kesehatan akan meningkat selain karena faktor turunan/herediter yang hanya 5 %, tetapi juga oleh Upaya Kesehatan sebesar 20 % yang merupakan inti pekerjaan Dinas Kesehatan. Faktor terbanyak adalah pada lingkungan dan perilaku masyarakat sebesar 75 %. Oleh sebab itu peran Dinas Kesehatan akan sangat optimal dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat apabila didukung oleh perangkat daerah (PD) lain yang menjalankan tugas dan fungsinya untuk ikut

mewujudkan derajat kesehatan, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jayapura.

1.3 Struktur Organisasi

Pada tahun 2016, dikeluarkan Peraturan Daerah No.10 tahun 2016 tentang OPD Kabupaten Jayapura, dimana dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Jayapura, telah menggunakan struktur organisasi yang baru. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah diperbaharui sesuai struktur yang ditetapkan.

Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang OPD Kabupaten Jayapura, Dinas Kesehatan memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mempunyai fungsi antara lain :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;



2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan terdiri dari:

- a) Sekretariat;
- b) Bidang Kesehatan Masyarakat;
- c) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- d) Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
- e) Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Tugas dan Fungsi Masing-masing Bidang antara lain :

1. Sekretariat

Tugas:

Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.

Fungsi:

- i. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
 - ii. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
-



- iii. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dilingkungan Dinas Kesehatan Daerah; dan
- iv. Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.
Sekretariat terdiri dari :

a) Subbagian Umum, Program, dan Informasi

Tugas:

Penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

b) Subbagian Keuangan dan Aset

Tugas:

Penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

c) Subbagian Kepegawaian dan Hukum

Tugas:

Penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

2. Bidang Kesehatan Masyarakat

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Fungsi:

- i. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- ii. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi



- masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- iii. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
 - iv. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:

a) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.

b) Seksi Promosi, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Tugas:

1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

3. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.



Fungsi:

- i. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- ii. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- iii. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di [] bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- iv. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit terdiri dari:

- a) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular , Surveilans dan Imunisasi

Tugas:

1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi.
2. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.



4. Bidang Pelayanan Kesehatan

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

Fungsi:

- i. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- ii. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- iii. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional; dan
- iv. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional

Tugas:

1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer.
2. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional.



b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Fasyankes dan peningkatan Mutu

Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan rujukan.

5. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

Fungsi:

- i. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
- ii. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- iii. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan
- iv. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:

a) Seksi Kefarmasian

Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian.



b) Seksi Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tugas:

1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang alat kesehatan dan PKRT.
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan.

6. UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura memiliki 3 UPTD yaitu UPTD Intalasi Farmasi Kabupaten, UPTD Puskesmas dan UPTD PSC 119 Hasale Hokhosobo, sesuai dengan Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2018.

Melaksanakan tugas teknis pelayanan kesehatan di Distrik sesuai petunjuk/pedoman/data informasi/Peraturan perundang-undangan antara lain:

- Melaksanakan kebijakan teknis bidang kesehatan
- Mengatur dan memberi petunjuk teknis penyelenggaraan program dan kegiatan pelayanan kesehatan
- Membina penyelenggaraan ketatausahaan pada Puskesmas
- Merencanakan pengembangan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
- Mengkoordinasikan tenaga teknis dan fungsional UPTD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- Membina kerja sama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan
- Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada UPTD
- Membagi tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- Melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik kepada atasan

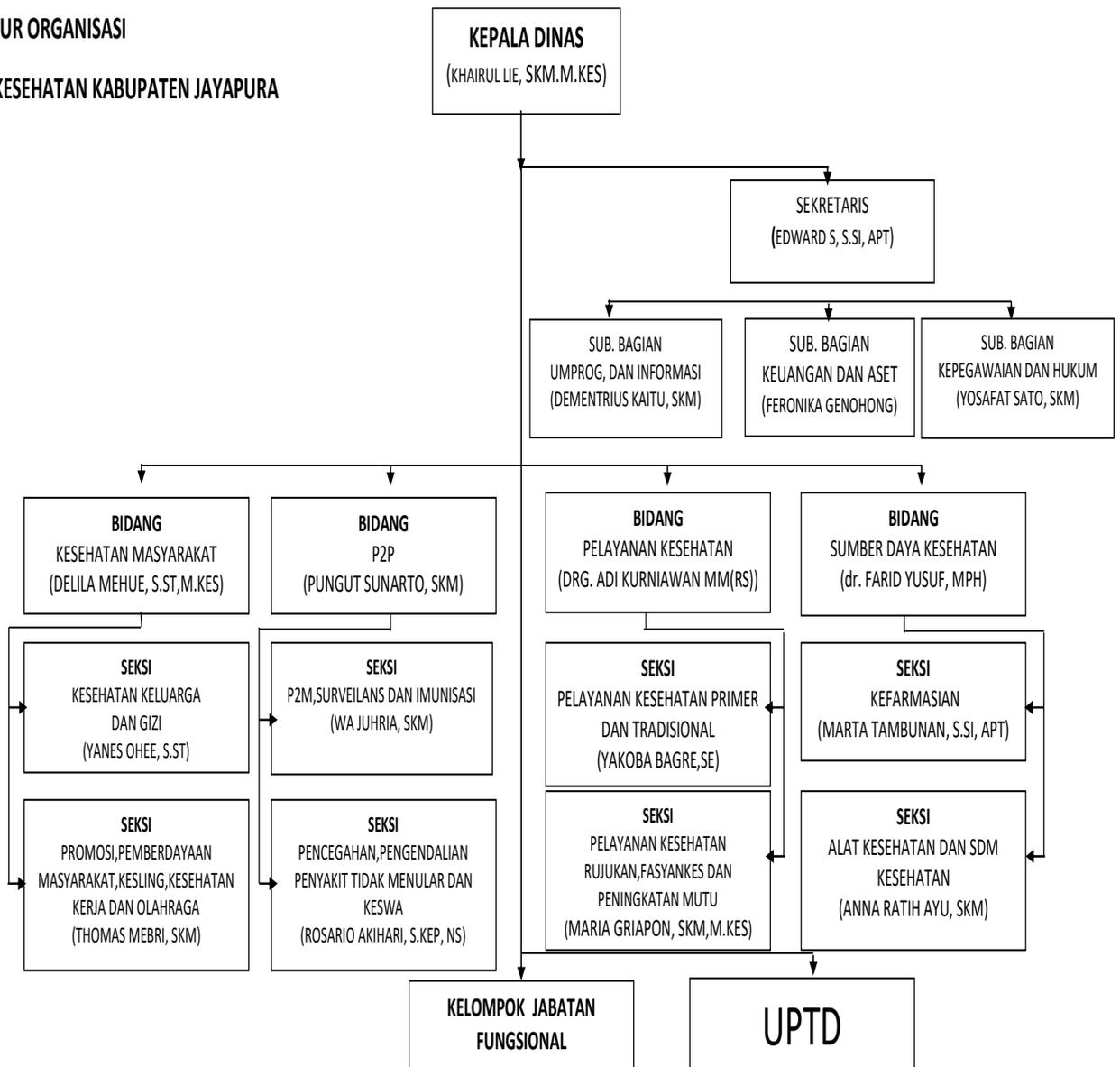
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Kesehatan memiliki Kelompok Jabatan Fungsional, yang saat ini terdiri dari 5 orang Administrator Kesehatan dan 1 orang Jabatan Fungsional pada program gizi masyarakat dan tersebar di Bidang-Bidang

Gambar 1.3
Struktur Organisasi Perangkat Daerah

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA





Aspek strategis adalah aspek yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju perwujudan visi dan misi Dinas kesehatan Kab. Jayapura, aspek-aspek tersebut antara lain:

1.3.1 Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Tahun 2021 termasuk Puskesmas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Gambaran Tenaga Medis di Kabupaten Jayapura tahun 2021

NO	UNIT KERJA	DR SPESIALIS ^a			DOKTER UMUM			TOTAL			DOKTER GIGI			DOKTER GIGI SPESIALIS			TOTAL		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	HARAPAN			0	1	1	2	1	1	2		2	2			0	0	2	2
2	SENTANI			0	1	5	6	1	5	6		2	2			0	0	2	2
3	EBUNGFUW			0		1	1	0	1	1			0			0	0	0	0
4	DOSAY			0		1	1	0	1	1		1	1			0	0	1	1
5	DEPAPRE			0		1	1	0	1	1			0			0	0	0	0
6	RAVENIRARA			0		1	1	0	1	1			0			0	0	0	0
7	KANDA			0		1	1	0	1	1			0			0	0	0	0
	WAIBHU					2	2		2	2			0			0	0	0	0
8	KEMTUK			0		1	1	0	1	1			0			0	0	0	0
9	SAWOY			0	1		1	1	0	1			0			0	0	0	0
10	NAMBLONG			0		1	1	0	1	1			0			0	0	0	0
11	GENYEM			0	1	2	3	1	2	3			0			0	0	0	0
12	NIMBOKRANG			0		2	2	0	2	2			0			0	0	0	0
13	DEMTA			0	1		1	1	0	1			0			0	0	0	0
14	YOKARI			0		1	1	0	1	1			0			0	0	0	0
15	UNURUM GUAY			0	1		1	1	0	1			0			0	0	0	0
16	TAJA			0		2	2	0	2	2			0			0	0	0	0
17	SADUYAP					1	1	0	1	1			0			0	0	0	0
18	LEREH			0		1	1	0	1	1			0			0	0	0	0
19	AIRU			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
20	PAGAI			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
	SUB JUMLAH I (PUSKESMAS)	0	0	0	6	24	30	6	24	30	0	5	5	0	0	0	6	29	35
	1 RS Yowari			21			18	0	0	39			1			0	0	0	1
	dst. (mencakup RS Pemerintah dan swasta dan termasuk pula Rumah Bersalin)			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN																		
	KLINIK DI INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
	KLINIK DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
	JUMLAH (KAB/KOTA) ^b	0	0	21	6	24	48	6	24	69	0	5	6	0	0	0	6	29	36
	RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK ^b			16			36			52			5			0			27

Tabel 1.3
Gambaran Tenaga Bidan dan Perawat di Kabupaten Jayapura tahun 2021

NO	UNIT KERJA	PERAWAT ^a			BIDAN
		L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6
1	HARAPAN	2	13	15	13
2	SENTANI	1	27	28	23
3	EBUNGFAUW		13	13	6
4	DOSAY		11	11	7
5	DEPAPRE	2	6	8	11
6	RAVENIRARA	1	3	4	4
7	KANDA	1	8	9	8
8	WAIBHU	3	11	14	13
9	KEMTUK	3	9	12	11
10	SAWOY	1	4	5	8
11	NAMBLONG	2	5	7	7
12	GENYEM	3	8	11	12
13	NIMBOKRANG	1	6	7	6
14	DEMTA	5	5	10	7
15	YOKARI	2	4	6	4
16	UNURUM GUAY	3	4	7	6
17	TAJA	5	6	11	13
18	SADUYAP	2	3	5	4
19	LEREH	7	4	11	4
20	AIRU	2	4	6	2
21	PAGAI	5	1	6	2
SUB JUMLAH I (PUSKESMAS)		51	155	206	171
1	RS Yowari			177	68
	dst. (mencakup RS Pemerintah dan swasta dan termasuk pula Rumah Bersalin)			0	
	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN			0	
	KLINIK DI INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT			0	
	KLINIK DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA			0	
JUMLAH (KAB/KOTA) ^b		51	155	383	239
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK ^b				290,6	181,3

Sebagaimana tergambar pada table diatas, Jumlah perawat pada UPTD Puskesmas sebanyak 206 orang dan pada RSUD Yowari sebanyak 177 orang. Sedangkan jumlah tenaga bidan untuk puskesmas 171 dan pada RSUD berjumlah 68 orang dengan total perawat 383 orang atau dengan rasio 290,6 per 100.000 Penduduk sedangkan Jumlah total bidan sebanyak 239 atau 181,3 per 100.000 Penduduk.

Tabel 1.4
Gambaran Tenaga Kesmas, Kesling dan Gizi di Kabupaten Jayapura Tahun 2021

NO	UNIT KERJA	KESEHATAN MASYARAKAT			KESEHATAN LINGKUNGAN			GIZI		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	HARAPAN		1	1	1	2	3		4	4
2	SENTANI	1	2	3	1	1	2		7	7
3	EBUNGFUW			0		2	2		2	2
4	DOSAY		1	1	1	1	2		2	2
5	DEPAPRE			0		1	1	1	1	2
6	RAVENIRARA		1	1	2		2	1		1
7	KANDA	1	1	2		1	1	1		1
8	WAIBHU	1	1	2		2	2		1	1
9	KEMTUK		2	2		1	1		1	1
10	SAWOY		1	1		1	1		1	1
11	NAMBLONG	1	1	2		1	1		1	1
12	GENYEM		1	1	2	1	3		2	2
13	NIMBOKRANG		1	1	1		1	1	1	2
14	DEMTA		2	2	1		1	1	2	3
15	YOKARI			0	1		1	1		1
16	UNURUM GUAY		1	1	1		1	1		1
17	TAJA		1	1		1	1		1	1
18	SADUYAP	1		1	1		1		1	1
19	LEREH		3	3	1		1	1	1	2
20	AIRU	1		1	1		1		1	1
21	PAGAI		1	1	1		1		1	1
SUB JUMLAH I (PUSKESMAS)		6	21	27	15	15	30	8	30	38
1	RS Yowari			0			7			13
	dst. (mencakup RS Pemerintah dan swasta dan termasuk pula Rumah Bersalin)			0			0			0
				0			0			0
				0			0			0
SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN				0			0			0
KLINIK DI INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT				0			0			0
KLINIK DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA				0			0			0
JUMLAH (KAB/KOTA) ^a		6	21	27	15	15	37	8	30	51
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK ^a				20,5			28,1			38,7

Dari gambaran table diatas, untuk tenaga Kesehatan masyarakat baik di UPTD Puskesmas dan RSUD Yowari berjumlah 27 orang atau 20,5/100.000 Penduduk, sedangkan Sanitarian sebanyak 37 orang atau 28,1/100.000 Penduduk dan Nutrisionis sebanyak 51 orang atau 38,7 /100.000 Penduduk

Tabel 1.5
Gambaran Tenaga Laboran, Teknik Biomedika Lain dan Ketechnisian Medis
di Kabupaten Jayapura tahun 2021

NO	UNIT KERJA	AHLI LABORATORIUM MEDIK			TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA LAINNYA			KETERAPIAN FISIK			KETEKNISIAN MEDIS		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	HARAPAN		3	3			0			0			0
2	SENTANI	1	5	6			0			0			0
3	EBUNGFUW	1	2	3			0			0			0
4	DOSAY		2	2			0			0			0
5	DEPAPRE		1	1			0			0			0
6	RAVENIRARA		1	1			0			0			0
7	KANDA		2	2			0			0			0
	WAIBHU	1	2	3			0			0			0
8	KEMTUK	1	1	2			0			0			0
9	SAWOY		1	1			0			0			0
10	NAMBLONG		1	1			0			0			0
11	GENYEM	1	1	2			0			0			0
12	NIMBOKRANG	1	2	3			0			0			0
13	DEMTA		2	2			0			0			0
14	YOKARI	1	1	2			0			0			0
15	UNURUM GUAY		1	1			0			0			0
16	TAJA		2	2			0			0			0
17	SADUYAP	1		1			0			0			0
18	LEREH		1	1			0			0			0
19	AIRU	1		1			0			0			0
20	PAGAI	1		1			0			0			0
SUB JUMLAH I (PUSKESMAS)		10	31	41	0	0	0			0			0
1	RS Yowari			16			3			2			4
	dst. (mencakup RS Pemerintah dan swasta dan termasuk pula Rumah Bersalin)			0			0			0			0
SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN				0			0			0			0
KLINIK DI INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT				0			0			0			0
KLINIK DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA				0			0			0			0
JUMLAH (KAB/KOTA) ^a		10	31	57	0	0	3	0	0	2	0	0	4
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK ^a				43			2			2			3

Dari data diatas, Puskesmas Kabupaten Jayapura memiliki tenaga Ahli Laboratorium Medik sebanyak 41 tenaga dan di RSUD Yowari 16 tenaga, dengan rasio terhadap jumlah penduduk adalah 43/100.000 penduduk

Tabel 1.6
Gambaran Tenaga Kefarmasian di Kabupaten Jayapura tahun 2021

NO	UNIT KERJA	TENAGA KEFARMASIAN								
		TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN ^a			APOTEKER			TOTAL		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	HARAPAN		1	1		1	1	0	2	2
2	SENTANI	2	1	3	1		1	3	1	4
3	EBUNGFAUW		1	1			0	0	1	1
4	DOSAY	1	1	2			0	1	1	2
5	DEPAPRE		2	2			0	0	2	2
6	RAVENIRARA	1		1			0	1	0	1
7	KANDA			0	1		1	1	0	1
8	KEMTUK			0		1	1	0	1	1
9	SAWOY		1	1			0	0	1	1
10	NAMBLONG		1	1			0	0	1	1
11	GENYEM	1		1			0	1	0	1
12	NIMBOKRANG	1	1	2			0	1	1	2
13	DEMTA		1	1		1	1	0	2	2
14	YOKARI			0		1	1	0	1	1
15	UNURUM GUAY		1	1		1	1	0	2	2
16	TAJA		1	1			0	0	1	1
17	SADUYAP		1	1			0	0	1	1
18	LEREH		1	1			0	0	1	1
19	AIRU		1	1			0	0	1	1
20	PAGAI		1	1			0	0	1	1
SUB JUMLAH I (PUSKESMAS)		6	16	22	2	5	7	8	21	29
1	RS Yowari			10			6	0	0	16
	dst. (mencakup RS Pemerintah dan swasta dan termasuk pula Rumah Bersalin)			0			0	0	0	0
	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN			0			0	0	0	0
	KLINIK DI INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT			0			0	0	0	0
	KLINIK DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA			0			0	0	0	0
JUMLAH (KAB/KOTA) ^b		6	16	32	2	5	13	8	21	45
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK ^b				24,28			9,86			34,14

Untuk tenaga Kefarmasian, Kabupaten Jayapura memiliki tenaga teknis Farmasi atau Asisten Apoteker sebanyak 32 orang dan Apoteker sebanyak 13 orang pada tahun 2021.

Tabel 1.7
Gambaran Tenaga Manajemen dan Struktural di Kabupaten Jayapura tahun 2021

NO	UNIT KERJA	TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN									TOTAL		
		PEJABAT STRUKTURAL			TENAGA PENDIDIK			TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN					
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	HARAPAN			0			0		1	1	0	1	1
2	SENTANI			0			0	1	1	2	1	1	2
3	EBUNGFUW			0			0			0	0	0	0
4	DOSAY			0			0			0	0	0	0
5	DEPAPRE			0			0	1		1	1	0	1
6	RAVENIRARA			0			0			0	0	0	0
7	KANDA			0			0			0	0	0	0
8	KEMTUK			0			0			0	0	0	0
9	SAWOY			0			0			0	0	0	0
10	NAMBLONG			0			0			0	0	0	0
11	GENYEM			0			0	1		1	1	0	1
12	NIMBOKRANG			0			0			0	0	0	0
13	DEMTA			0			0	1		1	1	0	1
14	YOKARI			0			0			0	0	0	0
15	UNURUM GUAY			0			0			0	0	0	0
16	TAJA			0			0			0	0	0	0
17	SADUYAP			0			0			0	0	0	0
18	LEREH			0			0			0	0	0	0
19	AIRU			0			0			0	0	0	0
20	PAGAI			0			0			0	0	0	0
1	RS Yowari			14			0			52	0	0	66
	dst. (mencakup RS Pemerintah dan swasta dan termasuk pula Rumah Bersalin)			0			0			0	0	0	0
	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN			0			0			0	0	0	0
	INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT			0			0			0	0	0	0
	DINAS KESEHATAN KAB/KOTA	8	9	17			0			58	8	9	72
	JUMLAH (KAB/KOTA) ^a	8	9	17	0	0	0	4	2	6	12	11	23

Pelayanan kesehatan, membutuhkan tenaga pendukung seperti tenaga manajemen guna membantu tugas dan fungsi keuangan di UPTD Puskesmas. Tahun 2021, melalui tenaga kontrak, terdapat 6 tenaga manajemen akuntansi yang tersebar di Puskesmas Sentani, Puskesmas harapan, Puskesmas Genyem, dan 3 orang tenaga manajemen pada dinas kesehatan

1.3.2 Pegawai struktural Dinas Kesehatan Kabupaten jayapura

Pegawai Struktural pada Dinas Kesehatan Kabupaten jayapura terdiri dari 17 Jabatan eselonisasi dengan 1 esalon II, 5 esalon III dan 11 Jabatan eselon IV, dengan total OAP pada jabatan tersebut sebanyak 6 orang dan 11 orang adalah Non OAP. seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.8
Gambaran Jabatan Struktural di Kabupaten Jayapura tahun 2021
berdasarkan OAP dan Non OAP Tahun 2021

NO	URAIAN	SUKU			JUMLAH
		PAPUA	PAPUA NON JAYAPURA	NON PAPUA	
1	ESELON I				
2	ESELON II			1	1
3	ESELON III	1		4	5
4	ESELON IV	5		6	11
TOTAL					

1.3.3 Pegawai PNS dan Honorer

Dalam pelaksanaan Urusan wajib Dasar yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dasar, dilakukan oleh seluruh Pegawai yang ada pada 4 (empat) bidang teknis layanan yaitu bidang Pelayanan Kesehatan, bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dan Bidang Sumber daya Kesehatan. Jumlah pegawai pelaksana urusan wajib pelayanan dasar ini terdiri dari 79 orang pegawai pada kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dan 463 orang pada Puskesmas se-kabupaten Jayapura (Data Nominatif PNS 2021) yang memiliki kualifikasi pendidikan adalah Strata 2 Kesehatan Masyarakat, Strata 1 profesi Kesehatan, Diploma 3 Profesi Kesehatan serta pendidikan Setingkat SMU. Sedangkan pegawai dengan perjanjian kerja/ tenaga kontrak kesehatan pada tahun 2021 sebanyak 141 orang. Sehingga total pegawai ASN (PNS dan Tenaga Kontrak) adalah 542 orang. (Lampiran Tabel)



DAFTAR TENAGA KESEHATAN TAHUN 2021

NO	NAMA PKM	S3	S2	Dokter		Drg		Perawat		Bidan		Apoteker		Isten Apotek		Gizi		KM Promke		Umum		Kesling		Analis		Perawat Gig		SKM		Akuntan		KOTRA	
				PNS	Kontrak	PNS	Kontrak	PNS	Kontrak	PNS	Kontrak	PNS	Kontrak	PNS	Kontrak	PNS	Kontrak	PNS	Kontrak	PNS	Kontrak	PNS	Kontrak	PNS	Kontrak	PNS	Kontrak	PNS	Kontrak	PNS	Kontrak	PNS	Kontrak
1	SENTANI			6		1	28		23			1	3		7			1	1		2		6		2	1	1				1		
2	HARAPAN			2		2	12	3	12	1	1		1	1	4						3		3								1		
3	DOSAY			1		1	11		8	1			2		2			1	1		2		2		1								
4	YOKARI				1		4	2	3			1			1	1						1	2										
5	DEPAPRE			1			8	1	10				1	1	2							1	1										
6	KANDA				1		9		2			1			1			1				1	2										
7	EBUNGFUW			1			12	1	6					1	2						1	1	3										
8	KEMTUK			1			6	6	11			1			1			1			1	2					1						
9	SAWOY			1			3	2	7	1				1		1		1			1	1											
10	NAMBLONG				1		6	1	3					1	1			1			1	1						1					
11	GENYEM			2	1		6	5	12					1	2		1				2	1		1		1	1				1		
12	NIMBOKRANG			1	1		5	2	5					1	1	2		1			1	3											
13	DEMTA			1			6	4	4	2		1		1	3		1	1	3			1	2		1			1					
14	U.GUAY				1		4	3	5	1		1		1	1			1			1	1											
15	YAPSI			1	1		7	4	10	3				1		1	2		1			1	2										
16	AIRU						6		1	1				1		1		1				1		1									
17	LEREH				1		8	3	4				1		1	1	1					1	1										
18	GRESEL				1		4	1	2	2				1		1	1					1	1										
19	REVENIRARA				1		3	1	4					1	1			1			1	1	1										
20	PAGAY						6		1	1				1		1		1				1		1									
21	WAIBHU			1	1		11	3	10	3		1			1						1	1	2	1									
21	DINKES	1	15				10	1	2		2	3	2		2		2	5	3			1		1		23			3			3	
JUMLAH		1	15	19	11	4	175	43	145	16	3	10	11	14	33	8	7	13	11	3	17	13	37	4	5	2	27	1	6	3			

1.3.4 Aspek Pembiayaan Kesehatan

Dari laporan Realisasi Fisik dan Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Jayapura pada tahun 2020, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mendapat alokasi dana APBD sebesar **Rp 141.326.307.310,-** dalam bentuk Belanja Gaji Pegawai sebesar Rp 60.690.415.912 dan Belanja Program Pelayanan Kesehatan sebesar Rp 80.635.891.398 yang terbagi atas belanja urusan penunjang pemerintahan sebesar Rp. 2.142.982.858 dan urusan wajib pelayanan dasar sebesar Rp. 78.492.908.540 (Sumber data: DPA Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 2021). Anggaran tersebut naik signifikan dari tahun 2020 oleh karena penambahan anggaran DAK dan kebijakan refocusing Anggaran DAU dalam membiayai penanganan Covid-19.

Anggaran untuk membiayai program wajib Pelayanan Dasar sesuai RPJMD Kabupaten Jayapura 2017-2022 adalah Rp 58.592.626.721 atau alokasi anggaran tahun 2021 sebesar 133,96 % dari ketetapan RPJMD untuk tahun 2021. Dengan realisasi keuangan belanja sebesar Rp 125.975.339.861,-atau 89,14 %; dengan rincian sebagaimana pada lampiran.

Tabel 1.8
Gambaran Alokasi Anggaran sector Kesehatan tahun 2021

No	URAIAN	JUMLAH (RP)	
		Sebelum Perubahan	Setelah perubahan
	PENDAPATAN DAERAH	8.202.861.500	8.202.861.500
A	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8.152.861.500	8.152.861.500
1	Retribusi Daerah	50.000.000	50.000.000
2	Lain-Lain PAD yang Sah	8.152.861.500	8.152.861.500
	BELANJA DAERAH	119.066.425.084	141.259.969.743
B	Belanja Operasional	96.769.466.659	117.674.103.370
1	Belanja Pegawai	47.438.144.613	61.804.599.595
2	Belanja Barang dan Jasa	48.731.322.046	55.269.503.775
3	Belanja Hibahn	600.000.000	600.000.000
C	Belanja Modal	22.296.958.425	23.585.866.373
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.913.134.175	5.844.268.528
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.762.918.000	15.119.557.845
3	Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi	2.617.000.000	2.617.000.000
4	Belanja Modal Aset Tetap Aset Lainnya	3.906.250	5.040.000

1

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa postur anggaran kesehatan sudah memenuhi syarat alokasi anggaran. Alokasi Anggaran dari DAK dan OTSUS menjadi sumber pembiayaan terbesar yang dikelola pada sector kesehatan sehingga banyak program dan kegiatan merupakan aktivitas pembangunan kesehatan yang menjadi arahan Kementerian Kesehatan dan Provinsi Papua, sedangkan anggaran bersumber DAU/DID/DBH dan Pendapatan Asli Daerah menjadi bagian dalam kebijakan refocussing untuk pelaksanaan penanganan covid-19 di Kabupaten Jayapura serta pembiayaan kegiatan inovasi daerah, manajemen pelayanan dan pembiayaan kebutuhan sarana kesehatan di kampung.

1.4 Ruang Lingkup

Permasalahan Utama (Strategic Issued) Yang dihadapi

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak bisa diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Masalah Pokok.

Dari analisis masalah terhadap berbagai sector pembangunan, dari sector kesehatan dapat disimpulkan masalah pokoknya yaitu belum optimalnya Kualitas pelayanan Kesehatan oleh karena beberapa hal yaitu :

- a. Masih terbatas dan rendahnya kualitas tenaga para medis dan tenaga dokter.
- b. Keterbatasan sarana transportasi dalam mendukung pelayanan kesehatan.
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat.
- d. Belum optimalnya pemenuhan gizi sesuai standar untuk pencegahan *stunting*.
- e. Meningkatnya penderita diabetes, hipertensi dan penyakit tidak menular lainnya termasuk meningkatnya kasus orang dengan gangguan kejiwaan
- f. Disparitas Kualitas Lingkungan hidup di beberapa wilayah
- g. Tingginya Penyakit menular endemis

Masalah Urusan Wajib Dasar

Dari sector Kesehatan dapat dianalisis beberapa hal yaitu :

- a. Angka harapan hidup Tahun 2020 mencapai 67.05 tahun, telah melewati angka harapan hidup Provinsi Papua tahun 2019, yakni 65.79 tahun, namun masih jauh dari capaian ideal yakni 85 tahun.
- b. Masalah penyakit infeksi belum dapat diatasi namun masalah baru sudah harus segera mendapat perhatian, yaitu penyakit degeneratif dan penyakit kronis (hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung koroner dan sebagainya) yang frekuensinya semakin bertambah, menimbulkan beban ganda dan berimplikasi pada perencanaan di bidang kesehatan.
- c. Penyakit HIV/AIDS pada tingkat yang mengkhawatirkan yang memberi dampak negatif di bidang kesehatan, ekonomi dan pembangunan serta kesejahteraan.
- d. Sarana/fasilitas kesehatan yang masih terbatas untuk menjangkau luasnya wilayah serta kesulitan geografis. Sampai akhir tahun 2021 tersedia dua rumah sakit umum milik pemerintah dan TNI, 21 Puskesmas, 69 Puskesmas Pembantu (Pustu), 19 Polindes, 5 Pusling Air dan 26 kendaraan Pusling Darat dengan rincian 19 kendaraan baik dan 7 kendaraan rusak sedang-berat, dan memiliki 3 kendaraan PSC 119 serta 1 kendaraan ambulance jenazah yang dikelola Distrik Demta. Rasio posyandu/balita 1:48; rasio dokter PNS terhadap penduduk 1:167,5; rasio puskesmas terhadap wilayah 1:1 distrik.
- e. Sarana Prasarana dan Alat kesehatan pada beberapa bidang layanan di Rumah Sakit Umum Daerah masih sangat terbatas.
- f. Masih Terbatasnya Tenaga Dokter Spesialis di RSUD dan Puskesmas mampu PONE
- g. Sebanyak 30.6 % dari 144 Kampung/Kelurahan belum mempunyai tempat pembuangan akhir tinja hanya menggunakan kolam/sawah, sungai, lubang tanah, dan lainnya sebagai tempat buang air besar. Sekitar 45.32 % rumah tangga di Kabupaten Jayapura beresiko terkena pencemaran sumber air minum.
- h. Tenaga kesehatan belum merata terdistribusi sampai ke tingkat kampung.
- i. Masih minimnya fasilitas penunjang pelayanan posyandu di beberapa kampung.

- j. Belum meratanya sarana prasarana dan alat kesehatan kesehatan di setiap kampung.
- k. Belum optimalnya pelayanan Puskesmas 24 jam di wilayah-wilayah yang jangkauan terbilang cukup jauh dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
- l. Masih adanya kasus kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan dan nifas.
- m. Masih tingginya kasus kematian bayi umur 0 sampai kurang dari 1 tahun.

Tantangan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, adalah :

1. Akses Layanan Kesehatan oleh Masyarakat belum optimal yaitu pada angka 75,6 % dari total 144 Kampung/Kelurahan
2. Keterbatasan SDM Kesehatan berdasarkan Permenkes No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas pada Puskesmas Kriteria Pedesaan dan Sangat terpencil serta distribusi SDM Kesehatan di fasilitas layanan kesehatan belum merata.
3. Peralatan Puskesmas masih terbatas dalam melakukan layanan-layanan kesehatan, terutama layanan Kesehatan Ibu dan Anak, Layanan Unit Gawat Darurat, dan Upaya-upaya Kesehatan Masyarakat.
4. Kendaraan Operasional Puskesmas Roda 4 Puskesmas terbatas dan belum mencapai standard menurut Permenkes No. 43 tahun 2019
5. Tuntutan terhadap pelayanan kesehatan yang prima semakin tinggi
6. Beban ganda pencegahan dan penanggulangan penyakit dengan meningkatnya kasus penyakit tidak menular.
7. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020

Peluang Pengembangan Pelayanan Kesehatan

1. Puskesmas telah ada diseluruh Distrik di Kabupaten Jayapura
2. Petunjuk Teknis penggunaan dana Kapitasi JKN pada FKTP mendukung pemenuhan sarana dan prasarana FKTP/Puskesmas yang disesuaikan dengan anggaran yang diterima
3. Kebijakan Pemenuhan SDM Kesehatan melalui penyediaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diberbagai jenjang pemerintahan
4. Anggaran Dana Desa/Kampung dapat mendukung pelayanan kesehatan di kampung-kampung.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam manajemen kinerja organisasi. Dalam perencanaan kinerja dirumuskan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai, begitu juga indikator keberhasilan pencapaiannya.

2.1 Rencana Strategis

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengangkat visi “Terwujudnya Indonesia yang Maju, Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dari visi tersebut kemudian ditetapkan 9 misi untuk mewujudkannya yang meliputi:

- 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia**
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Pegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap Bangsa dan membreikan Rasa Aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
9. Sinergi pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Presiden menetapkan 5 Arahannya sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Arahannya tersebut adalah :

1. Pembangunan SDM
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan, dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua UU pemberdayaan UMKM

4. Penyederhaan Birokrasi

Mempriritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dan ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambahtinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesehatan pada RPJMN 2020-2024 berada pada strategi 1 yaitu layanan dasar dan perlindungan sosial dengan target tahun 2024 adalah 183/100.000 kelahiran hidup angka kematian Ibu.

1.2.1 Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Jayapura

Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura 2017-2022 yaitu :

“KABUPATEN JAYAPURA BERKUALITAS, SEJAHTERA DAN RAMAH” dengan beberapa pokok Visi yaitu “Jayapura berkualitas”, “Jayapura sejahtera”, “Jayapura ramah”.

maka Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura menindaklanjuti melalui Misi 1 yaitu **Meningkatkan Kualitas Manusia** dalam program dan kegiatan 2017-2022.

Perumusan Visi dan Misi Bupati serta Wakil Bupati Jayapura 2017-2022 dapat terlihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.1
Penjelasan Visi

Visi	Pernyataan Pokok Visi	Penjelasan Visi
Kabupaten Jayapura Berkualitas, Sejahtera dan Ramah	Jayapura Berkualitas	Kondisi dimana kualitas manusia meningkat melalui kemajuan pendidikan dan kesehatan dengan masyarakat adat yang berdaya dan kampung adat yang berkembang.
	Jayapura Sejahtera	Kondisi dimana produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian, peternakan, perikanan, industri, dan perdagangan meningkat secara berbasis ekonomi kerakyatan dengan dukungan infrastruktur wilayah yang mantap.
	Jayapura Ramah	Kondisi dimana tata kelola pemerintahan berjalan dengan akuntabel dan memberi pelayanan publik memuaskan dengan menempatkan distrik sebagai pusat pelayanan, reponsif gender dan ramah anak, serta berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Sedangkan penjelasan misi antara lain :

Tabel 2.2
Penjelasan Misi

No.	Pernyataan Visi	Misi	Penjelasan Misi
1.	Jayapura Berkualitas	Meningkatkan kualitas manusia	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan derajat pendidikan, derajat kesehatan, dan daya beli masyarakat
		Mendorong keberdayaan dan kemajuan masyarakat adat	Misi ini mencakup upaya umum dalam penguatan masyarakat hukum adat dan pengembangan kampung adat
	Jayapura Sejahtera	Mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan	Misi ini mencakup upaya umum dalam mendorong ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, jasa dan pariwisata.
		Mendorong peningkatan dan pemerataan infrastruktur	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur transportasi, perhubungan, perumahan dan permukiman.
	Jayapura Ramah	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Misi ini mencakup upaya umum dalam peningkatan akuntabilitas pemerintah-an, penguatan responsivitas gender dan perlindungan anak, serta penguatan distrik sebagai pusat pelayanan public.
		Melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam	Misi ini mencakup upaya umum pemeliharaan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sumberdaya alam.

Tabel 2.3

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kesehatan Tahun 2017-2022 (revisi)

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Tahun 2017	Target Capaian Kinerja Tahun-					Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	
tingkatkan kualitas	T1. Meningkatkan kualitas hidup manusia		Indeks Pembangunan Manusia	70,97	71,25	71,84	71,70	72,10	72,50	72,50
		S1. Meningkatnya derajat pendidikan dan tingkat literasi masyarakat	Indeks Pendidikan	71,13	71,36	72,05	72,25	72,75	73,15	73,15
		S2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	71,49	71,78	72,20	72,50	73,10	73,20	73,20
		S3. Meningkatnya daya beli masyarakat	• Pengeluaran perkapita	10,055	10,160	10,375	10,375	10,375	10,375	11,020

Dari data tabel diatas bahwa pada dokumen revisi RPJMD Kabupaten Jayapura tahun 2017-2022, ditetapkan indikator kinerja sebagai gambaran kinerja RPJMD adalah Indeks Kesehatan pada tahun 2021 sebesar 73,10.

Pada tabel dibawah ini dijelaskan perbandingan antara target sasaran pada beberapa dokumen perencanaan tingkat Provinsi Papua dan Nasional pada sektor kesehatan, dengan 3 indikator kinerja yang sama antara lain Angka kematian Ibu dan anak. Stunting dan Imunisasi Dasar Lengkap.

Tabel 2.4

Komparasi Target Capaian Indikator Kinerja Revisi RPJMD Kabupaten Jayapura 2017-2022, RPJMD Provinsi Papua 2019-2023 dan RPJMN Nasional 2019-2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Dinkes Kabupaten Jayapura	Sasaran pada Renstra Dinkes Provinsi Papua	Sasaran pada Renstra Kemenkes RI
1.	Angka Kematian Ibu dan Bayi	Angka Kematian Ibu sebesar <235/100.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Bayi sebesar <23/1000 Kelahiran Hidup dengan kondisi tahun 2020 tercapai AKI 33,5/100.000 KH dan AKB 25,8/1000 KH	Target Capaian AKI tahun 2023 adalah 200/100.000 KH sedangkan AKB sebesar 20/1000 KH	Target Capaian AKI Nasional 2024 adalah 183/100.000 KH sedangkan AKB adalah 24/1000 KH
2.	Stunting	Capaian indikator Stunting pada tahun 2020 adalah 16,37 %	Target Capaian Stunting tahun 2023 adalah 23 %	Target Capaian Stunting pada tahun 2024 adalah 14 %.
3	Imunisasi Dasar Lengkap	Capaian Indikator Imunisasi Dasar lengkap tahun 2020 adalah 89,92 %	Target Capaian Imunisasi Dasar Lengkap tahun 2023 adalah 95%	Target Capaian Imunisasi Dasar Lengkap Nasional tahun 2024 adalah 100 %

Strategi dan arah kebijakan daerah dalam pembangunan kesehatan ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jayapura 2017-2022 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2017-2022.

Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan

serangkaian arah kebijakan. Rumusan Strategi sector Kesehatan pada RPJMD Kabupaten Jayapura 2017-2022 adalah pada strategi ke-2 yaitu **Promosi pola hidup sehat secara bersinergi dengan pemenuhan standar pelayanan kesehatan minimal yang didukung oleh kecukupan sarana-prasarana dan tenaga kesehatan.**

Selain itu, Strategi yang dilakukan pada sektor Kesehatan yaitu pada Strategi ke-8 adalah **Perbaikan tatakelola dan reformasi birokrasi secara beriringan dengan penguatan distrik sebagai pusat aktivitas.**

Ekspektasi masyarakat atas pelayanan publik yang memuaskan telah semakin tinggi dan berkonsekuensi pada diperlukannya perbaikan tatakelola dan reformasi birokrasi secara terus menerus. Perbaikan tatakelola terkait dengan penerapan nilai-nilai efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan pemerintahan secara internal birokrasi maupun dalam interkoneksinya dengan masyarakat sipil dan dunia usaha.

Arah Kebijakan

Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan prioritas yang berbeda setiap tahun bukan berarti bahwa program/kegiatan pembangunan operasional pada PD di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, tetapi berjalan dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan.

Berdasarkan pemahaman demikian maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jayapura pada tahun 2021 adalah “Penguatan ekonomi kerakyatan dengan didukung oleh situasi kondusif yang tenteram, tertib dan aman”. Arah kebijakan tahun 2021 akan disinkronkan terhadap penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) dan akan berkontribusi signifikan sebagai tuan rumah penyelenggaraan ajang dimaksud Secara keseluruhan prioritas kebijakan pembangunan kesehatan pada tahun ini diarahkan kepada pemenuhan standard Pelayanan Minimal.

2.2 Tujuan

Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

Tujuan Pembangunan Kabupaten Jayapura melalui sektor kesehatan dilakukan melalui Misi 1 yaitu Meningkatkan kualitas hidup manusia dan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

2.3 Sasaran

Sasaran Pembangunan Kabupaten Jayapura melalui sektor kesehatan tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jayapura adalah Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terpenuhinya standar minimal pelayanan dasar.



Dalam Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 2017-2022, ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jayapura, sebagaimana pada tabel 2.3, yaitu :

Tabel 2.4

Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 2017-2022 untuk mendukung Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jayapura 2017-2022

Tujuan 1 RPJMD Kab Jayapura : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia

Sasaran 2 RPJMD Kab Jayapura : Meningkatnya derajat Kesehatan Manusia

No	Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja (tujuan, impact, outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Program Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
		T1: Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang merata										
		S1: Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar sampai ke daerah terpencil dan masyarakat terasing.	Prosentase Fasilitas Kesehatan di Kampung/Kelurahan	60	65	70	73	75	77	77		Dinas Kesehatan
		S2: Tersedianya Fasilitas Layanan Kesehatan yang memadai merata dan terakreditasi	Prosentase Puskesmas Terakreditasi	10	35	60	80	100	100	100		Dinas Kesehatan
		S3: Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan	Ketersediaan Obat	95	>90	>90	>90	>90	>90	>90		Dinas Kesehatan
		S4: Terlaksananya Pengembangan Obat Asli Kab. Jayapura	Jumlah Puskesmas Mengembangkan TOGA	0	10	13	15	18	20	20		Dinas Kesehatan



No	Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja (tujuan, impact, outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Program Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
		T2: Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas merata dan terjangkau	S1: Terlaksananya upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Puskesmas melaksanakan layanan Pencegahan Penyakit Menular	19	19	20	20	20	20	20	Dinas Kesehatan
			S2: Terlaksananya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit Tidak menular	Puskesmas melaksanakan layanan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	15	15	18	18	20	20	20	Dinas Kesehatan
			S3: Terlaksananya Upaya Kesehatan bagi Ibu melahirkan	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	188.8	250	240	235	230	220	2200	Dinas Kesehatan
			S4: Terlaksananya Upaya Kesehatan bagi Bayi dan Balita	Angkat Kematian Bayi per 1000 KH	22.7	23	23	23	23	23	23	Dinas Kesehatan
			S5: Terwujudnya perbaikan gizi masyarakat	Prosentase Stunting	30	28	27	25	23	20	20	Dinas Kesehatan



No	Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja (tujuan, impact, outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Program Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
		T2: Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas merata dan terjangkau	S6: Terwujudnya Lingkungan yang sehat di Masyarakat	Prosentase Kampung Stop Buang Air Besar Sembarangan	27	37	50	57	65	70	70	Dinas Kesehatan
			S7: Terlaksananya Layanan Kesehatan Anak Sekolah, Remaja, dan Lanjut Usia	Prosentase Anak Usia Pendidikan Dasar mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard	90	95	97	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
			S8: Terlaksananya Upaya Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Kejiwaan	Prosentase Penemuan dan penanganan Orang dengan Gangguan Kejiwaan	5	10	15	20	25	30	30	Dinas Kesehatan
		T3: Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan Kesehatan	S1: Terlaksananya promosi kesehatan sampai ke tingkat Kampung.	Rasio Posyandu per 100 balita	1,55	1,57	1,6	1,65	1,7	1,75	1,75	Dinas Kesehatan
			S2: Terwujudnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Prosentase Posyandu Aktif	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan



No	Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja (tujuan, impact, outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Program Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
		T3: Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan Kesehatan	S3: Terwujudnya Deteksi Dini di semua masalah kesehatan dan tertanggulangnya KLB, wabah dan bencana	Cakupan kampung/kel mengalami KLB dan bencana yang dilakukan penyelidikan epidemiolog dan penanganan <24 jam	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
		T4: Meningkatkan Pemerataan sumber daya Kesehatan	S1: Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tersertifikasi	Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan	2	12	18	20	21	22	22	Dinas Kesehatan
		T5: Meningkatkan Pembiayaan Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Minimal	S1: Terwujudnya jaminan kesehatan bagi masyarakat.	Prosentase Masyarakat dijamin oleh Jaminan Kesehatan	90	90	95	97	100	100	100	Dinas Kesehatan

**Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja merupakan perjanjian kerja antara Kepala Dinas Kesehatan dengan Bupati. Perjanjian kinerja ini yang akan dijadikan indikator kinerja Kepala Dinas Kesehatan. Uraian lengkap Perjanjian Kinerja 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2021

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran Program dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indikator Kinerja Utama				
		Indeks Kesehatan		73,1	Disusun berdasarkan DPA TA 2021 (sebelum Perubahan)	Disusun berdasarkan DPA TA 2021 (sebelum Perubahan)
2		Indikator Kinerja Kunci				
a		ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Tahun			
		Angka usia harapan hidup	Tahun	67,9		
		Persentase stunting	Persen	20		
		Prevalensi balita gizi kurang	Persen	<10		
b		LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR				
		Persentase balita gizi buruk	Persen	<3,68		
		Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100		
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran hidup	<23		
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran hidup	<30		
		Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran hidup	<23		
		Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	/100.000 Kelahiran hidup	<230		
		Prosentase Distrik memiliki satu Puskesmas	Persen	100		
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	90		
		Angka kejadian Malaria (API)	/ 1000 Penduduk	70		
	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100			
	Rata-rata Capaian SPM Kesehatan	Persen	100			
Total Anggaran Indikator Sasaran Strategis						Rp.72.232.060.471



Untuk Eselon III dan IV juga ditetapkan perjanjian kerja secara berjenjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk Triwulan I hingga IV pada tahun 2021 sebagaimana terlampir.

Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura menetapkan Indikator Kinerja Utama yang menjadi indikator kinerja yang termuat dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2017-2022. Indikator Kinerja Utama berjumlah 44 indikator yang terbagi atas :

1. Indikator Kualitas Kesehatan
2. Indikator Kuantitas Tenaga Medis
3. Indikator Kuantitas Sarana dan prasarana
4. Indikator Kualitas Pelayanan

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci dan SPM Kesehatan pada
Dinas Kesehatan Kab Jayapura tahun 2021

Sasaran RPJMD	: Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Indikator Sasaran RPJMD	: Indeks Kesehatan
Target Kinerja Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2021	: 73,2

INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RENSTRA (2017)	TARGET CAPAIAN TAHUN 2021	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)
1. KUALITAS KESEHATAN			
Indeks Kesehatan	71,49	73,1	73,2
Angka Usia Harapan Hidup		67,9	68
Prosentase Balita KURANG Gizi	1,24	<10	<10
Prosentase balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100
Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	22,7	<23	<23
Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup	21,1	<23	<23
Angka Kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	188,8	<230	<220
Angka Kematian Balita per 1000 Balita	24,92	<30	<30
Prosentase Ibu Hamil mendapat layanan ibu hamil (Prosentase Kunjungan K4)	47,3	65	70
Prosentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (Prosentase Pertolongan Persalinan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan)	85	96	100
Prosentase Komplikasi kebidanan yang ditangani	20,8	40	45



INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RENSTRA (2017)	TARGET CAPAIAN TAHUN 2021	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)
Prosentase pelayanan nifas	61	80	90
Prosentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (Prosentase Kunjungan Neonatus Lengkap)	71	90	95
Prosentase Kunjungan Bayi	70	100	100
Prosentase Kunjungan Balita yang mendapatkan layanan kesehatan balita sesuai standard (Prosentase pelayanan balita)	68	100	100
Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Tekanan Darah Tinggi/Hipertensi sesuai standard	2,25	<16.8	<16.8
Prosentase Penemuan dan penanganan Kasus Orang dengan Gangguan Kejiwaan	5	25	30
Prosentase penemuan dan penanganan kasus Diabetes Melitus Sesuai Standard	0	20	25
Prosentase orang beresiko HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standard (Prevalensi HIV)	2,18	<2.3	<2.3
Cakupan Kampung UCI	81,94%	90%	95%
Prosentase Anak usia 1 tahun yang dimunisasi Campak	95%	97%	97,50%
Non Polio AFP rate per 100.000 pddk <15 tahun	<1	<1	<1
Prosentase Balita pneumonia yang ditangani	40	80	90
Tingkat kematian karena TBC per 100.000 pddk	23,9	16	10
Prosentase Orang TB mendapatkan Layanan Pelayanan TB Sesuai Standard (Prosentase Penemuan dan penanganan penderita TBC)	140,00	100	100
Prosentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100
Prosentase Penderita diare yang ditangani	95	100	100
Angka Insidens Malaria (API) per 1000 Penduduk	171	70	50
Tingkat Kematian akibat malaria		0,5	0,4
Prosentase Usia 15-59 tahun mendapat screening kesehatan Sesuai Standard	0	50	50
Prosentase Usia Lansia mendapat screening kesehatan Sesuai Standard	0	50	50
2. KUANTITAS/KUALITAS TENAGA MEDIS			
Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan	2	21	22



INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RENSTRA (2017)	TARGET CAPAIAN TAHUN 2021	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)
3. KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA			
Rasio sarana kesehatan per 1000 pddk	0,82	0,90	1
Rasio Rumah sakit per 1000 pddk		0,01	0,01
Prosentase Puskesmas Terakreditasi	10	100	100
Prosentase Rumah Tinggal bersanitasi	48	58	60
Kampung SBS/ODF	27,08	65	70
Prosentase sarana air bersih yang memenuhi syarat	79,23	87	90
Prosentase Kampung yang melaksanakan Posbindu	10,42	50	60
Rasio Posyandu per satuan Balita	15,77	<20	<20
4. KUALITAS PELAYANAN			
Prosentase pelayanan rujukan bagi masyarakat miskin	90	100	100
Prosentase Anak Usia Pendidikan Dasar mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard (Prosentase penjarangan kesehatan siswa Pendidikan Dasar dan setingkat)	90	100	100
Prosentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin	95	100	100
Prosentase kampung/kel mengalami KLB dan bencana yang dilakukan penyelidikan epidemiolog dan penanganan <24 jam	100	100	100
Jumlah Puskesmas mengembangkan Tanaman Obat Keluarga	0	18	20
Prosentase ketersediaan obat	95	>90	>90

Dalam penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, berlandaskan pada indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci pada RPJMD Kabupaten Jayapura tahun 2018-2022 yaitu :

- 1) IKU yaitu Indeks Kesehatan
- 2) IKK terbagi atas Aspek Kesejahteraan Masyarakat sebanyak 4 indikator dan Layanan Urusan Wajib Dasar sebanyak 33 indikator, telah termasuk 12 Indikator SPM Kesehatan.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindaklanjut. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Rumusan strategi Revisi RPJMD Kabupaten Jayapura 2017-2022 pada sektor kesehatan dari total 9 strategi adalah **Strategi-2: Promosi pola hidup sehat secara bersinergi dengan pemenuhan standar pelayanan kesehatan minimal yang didukung oleh kecukupan sarana-prasarana dan tenaga kesehatan.**

Pembangunan kesehatan untuk peningkatan kualitas manusia dipahami dalam dua dimensi yang bersinergi, yakni mendorong pola hidup sehat dalam masyarakat dan melayani masyarakat yang menghadapi masalah kesehatan. Promosi pola hidup sehat merupakan strategi pencegahan melalui kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat. Pelayanan kesehatan masyarakat merupakan strategi penanggulangan dengan fokus pada upaya pencapaian standar pelayanan minimal. Strategi ini diharapkan dapat menangani dengan akurat realitas masalah kesehatan yang spesifik di Kabupaten Jayapura yakni masalah kesehatan yang tercakup dalam standar pelayanan minimal serta masalah spesifik lainnya seperti penyakit malaria, kesehatan reproduksi, kesehatan lingkungan, hipertensi, diabetes melitus, tubercolosis, gangguan jiwa berat dan HIV/AIDS serta pengelolaan potensi obat asli.

Selain itu, Strategi yang dilakukan pada sektor Kesehatan yaitu pada **Strategi ke-8** adalah **Perbaikan tatakelola dan reformasi birokrasi secara beriringan dengan penguatan distrik sebagai pusat aktivitas**, dimana strategi ini fokus pada pelaksanaan Standard Pelayanan Minimal Kesehatan kepada masyarakatnya.



Arah Kebijakan.

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, arah kebijakan dalam RPJMD adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan prioritas yang berbeda setiap tahun bukan berarti bahwa program/kegiatan pembangunan operasional pada Perangkat Daerah diprioritaskan tidak berjalan, tetapi berjalan dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Dengan demikian maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jayapura pada tahun 2021 yaitu tema pembangunan pada tahun 2021 adalah **“Penguatan ekonomi kerakyatan dengan didukung oleh situasi kondusif yang tenteram, tertib dan aman”**. Arah kebijakan tahun 2021 akan disinkronkan terhadap penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) dan akan berkontribusi signifikan sebagai tuan rumah penyelenggaraan ajang dimaksud.

Tabel 3.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kab Jayapura 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2018	2019	2020	2021	2022
Visi Kabupaten Jayapura Berkualitas, Sejahtera dan Ramah							
Misi-1: Meningkatkan Kualitas Manusia							
Meningkatkan derajat pendidikan, kesehatan dan daya saing tenaga kerja	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Promosi pola hidup sehat secara bersinergi dengan pemenuhan standar pelayanan kesehatan minimal yang didukung oleh kecukupan sarana-prasarana dan tenaga kesehatan					
			Pemenuhan standar pelayanan kesehatan minimal	Promosi pola hidup sehat	Pemenuhan sarana-prasarana kesehatan	Pemenuhan tenaga kesehatan	Akselerasi pencapaian standar pelayanan minimal



Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dapat dirinci sebagai berikut

Tabel 3.3

Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Strategi RPJMD	Strategi Renstra	Arah Kebijakan				
		2018	2019	2020	2021	2022
Promosi Pola Hidup Sehat secara bersinergi dengan pemenuhan Standard Pelayanan Minimal (SPM) yang didukung oleh kecukupan sarana dan prasarana dan tenaga kesehatan	Melaksanakan Standard Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan di fasilitas layanan kesehatan	Menetapkan Rincian Indikator untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan	Melakukan Evaluasi terhadap pencapaian SPM	Menganalisis program kesehatan untuk menunjang capaian SPM kesehatan	Mengarahkan seluruh program kegiatan baik Di Dinas Kesehatan dan Puskesmas guna pencapaian indikator SPM	Akselerasi program dan kegiatan SPM Kesehatan
	Melaksanakan Promosi Pola Hidup Sehat	Memperkuat puskesmas dengan menyediakan tenaga promosi kesehatan di seluruh puskesmas	Melaksanakan layanan promosi kesehatan di puskesmas sesuai SOP yang ditetapkan	Memperkuat Badan peduli Kesehatan distrik sebagai pilar kemandirian masyarakat	Meningkatkan penggunaan sarana kesehatan yang dibangun dan dikembangkan oleh Dinas Kesehatan	Akselerasi Promosi Kesehatan dalam menunjang pelaksanaan SPM Kesehatan



Strategi RPJMD	Strategi Renstra	Arah Kebijakan				
		2018	2019	2020	2021	2022
			Melaksanakan promosi kesehatan di Rumah Sakit			
	Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	Relokasi Puskesmas yang masuk dalam Ruang Terbuka Hijau	Membangun Puskesmas baru	Meningkatkan Puskesmas menjadi Puskesmas PONED	Membangun Puskesmas Baru dan peningkatan puskesmas PONED	Memperkuat sarana Perumahan Puskesmas
		Meningkatkan Ketersediaan Sarana Kesehatan di kampung	Meningkatkan Ketersediaan Sarana Kesehatan di kampung	Meningkatkan Ketersediaan Sarana Kesehatan di kampung	Meningkatkan Ketersediaan Sarana Kesehatan di kampung	Meningkatkan Ketersediaan Sarana Kesehatan di kampung
		Menguatkan prasarana Puskesmas	Menguatkan prasarana Promosi Kesehatan di Puskesmas	Menguatkan sarana dan prasarana Puskesmas dan Puskesmas pembantu	Menguatkan sarana dan prasarana Puskesmas dan Puskesmas pembantu	Menguatkan sarana dan prasarana Puskesmas dan Puskesmas pembantu



Strategi RPJMD	Strategi Renstra	Arah Kebijakan				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Pemenuhan tenaga kesehatan	Menyediakan tenaga kesehatan dalam menunjang pelaksanaan SPM	Menyediakan tenaga kesehatan dalam menunjang pelaksanaan Program promkes	Menyediakan tenaga kesehatan bagi sarana kesehatan yang baru dibangun	Menyediakan tenaga kesehatan dengan standard 9 jenis tenaga kesehatan	Menyediakan tenaga kesehatan dengan standard 9 jenis tenaga kesehatan di seluruh puskesmas
	Akselerasi pencapaian SPM Kesehatan	Menguatkan Indikator SPM di puskesmas	Melaksanakan seluruh indikator SPM Kesehatan minimal di 16 puskesmas	Melaksanakan seluruh indikator SPM Kesehatan minimal di 18 puskesmas	Melaksanakan Seluruh indikator SPM kesehatan di 20 puskesmas	Pencapaian target SPM Kesehatan
			Melaksanakan kerjasama lintas sektor	Memperkuat kerjasama lintas sektor	Mengevaluasi pelaksanaan kerjasama lintas sektor	Akselerasi kerjasama lintas sektor



Pengukuran capaian kinerja pada LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura ini dilakukan dengan menilai pencapaian indikator kinerja sasaran, sehingga diketahui berapa sasaran yang mencapai target yang ditetapkan dan berapa sasaran yang tidak memenuhi target, bahkan berapa sasaran yang tidak ada pencapaian sama sekali.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja pada sasaran-sasaran yang ditetapkan untuk dicapai pada tahun yang bersangkutan. Dalam rangka mendapatkan pencapaian target sasaran indikator kinerja dikonversikan dengan satuan kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja juga dilakukan pada kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dengan menilai Indikator Input, Proses, Output dan Outcome. Rincian pengukuran dilakukan menggunakan form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang dikonversikan dengan indikator kinerja kegiatan tersebut kedalam satuan yang dapat diukur seperti, Dana, SDM, Laporan, paket dan lain sebagainya. Sehingga terdapat beberapa tahapan dalam kerangka pengukuran kinerja yaitu :

1. Penyusunan Rencana Strategik
2. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
3. Penetapan Kinerja atas rencana kinerja tahunan yang telah disusun.
4. Pengukuran kinerja yang mencakup :
 - a. Pengukuran Kinerja Kegiatan, yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
 - b. Pengukuran tingkat Pencapaian Kinerja Tahunan, yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan



atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah dan SKPD di lingkungannya. Kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah menggunakan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Tabel 3.3 Skala Penilaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 91	Sangat Baik	
2	75,1 – 90,0	Tinggi	
3	65,1 – 75,0	Sedang	
4	50,1 – 65,0	Rendah	
5	$\leq 50,0$	Sangat Rendah	

3. 2. Capaian Kinerja terhadap indikator Realisasi Fisik Kegiatan

Ikhtisar kegiatan wajib berdasarkan RPJMD Kab. Jayapura 2017-2022 yang dilaksanakan untuk mendukung program sesuai rencana kerja tahun 2020 terdiri dari 18 program dan 104 kegiatan yang secara rinci dijelaskan dalam lampiran laporan ini. Jika dibandingkan dengan Program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai urusan wajib pelayanan dasar pada RPJMD Kabupaten Jayapura 2017-2022 sebanyak 23 Program maka 100% Rencana Kerja tahun 2020 termuat sesuai dokumen RPJMD.

Pelaksanaan Program dan kegiatan wajib tersebut yang terangkum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2020, diperoleh realisasi program kegiatan berupa realisasi Pendapatan dan realisasi Belanja.



Pendapatan

Pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura berdasarkan APBD tahun 2020 adalah:

1. Retribusi Jasa Umum berupa Jasa Pelayanan Kesehatan pada DPA induk sebesar Rp. 50.000.000 dan DPA Perubahan sebesar Rp. 10.000.000
2. Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah berupa dana Kapitasi JKN pada FKTP sesuai DPA induk sebesar Rp. 8.152.861.500 dan DPA Perubahan sebesar Rp. 8.469.865.406

Dari target diatas, realisasi pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura pada tahun anggaran 2020 adalah :

1. Retribusi Jasa umum terealisasi Rp. 3.215.000 atau 32,15% dari target yang ditetapkan
2. Lain-Lain Pendapatan Asli daerah yang sah melalui dana Kapitasi JKN sebesar Rp. 8.260.582.025 atau 97,52%

Belanja

Dalam pelaksanaan belanja terhadap 22 program dan 112 kegiatan, diperoleh realisasi fisik sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 95,64 %. Dalam pelaksanaan belanja tahun 2020, dibagi atas dua bagian yaitu :

- a. Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 43.964.616.938, yaitu :
 - Gaji pokok PNS Rp. 30.575.755.508
 - Tunjangan Keluarga Rp. 2.137.058.490
 - Tunjangan Jabatan Rp. 312.156.375
 - Tunjangan Fungsional Rp. 2.542.060.000
 - Tunjangan Fungsional Umum Rp. 337.555.000
 - Tunjangan beras Rp. 2.136.404.485
 - Tunjangan Pph Rp. 91.946.592
 - Pembulatan Gaji Rp. 443.663
 - Iuran Asuransi Kesehatan Rp. 1.234.078.657
 - Tunjangan daerah terpencil Rp. 155.323.750
 - Tunjangan papua Rp. 3.562.667.875



Pemerintah Kabupaten Jayapura

- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Rp. 63.061.239
 - Iuran jaminan Kematian Rp. 189.105.232
 - Belanja tambahan penghasilan bagi Dokter PNS Rp. 627.000.000
- b. Belanja Langsung sebesar 72.983.920.334. Belanja yang dilaksanakan antara lain :
- Belanja Pegawai Rp. 17.871.897.492 atau 24,48% dari total Belanja Langsung dengan nilai terbesar pada pembiayaan jasa medic sebagai bagian Perjanjian Kerjasama dengan BPJS
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 37.294.708.734 atau 51,09%
 - Belanja Modal Rp. 17.817.314.108 atau 24,41%

Belanja pada masing-masing bidang antara lain :

1. Sekretariat

Pelaksanaan belanja pada kegiatan-kegiatan administrasi dan penunjang pelayanan kesehatan dalam rangka memperkuat manajemen kesehatan. Sekretariat mengelola 8 Program dan 28 kegiatan.

2. Bidang P2P

Pelaksanaan belanja pada bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit difokuskan pada program-program layanan Penyakit Menular dan Tidak Menular yaitu 3 Program dengan 12 kegiatan.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Pelaksanaan belanja pada bidang Kesehatan Masyarakat difokuskan pada program-program Kesehatan Ibu dan Anak dalam menekan angka kematian ibu, bayi dan balita, kemudian program gizi, program Kesehatan lingkungan, program promosi kesehatan, program Kesehatan Kerja atau K3 sehingga pencapaian Usia Harapan Hidup sesuai target dapat tercapai. Bidang Kesehatan Masyarakat mengerjakan 9 Program dengan 16 kegiatan.

4. Bidang Pelayanan Kesehatan

Pelaksanaan belanja pada bidang Pelayanan Kesehatan difokuskan pada program-program pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan



sehingga pencapaian Usia Harapan Hidup sesuai target dapat tercapai. Bidang Pelayanan Kesehatan mengerjakan 4 Program dengan 48 kegiatan. Dalam pelaksanaan 48 kegiatan tersebut, 39 kegiatan dilakukan langsung/dikelola oleh Puskesmas secara mandiri menggunakan dana JKN (PAD) dan dana BOK Puskesmas (DAK Non Fisik).

Puskesmas dalam pelaksanaan program dan kegiatan mendapat pagu Rp. 26,499,446,046 atau 36.30% dari total pagu Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura.

5. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pelaksanaan belanja pada bidang Sumber Daya Kesehatan difokuskan pada pemenuhan Sumber daya manusia kesehatan melalui rekrutmen tenaga kesehatan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan serta pemenuhan logistik kesehatan berupa obat dan perbekalan kesehatan. Bidang Sumber Daya Kesehatan mengerjakan 3 Program dengan 5 kegiatan.

Pencapaian Indikator Kinerja berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 2017-2022

Pada dasarnya penetapan urusan wajib dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan mengacu pada kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan. Tujuan strategis pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan yang erat kaitannya dengan penetapan kewenangan wajib dan SPM bidang kesehatan, adalah :

- Terbangunnya komitmen antara pemerintah, legislatif, masyarakat dan stakeholder lainnya guna kesinambungan pembangunan kesehatan.
- Terlindungnya kesehatan masyarakat, khususnya penduduk miskin kelompok rentan, dan daerah miskin.
- Terwujudnya komitmen nasional dan global dalam program kesehatan.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah Kabupaten dan daerah Kota wajib menyelenggarakan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang



serasi antara Pemerintah dan Daerah, serta antar Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan RI.

Urusan Wajib ditetapkan untuk melindungi hak-hak konstitusional perorangan/ masyarakat, melindungi kepentingan nasional dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, kesejahteraan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum juga untuk memenuhi perjanjian / konvensi Internasional. Kabupaten / Kota melakukan urusan wajib di bidang kesehatan dengan menyelenggarakan SPM bidang kesehatan

Pencapaian SPM

SPM bidang kesehatan telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 tentang pelaksanaan SPM Kesehatan mengandung prinsip sebagai berikut :

- Diterapkan pada urusan wajib. Oleh karena itu SPM merupakan bagian integral dari Pembangunan Kesehatan yang berkesinambungan dan menyeluruh, terarah dan terpadu sesuai Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Nusantara Sehat.
- Diberlakukan untuk seluruh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. SPM harus mampu memberikan pelayanan kepada publik tanpa kecuali (tidak hanya masyarakat miskin), dalam bentuk, jenis, tingkat dan mutu pelayanan yang esential dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
- Menjamin akses masyarakat mendapat pelayanan dasar tanpa mengorbankan mutu dan mempunyai dampak luas pada masyarakat (positive Health Externality).
- Merupakan indikator kinerja bukan standar teknis, dikelola dengan manajerial profesional, sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya.
- Bersifat dinamis.
- Ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar.

Disamping prinsip-prinsip sebagaimana tersebut diatas, Kementrian Kesehatan telah sepakat menambahkan kriteria yang khusus yaitu :



Pemerintah Kabupaten Jayapura

- Urusan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal hanya merupakan pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan manajemen dianggap sebagai faktor pendukung dalam melaksanakan urusan wajib (perencanaan, pembiayaan, pengorganisasian, perizinan, sumberdaya, sistem dsb), tidak dimasukkan dalam SPM (kecuali critical support function).
- Urusan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal harus menjadi prioritas tinggi bagi Pemerintah Daerah karena melindungi hak-hak konstitusional perorangan dan masyarakat, untuk melindungi kepentingan nasional dan memenuhi komitmen nasional dan global serta merupakan penyebab utama kematian/kesakitan.
- Urusan Wajib dan SPM berorientasi pada Output yang langsung dirasakan masyarakat.
- Urusan Wajib dan SPM dilaksanakan secara terus menerus (sustainable), terukur (measurable) dan mungkin dapat dikerjakan (feasible).

Capaian indikator Kinerja bidang Kesehatan yang didalamnya terkandung indicator SPM Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :



Tabel 3.3
Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN 2017	TARGET 2020	CAPAIAN S.D 31 Des 2020	% Kinerja	Analisis Kinerja
1. KUALITAS KESEHATAN						
Angka Usia Harapan Hidup	TAHUN		67.7	71.20	105.17	
Prosentase Balita KURANG Gizi	%	1.24	<10	9.20	100.00	
Prosentase balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100.00	100.00	
Angka Kematian Bayi	/1000 pddk	22.7	<23	25.80	89.15	
Angka Kematian Neonatal	/1000 pddk	21.1	<23	24.80	92.74	
Angka Kematian ibu	/100.000 pddk	188.8	<235	33.00	100.00	
Angka Kematian Balita	/1000 pddk	24.92	<30	27.40	100.00	
Prosentase Kunjungan K4	%	47.3	100	67.80	67.80	
Prosentase Pertolongan Persalinan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	%	85	100	99.97	99.97	
Prosentase Komplikasi kebidanan yang ditangani	%	20.8	35	22.50	64.29	
Prosentase pelayanan nifas	%	61	75	91.70	122.27	
Prosentase Kunjungan Neonatus Lengkap (KN3)	%		100	90.96	90.96	
Prosentase Neonatus komplikasi yang tertangani	%	55	35	51.80	148.00	
Prosentase Kunjungan Bayi	%	70	92	47.67	51.82	
Prosentase pelayanan anak balita (8kali)	%	68	100	32.94	32.94	
Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Tekanan Darah Tinggi/Hipertensi	%	2.25	100	160.60	160.60	
Prosentase Penemuan dan penanganan Kasus Orang dengan Gangguan Kejiwaan	%	5	100	157.30	157.30	
Prosentase penemuan dan Penanganan kasus DM	%	0	100	108.10	108.10	
Prevalensi HIV		2.18	<2.3	2.20	100.00	
Prosentase Orang beresiko teinfeksi HIV mendapat pemeriksaan HIV	%		100	92.30	92.30	
Cakupan Kampung UCI	%	81.94%	85%	83.30	98.00	
Prosentase Anak usia 1 tahun yang dimunisasi Campak	%	95%	96.5	97.55	101.09	
Non Polio AFP rate per 100.000 pddk <15 tahun	/100.000 pddk <15 thn	<1	<1	9.00	11.11	
Prosentase Balita pneumonia yang ditangani	%	40	70	40.40	57.71	
Tingkat kematian karena TBC per 100.000 pddk	/100.000 pddk	23.9	16	4.20	100.00	
Cakupan Penemuan dan penanganan penerima TBC BTA	%	140.00	100	100.00	100.00	
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100.00	100.00	
Penderita diare yang ditangani	%	95	98	80.80	82.45	
Angka Insidens Malaria (API) per 1000 Penduduk	/1000 pddk	171	90	167.50	186.11	
Tingkat Kematian akibat malaria	/100.000 pddk		0.6	0	100.00	
Prosentase Usia 15-59 tahun mendapat screening kesehatan	%	0	100	25.96	25.96	
Prosentase Usia Lansia mendapat screening kesehatan	%	0	100	88.34	88.34	



INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN 2017	TARGET 2020	CAPAIAN S.D 31 Des 2020	% Kinerja	Analisis Kinerja
2. KUANTITAS/KUALITAS TENAGA MEDIS						
Puskesmas yang minimal memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan	unit	2	20	85.00	85.00	
3. KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA						
Rasio sarana kesehatan per 1000 pddk	/1000 pddk	0.82	0.87	0.82	94.25	
Rasio Rumah sakit per 1000 pddk	/1000 pddk		0.01	0.01	100.00	
Puskesmas Terakreditasi	unit	10	16	16.00	100.00	
Prosentase Rumah Tinggal bersanitasi	%	48	56	78.00	139.29	
Kampung SBS/ODF	%	27.08	57	30.60	53.68	
Cakupan sarana air bersih yang memenuhi syarat	%	79.23	85	79.30	93.29	
Persentase Kampung yang melaksanakan Posbindu	%	10.42	40	74.31	185.76	
Rasio Posyandu per satuan Balita	balita	15.77	<20	61.38	32.58	
4. KUALITAS PELAYANAN						
cakupan pelayanan rujukan bagi masyarakat miskin	%	90	100	100.00	100.00	
Cakupan penjangkaran kesehatan siswa Pendidikan Dasar dan setingkat (Kelas 1 dan kelas 7)	%	90	100	88.41	88.41	
Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin	%	95	100	100.00	100.00	
Cakupan kampung/kel mengalami KLB dan bencana yang dilakukan penyelidikan epidemiolog dan penanganan <24 jam	%	100	100	100.00	100.00	
Puskesmas mengembangkan Tanaman Obat Keluarga	Unit	0	15	10.00	66.67	
Persentase ketersediaan obat	%	95	>90	94.20	100.00	

Pada tabel diatas dapat dijelaskan hasil kinerja Kesehatan berdasarkan nilai target daerah yaitu :

1. **Indikator yang mendapat penilaian kinerja sangat baik** adalah sebanyak 30 indikator atau 65,22%, turun dari 69,57 % pada tahun 2019.
2. **Indikator yang mendapat penilaian Kinerja Tinggi** adalah sebanyak 6 indikator atau 13.04 % dari total indicator atau sama dengan kondisi tahun 2019
3. **Indikator yang mendapat penilaian sedang** adalah sebanyak 2 indikator atau 4,35 % dari total 46 indikator atau sama dengan kondisi tahun 2019



4. **Indikator yang mendapat penilaian rendah** adalah sebanyak 4 indikator atau 8,7 % dari total 46 indikator atau naik dari kondisi tahun 2019.
5. **Indikator yang mendapat penilaian sangat rendah** adalah sebanyak 4 indikator atau 8,7 % dari total 46 indikator atau naik dari kondisi tahun 2019

Jika dianalisis hasil kinerja Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2019 terhadap Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2019 yang memuat pelaksanaan SPM Kesehatan dengan target kinerja untuk seluruh indikator (12 Indikator) adalah 100 % maka tiga indikator telah mencapai target yang ditetapkan yaitu Prosentase Pelayanan Hipertensi sesuai standard, Prosentase Pelayanan Diabetes Melitus Sesuai Standard serta Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa sesuai standard.

Jika digambarkan dalam table maka dapat diperoleh hasil penerapan SPM Kesehatan DI Kabupaten Jayapura tahun 2020 yaitu :

Tabel. 3.4
Capaian Indikator SPM Kesehatan Kabupaten Jayapura Tahun 2020

JENIS PELAYAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TAHUN 2020		
		Jumlah orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang dilayani	Capaian =(4) : (3)X100%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	3190	2162	67,8 %
2. PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan fasilitas pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	3190	3042	99,97 %
3, PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	2988	2718	91,0 %
4. PELAYANAN KESEHATAN BALITA	Jumlah Balita usia 12-59 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	13.688	4.509	32,94 %
5. PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	8151	7678	94, 2 %



JENIS PELAYAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TAHUN 2020		
		Jumlah orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang dilayani	Capaian =(4) : (3)X100%
6. PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	Jumlah orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	89.895	23.340	25,96 %
7. PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	Jumlah orang berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	9296	8212	88,3 %
8. PELAYANAN PENDERITA HIPERTENSI	Jumlah penderita hipertensi usia >= 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2948	4735	160,6 %
9. PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	Jumlah penderita diabetes mellitus usia >= 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2068	2235	108,1 %
10. PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN Jiwa BERAT	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	157	247	157,3 %
11. PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TB	Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3439	3439	100 %
12. PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	3220	2972	92,3 %

Analisis Permasalahan

Kendala dalam pelaksanaan SPM Kesehatan di Kabupaten jayapura antara lain:

1. Pandemi Covid-19 di Kabupaten Jayapura menyebabkan kebijakan-kebijakan pembatasan aktivitas di masyarakat, juga mempengaruhi pelayanan yang dapat diberikan. Sebagaimana ditetapkan dalam berbagai pedoman pelayanan bahwa pelaksanaan janji temu dan penggunaan media komunikasi menjadi strategi untuk pelayanan Kesehatan. Sehingga keterbatasan tersebut menyebabkan beberapa kinerja tidak tercapai seperti layanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar, dan pelayanan balita.
2. Pembatasan petugas Kesehatan, terutama yang beresiko, dalam bekerja di sarana Kesehatan. Hal ini terkait penanganan pandemic COvid-19 di Kabupaten Jayapura sehingga ketersediaan SDM Kesehatan terbatas dalam pelaksanaan layanan SPM.



Pemerintah Kabupaten Jayapura

3. Beberapa indikator SPM yang tidak mencapai target atau zona kuning dan merah yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil (67,9)%, Pelayanan Kesehatan balita (32,94%), dan pelayanan Kesehatan pada usia produktif (25,96%). Sehingga dari 12 indikator SPM Kesehatan 67 % belum mencapai target sesuai peraturan perundang-undangan yaitu 100 %.
4. Kemandirian Masyarakat masih kurang dalam membangun kesehatan diri dan keluarga.
5. 75 % dari 144 Kampung/kelurahan di Kabupaten jayapura sudah memiliki sarana kesehatan sehingga masih ada 10-15 % kampung belum memiliki akses ke sarana kesehatan, dengan catatan bahwa tidak semua kampung harus memiliki sarana kesehatan karena jarak yang berdekatan dengan sarana kesehatan di kampung lainnya.
6. Dari 20 Puskesmas di Kabupaten jayapura, 16 Puskesmas yang sudah memiliki standard SDM Kesehatan sesuai permenkes 43 tahun 2019. Sedangkan 4 Puskesmas lainnya belum sesuai standard.
7. Pembiayaan SPM Kesehatan belum maksimal oleh karena DINas Kesehatan Kab Jayapura mengelola anggaran yang didominasi dana DAK dan OTSUS yang telah diatur menggunakan Petunjuk Teknis sehingga pelaksanaan kegiatan tidak bisa dilakukan dengan maksimal. Tahun 2019, postur anggaran DAK/OTSUS mencapai 95 %. Akibatnya juga pada manajemen pelaksanaan SPM Kesehatan.
8. Pengawasan secara berjenjang belum optimal oleh karena beban ganda pelaksanaan penanganan pandemic COvid-19.

Solusi

Dalam menghadapi kendala diatas beberapa solusi dapat diambil yaitu:

1. Memaksimalkan kegiatan/ program yang mendapat dukungan dana dan melaksanakan kegiatan dengan membuat evaluasi pertemuan untuk pemahaman definisi operasional (DO) dan melakukan skrining ke sasaran lebih di tingkatkan.



2. Kegiatan lebih banyak didanai oleh bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk puskesmas yang bersumber dari APBN. Pemanfaatan yang lebih efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.
3. Integrasi pelayanan yang belum mencapai target dengan Program PIS-PK
4. Penguatan sarana dan prasarana serta SDM Kesehatan
5. Pendekatan pembangunan kesehatan secara afirmasi agar kemandirian masyarakat bisa ditingkatkan.
6. Melibatkan lintas sector di Distrik dan kampung dengan lebih kuat/solid agar Indikator SPM Kesehatan dapat ditunjang dengan kapasitas dan modal yang ada di kampung melalui dana ADK dan ADD.
7. Pengawasan yang berjenjang dalam pelaksanaan SPM Kesehatan di fasilitas kesehatan

Tindak Lanjut

Dalam mereduksi permasalahan dan memperkuat solusi yang diambil, maka tidak lanjut jangka pendek adalah penguatan definisi operasional indicator SPM Kesehatan sampai tingkat kampung serta diperlukan perhitungan pembiayaan/costing SPM yang lebih efisien dan efektif

Selain itu dengan adanya sensus penduduk 2020 maka jumlah penduduk sebagai target pelayanan kesehatan tidak lagi menjadi masalah dalam pelaksanaan manajemen penerapan SPM Kesehatan

Realisasi Anggaran Tahun 2020

Dari laporan Realisasi Fisik dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura pada tahun 2020, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp 116.648.106.454,- dalam bentuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 43.664.186.120 dan Belanja Langsung sebesar Rp 72.983.920.334. untuk membiayai program dan kegiatan (Sumber data: DPA Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 2020). Anggaran tersebut



mengalami kenaikan sebesar Rp. 16.751.336.975 dari tahun 2019 yang terdiri dari dana OTSUS dan Dana Bagi Hasil (DBH) dan dana DAK.

Anggaran untuk membiayai program wajib Pelayanan Dasar sesuai RPJMD Kabupaten Jayapura 2017-2022 adalah Rp 72.983.920.334 atau 87,13% dengan realisasi keuangan belanja langsung sebesar Rp 69.800.315.838,- atau 95,64 %; dengan rincian sebagaimana pada lampiran.

1. Sekretariat

Pelaksanaan belanja pada kegiatan-kegiatan administrasi dan penunjang pelayanan kesehatan dalam rangka memperkuat manajemen kesehatan. Sekretariat mengelola 8 Program dan 28 kegiatan. Realisasi Fisik pada tahun 2020 adalah 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.085.538.214 atau 98.03%

Tabel 3.5
Realisasi program dan Kegiatan di Sekretariat

Program/Kegiatan	SD	Indikator	TARGET			REALISASI			
			Uang	Vol	Satuan	Uang	Sisa	PK (%)	PF (%)
PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN									
Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	DBH		0	10	paket surat	-	-		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	DBH	Jumlah layanan internet dibayarkan	21,960,000	3	layanan	15,659,475	6,300,525	71.31	100.00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	DBH	Jumlah peralatan kantor dapat beroperasi baik	3,600,000	11	unit	3,600,000	-	100.00	100.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	DBH	Jumlah kendaraan operasional dapat dibayarkan	47,400,000	29	unit	29,377,000	18,023,000	62	100.00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	DBH	Jumlah ASN mendapat honor admin keuangan	500,780,000	32	org	499,800,000	980,000	99.80	100.00
Penyediaan ATK	DBH	Jumlah jenis ATK	62,837,625	55	jenis	62,837,600	25	100.00	100.00
Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	DBH	Jumlah lembar penggandaan dokumen kantor	28,000,000	63,850	lembar	28,000,000	-	100.00	100.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor	DBH	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	7	jenis	-	-		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DBH	Jumlah paket perlengkapan kantor aparatur beroperasi baik	67,250,000	8	unit	67,250,000	-	100.00	100.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DBH	Jumlah jenis peralatan kebersihan kantor disediakan	10,075,750	14	jenis	10,075,750	-	100.00	100.00



Program/Kegiatan	SD	Indikator	TARGET			REALISASI			
			Uang	Vol	Satuan	Uang	Sisa	PK (%)	PF (%)
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan UU	DBH	Jumlah langganan sumber bacaan/informasi	4,800,000	2	bahan bacaan	3,540,000	1,260,000	73.75	100.00
Penyediaan Bahan Logistik kantor	DBH	jumlah BBM operasional kendaraan operasional	135,952,500	12,490	liter	135,952,500	-	100.00	100.00
Penyediaan Makanan dan Minuman	DBH	Jumlah kotak bahan makanan dan minuman	30,000,000	10	jenis	29,980,750	19,250	99.94	100.00
Rapat Koordinasi dan Konsultansi Ke Luar daerah	DBH	Jumlah paket Biaya Perjalanan dinas aparatur	120,000,000	13	kali	119,999,988	12	100.00	100.00
Monev dan koordinasi/konsultasi	DBH	Jumlah frekuensi kunjungan dalam daerah	101,915,000	150	kali	101,905,000	10,000	99.99	86.00
Penyelenggaraan Hari Besar Nasional dan Keagamaan	DBH	Jumlah penyelenggaraan hari besar dan agenda penting daerah	-	3	kali	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
Pengadaan peralatan Gedung Kantor	DBH	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	26,152,500		unit	26,152,500	-	100.00	100.00
Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	DBH	Jumlah gedung kantor dapat digunakan baik	40,000,000	19	unit	40,000,000	-	100.00	100.00
Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional	DBH	Jumlah kendaraan operasional dapat beroperasi baik	98,800,000	5	unit	98,637,900	162,100	99.84	100.00
Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor	DBH	Jumlah peralatan gedung kantor dapat beroperasi baik	21,575,000	1	unit	17,575,000	4,000,000	81.46	100.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur							-		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapan	DBH	Jumlah set pakaian dinas	85,850,000	80	pasang	85,850,000	-	100.00	100.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							-		
Bimbingan teknis implementasi Peraturan per-UU	DBH	Jumlah puskesmas dilaksanakan BIMTEK kepegawaian	18,720,000	18	puskesmas	18,720,000	-	100.00	100.00
Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							-		
Penyusunan lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	DBH	Jumlah dokumen laporan wajib tahunan	22,036,250	5	laporan	22,036,250	-	100.00	100.00
Program Stadarisasi Pelayanan Kesehatan		Jumlah Dokumen Pembangunan Kesehatan tersusun			dok		-		
Penyusunan Standard Pelayanan Kesehatan	DBH	Dokumen Standard Pelayanan Kesehatan	1,150,000	21	dok	1,150,000	-		
Pembangunan dan Pemuthairan data dasar SPK	DBH	Jumlah Dokumen Data Dasar Kesehatan yang tersedia dalam menunjang Pencapaian standard Pembiayaan Kesehatan	65,515,000	1	dok	64,365,000	1,150,000	98.24	100.00



Program/Kegiatan	SD	Indikator	TARGET			REALISASI			
			Uang	Vol	Satuan	Uang	Sisa	PK (%)	PF (%)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat							-		
Penyediaan Insentif Dokter dan paramedis	DBH	Jumlah Tenaga Kesehatan Non ASN mendapat Insentif daerah	473,000,000	26	orang	472,000,000	1,000,000	99.79	100.00
Penyediaan Insentif Dokter dan paramedis (BOK) Tambahan			5,010,000,000			5,007,911,001	2,088,999	99.96	100.00
Program Peningkatan Manajemen Kesehatan		Jumlah Dokumen SIKDA tersusun			Dok		-		
Rapat Kerja Kesehatan	DBH	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang dihasilkan untuk mendukung kebijakan pembiayaan pembangunan kesehatan	-	1	Dok		-		
Pengembangan SIKDA Kab. Jayapura	DBH	Jumlah pertemuan SIKDA dengan Puskesmas	123,462,500	3	kali	123,162,500	300,000	99.76	100.00
TOTAL			7,120,832,125			7,085,538,214	35,293,911	99.50	

2. Bidang P2P

Pelaksanaan belanja pada bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit difokuskan pada program-program layanan Penyakit Menular dan Tidak Menular yaitu 3 Program dengan 12 kegiatan. Dalam pelaksanaannya, realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.431.996.150 atau 99.00%

Tabel 3.6
Realisasi program dan Kegiatan di Bidang P2P

Program/Kegiatan	SD	Indikator	TARGET			REALISASI			
			Uang	Vol	Satuan	Uang	Sisa	PK (%)	PF (%)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat							-		
Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit menular dan wabah (HIV/AIDS dan IMS)	OTSUS	Jumlah Kasus HIV/AIDS yang tertangani	275,000,000	19	kasus	270,476,000	4,524,000	98.35	100.00
Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit tidak menular	DAK	Jumlah posbindu yang dibentuk	307,000,000	60	posbindu	301,090,000	5,910,000	98.07	100.00



Program/Kegiatan	SD	Indikator	TARGET			REALISASI			
			Uang	Vol	Satuan	Uang	Sisa	PK (%)	PF (%)
Program Pencegahan dan Penanggulangan Peny Menular		Jumlah puskesmas melaksanakan Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular			puskesmas		-		
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	DAK	Jumlah Daerah Fokus Fogging	250,000,000	40	lokus	250,000,000	-	100.00	100.00
Pengadaan Alat fogging dan Bahan Fogging	DAK	Jumlah alat Fogging dan bahan fogging	105,000,000	15	unit	105,000,000	-	100.00	100.00
Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	DAK	Jumlah Distrik yang dilakukan pendampingan program BIAS	114,000,000	19	distrik	114,000,000	-	100.00	100.00
Pelayanan pencegahan dan Penanggulangan Peny.Menular (Penanggulangan Kusta dan Frambusia)	OTSUS	Jumlah Pasien Kusta dan Frambusia diobati	60,000,000	50	pasien/org	54,000,000	6,000,000	90.00	100.00
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik (Pengendalian Malaria)	DAK	Angka Parasit Insidens Kab Jayapura/1000 pdk	600,000,000	20	/1000 pdk	600,000,000	-	100.00	100.00
Peningkatan Imunisasi	DAK	Persentase Kampung UCI	250,000,000	19	%	250,000,000	-	100.00	100.00
Peningkatan Surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah	DAK	Jumlah Kampung mendapat penanggulangan Wabah	54,000,000	10	kampung	54,000,000	-	100.00	100.00
Penanggulangan Penyakit TB	OTSUS	Jumlah Suspek TB ditemukan dan diobati	297,430,150	606	suspek/org	284,430,150	13,000,000	95.63	99.00
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		Jumlah Puskesmas Melaksanakan layanan Kesehatan ISPA pada balita dan Filariasis			puskesmas		-		
Penanggulangan ISPA	DAK	Persentase penanganan ISPA pada balita	49,000,000	18	%	49,000,000	-	100.00	100.00
Penanggulangan Penyakit Cacingan	DAK	Jumlah Puskesmas yang mikrofilaria rate dibawah 1 %	100,000,000	20	puskesmas	100,000,000	-	100.00	100.00
TOTAL			2,461,430,150			2,431,996,150	29,434,000	98.80	100.00



3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Pelaksanaan belanja pada bidang Kesehatan Masyarakat difokuskan pada program-program Kesehatan Ibu dan Anak dalam menekan angka kematian ibu, bayi dan balita, kemudian program gizi, program Kesehatan lingkungan, program promosi kesehatan, program Kesehatan Kerja atau K3 sehingga pencapaian Usia Harapan Hidup sesuai target dapat tercapai. Bidang Kesehatan Masyarakat mengerjakan 10 Program dengan 16 kegiatan. Dalam pelaksanaannya, realisasi fisik sebesar 98.00% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.556.837.300 atau 88.60%

Tabel 3.7
Realisasi program dan Kegiatan di Bidang Kesmas

Program/Kegiatan	SD	Indikator	TARGET			REALISASI			
			Uang	Vol	Satuan	Uang	Sisa	PK (%)	PF (%)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat							-		
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	DAK	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan K3	190,000,000	10	puskesmas	190,000,000	-	100.00	100.00
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	DAK	Jumlah Kampung STBM/SBS	330,000,000	40	kampung	188,642,250	141,357,750	57.16	58.00
Program Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat		Prosentase Kampung SBS			%		-		
Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat	DAK	Jumlah Jenis sarana Media Promkes	50,000,000	4	jenis	50,000,000	-	100.00	100.00
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	DAK	Jumlah orang mendapat Penyuluhan STBM di kampung	110,795,000	2	org	110,795,000	-	100.00	100.00
Peningkatan Pemamfaatan Sarana Kesehatan	DAK	Jumlah kampung akses rumah tunggu	77,845,000	40	kampung	72,345,000	5,500,000	92.93	93.00
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan	DAK	Jumlah Badan Peduli Kesehatan yang dibentuk	-	5	BPK	-	-		
Program Perbaikan Gizi Masyarakat		Prosentase Balita Gizi Kurang			%		-		
Penanggulangan KEP,GAKY,Kurang Vitamin A dan kekurangan gizi mikro lainnya	DAK	Jumlah TMC dibentuk dan Pelaksanaan TMC Gizi Puskesmas	750,000,000	19	TMC	718,517,700	31,482,300	95.80	100.00
Perbaikan Gizi Masyarakat	DAK	Jumlah Puskesmas yang menangani Kasus BGM	112,000,000	20	puskesmas	112,000,000	-	100.00	100.00



Program/Kegiatan	SD	Indikator	TARGET			REALISASI			
			Uang	Vol	Satuan	Uang	Sisa	PK (%)	PF (%)
Program Pengembangan Lingkungan Sehat		Prosentase Rumah Tinggal Bersanitasi			%		-		
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	DAK	Jumlah sampel dari Sarana baik Sumber Air, Tempat Pengolahan Makanan dan Tempat-Tempat Umum yang diperiksa	603,000,000	18	sampel	487,051,350	115,948,650	80.77	81.00
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan							-		
Kemitraan Peningkatan Kualitas dokter dan paramedis	DAK	Jumlah Pertemuan AMP yang dilaksanakan	110,000,000	4	kali	110,000,000	-	100.00	100.00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak balita		cakupan pelayanan anak balita							
Pendidikan dan Perawatan Anak balita	DAK	Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitas	140,000,000	80	orang	60,000,000	80,000,000	42.86	100.00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia		Jumlah Poslansia yang aktif			poslansia		-		
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	DAK	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Prolanis	150,000,000	10	puskesmas	144,800,000	5,200,000	96.53	100.00
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan		Jumlah usaha makanan produksi rumah tangga yang memenuhi syarat			tempat usaha		-		
Pengawasan dan pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah tangga	DAK	Jumlah usaha makanan produksi rumah tangga yang memenuhi syarat	153,500,000	50	tempat usaha	124,788,500	28,711,500	81.30	100.00
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		Angka Kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup							
Pelatihan APN petugas	DAK	Jumlah Bidan yang mendapat peningkatan kapasitas layanan teknis	120,000,000	135	orang	119,999,500	500	100.00	100.00
Pelayanan antenatal, persalinan, nifas dan perawatan bayi baru lahir	DAK	Prosentase Neonatus Risti tertangani	96,000,000	24	%	53,700,000	42,300,000	55.94	100.00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		Jumlah puskesmas melaksanakan Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular			puskesmas		-		
Penanggulangan Penyakit Menular Baru	DAK		1,021,398,000			1,014,198,000	7,200,000	99.30	99.03
TOTAL			4,014,538,000			3,556,837,300	450,500,700	88.60	98.00



4. Bidang Pelayanan Kesehatan

Pelaksanaan belanja pada bidang Pelayanan Kesehatan difokuskan pada program-program pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujuka sehingga pencapaian Usia Harapan Hidup sesuai target dapat tercapai. Bidang Pelayanan Kesehatan mengerjakan 3 Program dengan 44 kegiatan. Dalam pelaksanaan 44 kegiatan tersebut, 39 kegiatan dilakukan langsung/dikelola oleh Puskesmas secara mandiri menggunakan dana JKN (PAD) dan dana BOK Puskesmas (DAK Non Fisik). Realisasi fisik sebesar 97.00% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.214.543.013 atau 93.86%

Tabel 3.8
Realisasi program dan Kegiatan di Bidang Pelayanan Kesehatan

Program/Kegiatan	SD	Indikator	TARGET			REALISASI			
			Uang	Vol	Satuan	Uang	Sisa	PK (%)	PF (%)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat							-		
Peningkatan Kesehatan Masyarakat	OTSUS	Jumlah kunjungan ke Kampung sangat terpencil/daerah sulit yang mendapat pelayanan kesehatan terpadu	470,815,650	2	kali	470,815,650	-	100.00	100.00
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	OTSUS	Jumlah Fasyankes mendapat biaya Operasional	1,327,000,000	94	fasyankes	1,317,500,000	9,500,000	99.28	93.10
Peningkatan Kesehatan Masyarakat FKTP Yapsi	JKN	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan kesehatan bersumber dari BPJS	434,820,822			434,820,822	-	100.00	70.00
Peningkatan Kesehatan Masyarakat FKTP Kentuk	JKN	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan kesehatan bersumber dari BPJS	249,047,261			201,059,579	47,987,682	80.73	60.00
Peningkatan Kesehatan Masyarakat FKTP Kanda	JKN	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan kesehatan bersumber dari BPJS	498,896,608			442,289,150	56,607,458	88.65	60.00
Peningkatan Kesehatan Masyarakat FKTP Saduyap	JKN	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan kesehatan bersumber dari BPJS	49,243,500			37,160,552	12,082,948	75.46	62.00
Peningkatan Kesehatan Masyarakat FKTP Ebungfauw	JKN	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan kesehatan bersumber dari BPJS	168,217,092			168,217,092	-	100.00	65.00



Program/Kegiatan	SD	Indikator	TARGET			REALISASI			
			Uang	Vol	Satuan	Uang	Sisa	PK (%)	PF (%)
Peningkatan Kesehatan Masyarakat FKTP Airu	JKN	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan kesehatan bersumber dari BPJS	55,018,000			50,137,080	4,880,920	91.13	65.00
Peningkatan Kesehatan Masyarakat FKTP Namblong	JKN	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan kesehatan bersumber dari BPJS	156,397,500			143,502,300	12,895,200	91.75	60.00
Peningkatan Kesehatan Masyarakat FKTP Yokari	JKN	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan kesehatan bersumber dari BPJS	104,673,050			84,163,600	20,509,450	80.41	55.00
Peningkatan Kesehatan Masyarakat FKTP Ravenirara	JKN	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan kesehatan bersumber dari BPJS	59,611,500			58,066,900	1,544,600	97.41	62.00
Peningkatan Kesehatan Masyarakat FKTP Sentani	JKN	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan kesehatan bersumber dari BPJS	4,078,748,139.00			3,837,929,729	240,818,410	94.10	96.00
Peningkatan Kesehatan Masyarakat FKTP Harapan	JKN	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan kesehatan bersumber dari BPJS	662,000,179.00			647,677,775	14,322,404	97.84	56.00
Peningkatan Kesehatan Masyarakat FKTP Depapre	JKN	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan kesehatan bersumber dari BPJS	249,237,502			247,196,702	2,040,800	99.18	67.00
Peningkatan Kesehatan Masyarakat FKTP Dosay	JKN	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan kesehatan bersumber dari BPJS	274,768,200			258,592,750	16,175,450	94.11	65.00
Peningkatan Kesehatan Masyarakat FKTP Genyem	JKN	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan kesehatan bersumber dari BPJS	370,848,500			331,169,900	39,678,600	89.30	56.00
Peningkatan Kesehatan Masyarakat FKTP Nimbokrang	JKN	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan kesehatan bersumber dari BPJS	391,360,782			367,200,750	24,160,032	93.83	64.00
Peningkatan Kesehatan Masyarakat FKTP Unurunguay	JKN	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan kesehatan bersumber dari BPJS	160,418,400			156,414,900	4,003,500	97.50	61.00
Peningkatan Kesehatan Masyarakat FKTP Demta	JKN	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan kesehatan bersumber dari BPJS	245,773,300			189,739,403	56,033,897	77.20	60.00



Program/Kegiatan	SD	Indikator	TARGET			REALISASI			
			Uang	Vol	Satuan	Uang	Sisa	PK (%)	PF (%)
Peningkatan Kesehatan Masyarakat FKTP Sawoy	JKN	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan kesehatan bersumber dari BPJS	322,390,074			310,371,141	12,018,933	96.27	62.09
Peningkatan Kesehatan Masyarakat FKTP Lereh	JKN	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan kesehatan bersumber dari BPJS	345,285,000			294,871,900	50,413,100	85.40	55.00
Penyediaan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Yapsi	DAK	Jumlah Puskesmas melaksanakan Layanan kesehatan preventif dan promotif	943,000,000			942,999,250	750	100.00	100.00
Penyediaan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Kemtuk	DAK	Jumlah Puskesmas melaksanakan Layanan kesehatan preventif dan promotif	930,000,000			930,000,000	-	100.00	100.00
Penyediaan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Kanda	DAK	Jumlah Puskesmas melaksanakan Layanan kesehatan preventif dan promotif	910,000,000			909,600,000	400,000	99.96	100.00
Penyediaan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Saduyap	DAK	Jumlah Puskesmas melaksanakan Layanan kesehatan preventif dan promotif	855,000,000			855,000,000	-	100.00	100.00
Penyediaan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Ebungfauw	DAK	Jumlah Puskesmas melaksanakan Layanan kesehatan preventif dan promotif	890,000,000			888,800,000	1,200,000	99.87	100.00
Penyediaan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Airu	DAK	Jumlah Puskesmas melaksanakan Layanan kesehatan preventif dan promotif	795,000,000			795,000,000	-	100.00	100.00
Penyediaan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Namblong	DAK	Jumlah Puskesmas melaksanakan Layanan kesehatan preventif dan promotif	910,000,000			909,950,000	50,000	99.99	100.00
Penyediaan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Yokari	DAK	Jumlah Puskesmas melaksanakan Layanan kesehatan preventif dan promotif	890,500,000			890,500,000	-	100.00	100.00



Program/Kegiatan	SD	Indikator	TARGET			REALISASI			
			Uang	Vol	Satuan	Uang	Sisa	PK (%)	PF (%)
Penyediaan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Ravenirara	DAK	Jumlah Puskesmas melaksanakan Layanan kesehatan preventif dan promotif	820,000,000			820,000,000	-	100.00	100.00
Penyediaan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Sentani	DAK	Jumlah Puskesmas melaksanakan Layanan kesehatan preventif dan promotif	934,081,000			933,873,500	207,500	99.98	100.00
Penyediaan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Harapan	DAK	Jumlah Puskesmas melaksanakan Layanan kesehatan preventif dan promotif	927,000,000			926,869,088	130,912	99.99	100.00
Penyediaan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Depapre	DAK	Jumlah Puskesmas melaksanakan Layanan kesehatan preventif dan promotif	927,000,000			927,000,000	-	100.00	100.00
Penyediaan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Dosay	DAK	Jumlah Puskesmas melaksanakan Layanan kesehatan preventif dan promotif	890,000,000			890,000,000	-	100.00	100.00
Penyediaan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Genyem	DAK	Jumlah Puskesmas melaksanakan Layanan kesehatan preventif dan promotif	965,000,000			965,000,000	-	100.00	100.00
Penyediaan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Nimbokrang	DAK	Jumlah Puskesmas melaksanakan Layanan kesehatan preventif dan promotif	930,000,000			930,000,000	-	100.00	100.00
Penyediaan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Unurunguay	DAK	Jumlah Puskesmas melaksanakan Layanan kesehatan preventif dan promotif	935,000,000			934,827,000	173,000	99.98	100.00
Penyediaan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Demta	DAK	Jumlah Puskesmas melaksanakan Layanan kesehatan preventif dan promotif	930,000,000			930,000,000	-	100.00	100.00
Penyediaan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Sawoy	DAK	Jumlah Puskesmas melaksanakan Layanan kesehatan preventif dan promotif	945,000,000			944,997,500	2,500	100.00	100.00



Program/Kegiatan	SD	Indikator	TARGET			REALISASI			
			Uang	Vol	Satuan	Uang	Sisa	PK (%)	PF (%)
Penyediaan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Lereh	DAK	Jumlah Puskesmas melaksanakan Layanan kesehatan preventif dan promotif	915,000,000			914,999,000	1,000	100.00	100.00
Penyediaan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Pagai	DAK	Jumlah Puskesmas melaksanakan Layanan kesehatan preventif dan promotif	788,000,000			788,000,000	-	100.00	100.00
Penyediaan Dana Manajemen BOK	DAK	Jumlah pertemuan manajemen pelaksanaan BOK	333,430,000	2	kali	333,430,000	-	100.00	97.00
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia		Jumlah Puskesmas yang mengembangkan Taman Obat Keluarga			puskesmas		-		
Pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional (SP3T)	DBH	Jumlah Puskesmas yang mengembangkan Taman Obat Keluarga	-	7	puskesmas	-	-		
Program registrasi dan Akreditasi Bidang Kesehatan		Prosentase Puskesmas terakreditasi			%		-		
Registrasi dan Akreditasi Kesehatan	DAK	Prosentase Puskesmas terakreditasi	2,087,800,000	9	%	804,800,000	1,283,000,000	38.55	35.00
TOTAL			31,125,382,059			29,214,543,013	1,910,839,046	93.86	97.00

Berdasarkan data tabel diatas, Puskesmas dalam pelaksanaan program dan kegiatan mendapat pagu Rp. 26,499,446,046 atau 36.30% dari total pagu Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura



5. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pelaksanaan belanja pada bidang Sumber Daya Kesehatan difokuskan pada pemenuhan Sumber daya manusia kesehatan melalui rekrutmen tenaga kesehatan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan serta pemenuhan logistik kesehatan berupa obat dan perbekalan kesehatan. Bidang Sumber Daya Kesehatan mengerjakan 4 Program dengan 7 kegiatan. Realisasi fisik sebesar 99.00% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.294.787.427 atau 97.16%

Tabel 3.10
Realisasi program dan Kegiatan di Bidang SDK

Program/Kegiatan	SD	Indikator	TARGET			REALISASI			
			Uang	Vol	Satuan	Uang	Sisa	PK (%)	PF (%)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							-		
Pendidikan dan Pelatihan Formal	DBH	Jumlah ASN ditingkatkan kapasitasnya	-	42	orang	-	-		
Program Upaya Kesehatan Masyarakat							-		
Rekrutmen Tenaga pelayanan Kesehatan	OTSUS	Jumlah Tenaga Kesehatan yang dikontrak pemerintah	3,780,000,000	90	orang	3,778,880,000	1,120,000	99.97	100.00
Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit tidak menular	DAK	Jumlah posbindu yang dibentuk	307,000,000	60	posbindu	301,090,000	5,910,000	98.07	100.00
Rekrutmen Tenaga pelayanan Kesehatan (DAK)	DAK	Jumlah Tenaga Kesehatan yang dikontrak pemerintah	899,500,000	25	orang	884,400,000	15,100,000	98.32	100.00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Peny Menular		Jumlah puskesmas melaksanakan Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular			puskesmas		-		
Pemusnahan/Karantina sumber Penyakit Menular	DID		250,000,000			172,150,000	77,850,000	68.86	70.00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan							-		
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	DAK	Jumlah Jenis Obat dan BHP yang tersedia	4,063,760,000	110	jenis	3,894,229,488	169,530,512	95.83	97.00
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekkes	DAK	Jumlah Kunjungan yang mendapat distribusi obat dari IFK	266,475,000	32	kali	264,037,939	2,437,061	99.09	99.09
TOTAL			9,566,735,000			9,294,787,427	271,947,573	97.16	99.00



Dari data tabel realisasi fisik dan keuangan setiap bidang diatas, maka diperoleh kesimpulan bahwa realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai target output kegiatan yang diharapkan dengan realisasi keuangan 95.64%. Realisasi keuangan terendah terdapat pada Bidang Kesehatan Masyarakat dengan penyerapan anggaran sebesar 88.6 %. Sedangkan untuk kegiatan dengan prosentase penyerapan terendah adalah pada kegiatan Registrasi dan Akreditasi Sarana Kesehatan sebesar 35 %. Hal ini terjadi akibat penyesuaian Petunjuk Teknis DAK Non Fisik dalam rangka kebijakan pembatasan aktivitas.

3.3 Capaian Kinerja tahun 2021

Capaian realisasi Keuangan

Dari laporan Realisasi Fisik dan Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Jayapura pada tahun 2020, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mendapat alokasi dana APBD sebesar **Rp 141.326.307.310,-** dalam bentuk Belanja Gaji Pegawai sebesar Rp 60.690.415.912 dan Belanja Program Pelayanan Kesehatan sebesar Rp 80.635.891.398 yang terbagi atas belanja urusan penunjang pemerintahan sebesar Rp. 2.142.982.858 dan urusan wajib pelayanan dasar sebesar Rp. 78.492.908.540 (Sumber data: DPA Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 2021). Anggaran tersebut naik signifikan dari tahun 2020 oleh karena penambahan anggaran DAK dan kebijakan refocusing Anggaran DAU dalam membiayai penanganan Covid-19.

Anggaran untuk membiayai program wajib Pelayanan Dasar sesuai RPJMD Kabupaten Jayapura 2017-2022 adalah Rp 58.592.626.721 atau alokasi anggaran tahun 2021 sebesar 133,96 % dari ketetapan RPJMD untuk tahun 2021. Dengan realisasi keuangan belanja sebesar Rp 125.975.339.861,-atau89,14 %; dengan rincian sebagaimana pada lampiran.



Tabel 3.11

Gambaran Alokasi Anggaran sector Kesehatan tahun 2021

No	URAIAN	JUMLAH (RP)	
		Sebelum Perubahan	Setelah perubahan
	PENDAPATAN DAERAH	8.202.861.500	8.202.861.500
A	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8.152.861.500	8.152.861.500
1	Retribusi Daerah	50.000.000	50.000.000
2	Lain-Lain PAD yang Sah	8.152.861.500	8.152.861.500
	BELANJA DAERAH	119.066.425.084	141.259.969.743
B	Belanja Operasional	96.769.466.659	117.674.103.370
1	Belanja Pegawai	47.438.144.613	61.804.599.595
2	Belanja Barang dan Jasa	48.731.322.046	55.269.503.775
3	Belanja Hibahn	600.000.000	600.000.000
C	Belanja Modal	22.296.958.425	23.585.866.373
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.913.134.175	5.844.268.528
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.762.918.000	15.119.557.845
3	Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi	2.617.000.000	2.617.000.000
4	Belanja Modal Aset Tetap Aset Lainnya	3.906.250	5.040.000

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa postur anggaran kesehatan sudah memenuhi syarat alokasi anggaran. Alokasi Anggaran dari DAK dan OTSUS menjadi sumber pembiayaan terbesar yang dikelola pada sector kesehatan sehingga banyak program dan kegiatan merupakan aktivitas pembangunan kesehatan yang menjadi arahan Kementerian Kesehatan dan Provinsi Papua, sedangkan anggaran bersumber DAU/DID/DBH dan Pendapatan Asli Daerah menjadi bagian dalam kebijakan refocussing untuk pelaksanaan penanganan covid-19 di Kabupaten Jayapura serta pembiayaan kegiatan inovasi daerah, manajemen pelayanan dan pembiayaan kebutuhan sarana kesehatan di kampung.

Pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura berdasarkan APBD tahun 2021 adalah:

1. Retribusi Jasa Umum berupa Jasa Pelayanan Kesehatan pada DPA induk sebesar Rp. 50.000.000 dan DPA Perubahan sebesar Rp. 50.000.000
2. Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah berupa dana Kapitasi JKN pada FKTP sesuai DPA perubahan sebesar Rp. 8.152.861.500

Dari target diatas, realisasi pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura pada tahun anggaran 2021 adalah :



Pemerintah Kabupaten Jayapura

1. Retribusi Jasa umum terealisasi Rp. 3.700.000 atau 7,4%
2. Lain-Lain Pendapatan Asli daerah yang sah melalui dana Kapitasi JKN sebesar Rp. 7.357.425.300 atau 87,85% Realisasi Belanja Menurut Jenis belanja

Dalam pelaksanaan belanja terhadap 5 program 16 kegiatan dan 64 sub kegiatan diperoleh realisasi fisik sebesar 91,50 % dengan realisasi keuangan sebesar 89,14 %. Dalam pelaksanaan belanja tahun 2021, dibagi atas dua bagian yaitu :

- a. Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 59.968.819,595,63 yaitu :
 - Gaji pokok PNS Rp. 35.955.288.249,63
 - Tunjangan Keluarga Rp. 2.178.148.445
 - Tunjangan Jabatan Rp. 305.525.700
 - Tunjangan Fungsional Rp. 2.557.202.500
 - Tunjangan Fungsional Umum Rp. 699.901.400
 - Tunjangan beras Rp. 2.787.851.070
 - Tunjangan Pph Rp. 100.158.159
 - Pembulatan Gaji Rp. 650.955
 - Iuran Asuransi Kesehatan Rp. 1.434.703.124
 - Tunjangan Khusus Rp. 4.407.169.800
 - Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS Rp. 3.028.000.000
 - Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS Rp. 4.024.134
 - Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS Rp. 1.297.886.151
 - Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Rp. 4.916.752.889



Pemerintah Kabupaten Jayapura

- Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK Rp.135.000.000
- b. Belanja Langsung sebesar 78.855.370.148 Belanja yang dilaksanakan antara lain :
- Belanja Pegawai Rp. 61.804.599.595,63 atau 43,75% dari total Belanja Langsung dengan nilai terbesar pada pembiayaan jasa medic sebagai bagian Perjanjian Kerjasama dengan BPJS
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 55.269.503.775 atau 39.12 %
 - Belanja Modal Rp. 23.585.866.373 atau 16.69 %
 - Belanja Hibah Rp.600.000.000 atau 0,42 %

Belanja pada masing-masing bidang antara lain :

1. Sekretariat

Pelaksanaan belanja pada kegiatan-kegiatan administrasi dan penunjang pelayanan kesehatan dalam rangka memperkuat manajemen kesehatan dan gaji ASN. Sekretariat mengelola 2 Program, 7 Kegiatan dan 21 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.62.509.978.038

2. Bidang P2P

Pelaksanaan belanja pada bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit difokuskan pada program-program layanan Penyakit Menular dan Tidak Menular yaitu 1 Program dengan 1 kegiatan dan 9 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.5.778.460.333

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Pelaksanaan belanja pada bidang Kesehatan Masyarakat difokuskan pada program-program Kesehatan Ibu dan Anak dalam menekan angka kematian ibu, bayi dan balita, kemudian program gizi, program Kesehatan lingkungan, program promosi kesehatan, program Kesehatan Kerja atau K3 sehingga pencapaian Usia Harapan Hidup sesuai target dapat tercapai. Bidang Kesehatan Masyarakat mengerjakan



3 Program dengan 6 Kegiatan dan 15 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.254.423.730

4. Bidang Pelayanan Kesehatan

Pelaksanaan belanja pada bidang Pelayanan Kesehatan difokuskan pada program-program pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan sehingga pencapaian Usia Harapan Hidup sesuai target dapat tercapai. Bidang Pelayanan Kesehatan mengerjakan 1 Program dengan 2 kegiatan dan 15 sub kegiatan. Dalam pelaksanaan 15 sub kegiatan tersebut, 2 sub kegiatan dilakukan langsung/dikelola oleh Puskesmas secara mandiri menggunakan dana JKN (PAD) dan dana BOK Puskesmas (DAK Non Fisik). Dengan anggaran sebesar Rp. 56.299.765.583

5. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pelaksanaan belanja pada bidang Sumber Daya Kesehatan difokuskan pada pemenuhan Sumberdaya manusia kesehatan melalui rekrutmen tenaga kesehatan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan serta pemenuhan logistik kesehatan berupa obat dan perbekalan kesehatan. Bidang Sumber Daya Kesehatan mengerjakan 3 Program dengan kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.13.474.670.626.

Secara keseluruhan baik jumlah Program,kegiatan, sub kegiatan , jumlah anggaran dan Realisasi anggaran disajikan dalam table berikut:



CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2021																		
PERANGKAT DAERAH	: DINAS KESEHATAN																	
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ BElanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan dan Keluaran Sub Kegiatan	Satuan Tolak Ukur Kinerja	Terget Kinerja	Jumlah Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp)	Program			Kegiatan			Kegiatan			
					(Rp)	%			JP	JPT	JPBT	JK	JKT	JKBT	JSK	JSKT	JSKBT	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6x100)	(9)	(10=6-7)	(11)	(12)	(13=11-12)	(14)	(15)	(16=14-15)	(17)	(18)	(19=17-18)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1	1	0							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	240.369.675	238.669.675	99,29	100,00	1.700.000				1	1					
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA PD	Dokumen	1	114.934.000	113.734.000	98,96	100,00	1.200.000							1	1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP yang disusun	Dokumen	6	31.159.000	31.159.000	100,00	100,00	-							1	1		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi	Dokumen	1	94.276.675,00	93.776.675,00	99,47	100,00	500.000							1	1		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	60.690.415.912,00	57.046.576.043,00	94,00	98,90	3.643.839.869				1	1					
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	Orang	600	60.035.157.162,00	56.425.158.043	93,99	100,00	3.609.999.119							1	1		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah orang yang mendapat tunjangan pelaksanaan administrasi tugas ASN	Orang	32	655.258.750,00	621.418.000	94,84	100,00	33.840.750							1	1		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	215.228.000,00	215.183.000,00	99,98	100,00	45.000				1	1					
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	Orang	60	147.998.000	147.953.000	99,97	100,00	45.000							1	1		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Orang	18	67.230.000	67.230.000	100,00	100,00	-							1	1		



Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Umum Perangkat Daerah	%	100	495.073.940,00	440.518.711,00	88,98	88,98	54.555.229				1	1				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	7	3.389.180	3.389.180	100,00	100,00	-						1	1		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	21	24.171.260	21.405.725	88,56	100,00	2.765.535						1	1		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang tersedia	Liter	16419	154.330.000	140.307.300	90,91	100,00	14.022.700						1	1		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetak dan penggandaan	Jenis	50892	32.600.000	29.936.400	91,83	100,00	2.663.600						1	1		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis	2	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	-						1	1		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis makan minum yang disediakan	Jenis	8	40.043.500	40.043.500	100,00	100,00	-						1	1		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kali	10	237.540.000	202.436.606	85,22	100,00	35.103.394						1	1		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang urusan Perangkat Daerah	%	100	47.440.000,00	32.628.700,00	68,78	87,27	14.811.300				1	1				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat berharga yang terpakai (Materai)	Lembar	10	450.000	142.000	31,56	50,00	308.000						1	1		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air	Jenis	2	39.120.000	24.616.700	62,93	100,00	14.503.300						1	1		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diservice	Unit	11	7.870.000	7.870.000	100,00	100,00	-						1	1		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	489.612.511,00	435.845.546,00	89,02	91,05	53.766.965				1	1				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	5	443.810.000	390.097.546	87,90	90,00	53.712.454						1	1		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.802.511	45.748.000	99,88	100,00	54.511						1	1		



PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase Puskesmas melaksanakan UKP dan UKM sesuai standar																			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase ketersediaan fasilitas Kesehatan di kampung		77	31.886.073.315,00	24.945.197.105,00	78,23	84,41	6.940.876.210												
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas baru dibangun	unit	1	12.000.000.000	6.613.410.160	55,11	70,00	5.386.589.840												
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas Pembantu dibangun	unit	1	751.122.355	728.300.000	96,96	100,00	22.822.355												
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang tersedia	unit	4	2.150.000.000	2.147.361.000	99,88	100,00	2.639.000												
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan penambahan Ruang	unit	1	2.058.204.800	1.544.805.028	75,06	75,06	513.399.772												
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah peningkatan sarana puskesmas	paket	1	905.177.490	903.800.000	99,85	100,00	1.377.490												
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapat peningkatan sarana dan prasarana	PKM	9	5.941.706.849	5.917.310.899	99,59	100,00	24.395.950												
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapat Alat Kesehatan	Jenis	104	1.412.933.000	1.382.712.952	97,86	100,00	30.220.048												
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Jenis Obat dan BHP yang tersedia	jenis	110	3.329.660.059	3.035.483.548	91,16	95,00	294.176.511												
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah fasyankes yang terdistribusinya BHP oleh IFK	PKM	20	3.274.678.062	2.660.121.518	81,23	85,00	614.556.544												
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat yang di kalibrasi	jenis	14	62.590.700	11.892.000	19,00	19,00	50.698.700												



Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelayanan Standar Minimal Kesehatan Masyarakat	%	100	39.673.490.152,00	36.093.675.625,00	90,98	93,21	3.579.814.527										
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	2979	519.487.000	326.555.500	62,86	70,00	192.931.500										
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	2838	961.392.580	922.972.480	96,00	100,00	38.420.100										
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Bayi	2828	100.000.000	97.620.000	97,62	100,00	2.380.000										
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	13281	61.802.100	61.802.100	100,00	100,00	-										
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	2612	50.000.000	50.000.000	100,00	100,00	-										
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Posbindu	91220	135.800.000	135.800.000	100,00	100,00	-										
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah puskesmas melaksanakan layanan OGJ	PKM	157	50.000.000	50.000.000	100,00	100,00	-										
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Suspek TB ditemukan dan diobati	Orang	3439	350.000.000	275.560.000	78,73	90,00	74.440.000										
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Kasus HIV/AIDS yang tertangani	orang	2550	300.000.000	291.465.000	97,16	100,00	8.535.000										



Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah orang terdampak Krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana	orang	858	3.943.110.333	2.438.268.533	61,84	70,00	1.504.841.800										1	1
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Balita kurang Gizi mendapat pelayanan kesehatan	orang	707	832.928.000	809.618.000	97,20	100,00	23.310.000										1	1
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan K3	PKM	10	24.294.500	24.294.500	100,00	100,00	-										1	1
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah sampel Sarana air Bersih, tempat pengolahan makanan yang diperiksa	sampel	61	181.407.550	181.257.550	99,92	100,00	150.000										1	1
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Jenis sarana Media Promkes	Jenis	5	74.097.000	74.097.000	100,00	100,00	-										1	1
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang mengembangkan Taman Obat Keluarga	PKM	15	34.885.000	34.885.000	100,00	100,00	-										1	1
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Surveilans	%	20	100.000.000	100.000.000	100,00	100,00	-										1	1
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Kampung sangat terpencil/daerah sulit yang mendapat pelayanan kesehatan terpadu	kampung	4	470.815.650	470.727.950	99,98	100,00	87.700										1	1
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Jenis Penyakit menular yang ditangani	jenis	5	758.000.000	617.855.000	81,51	90,00	140.145.000										1	1



Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan kesehatan bersumber dari BPJS	Puskesmas	19	8.374.728.238	7.357.425.300	87,85	87,85	1.017.302.938											1	1
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas Melaksanakan layanan telemedicine	Puskesmas	2	843.405.000	842.893.000	99,94	100,00	512.000											1	1
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas melaksanakan Layanan kesehatan preventif dan promotif	Puskesmas	20	18.176.975.000	18.174.569.011	99,99	100,00	2.405.989											1	1
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasyankes mendapat biaya Operasional	Fasyankes	114	1.892.148.201	1.892.148.201	100,00	100,00	-											1	1
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Puskesmas	3	1.187.664.000	653.111.500	54,99	60,00	534.552.500											1	1
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Kampung yang UCI	kampung	125	200.700.000	174.700.000	87,05	90,00	26.000.000											1	1
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah lokasi di survey epidemiologi	lokasi	19	49.850.000	36.050.000	72,32	72,32	13.800.000											1	1
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Manajemen Kesehatan	Dokumen	5	331.838.000,00	301.725.000,00	90,93	100,00	30.113.000					1	1						
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Data Dasar Kesehatan yang tersedia dalam menunjang Pencapaian standard Pembiayaan Kesehatan	Dokumen	1	100.000.000	87.300.000	87,30	100,00	12.700.000											1	1
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah pertemuan SIKDA dengan Puskesmas	Kali	4	231.838.000	214.425.000	92,49	100,00	17.413.000											1	1



PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Jumlah pelaku Usaha farmasi, alkes dan makanan minuman memenuhi syarat									1	1						
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat produksi pangan IRT dan Nomor PIRT sebagai Ijin produksi untuk Produk makanan	Sertifikat	70	97.745.000,00	97.744.800,00	100,00	100,00	200				1	1				
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor - PIRT yang diterbitkan	Sertifikat	70	97.745.000	97.744.800	100,00	100,00	200								1	1
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Tempat pengolahan makanan dan Depot air minum yang memenuhi syarat	Sarana	50	155.330.000,00	142.570.000,00	91,79	100,00	12.760.000				1	1				
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik	Jumlah usaha makanan produksi rumah tangga yang memenuhi syarat	Sarana	50	155.330.000	142.570.000	91,79	100,00	12.760.000								1	1
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang tersedia	Sarana	625	5.000.000,00	4.992.000,00	99,84	100,00	8.000				1	1				
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Sarana Distribus/Penjualan Makanan dan Pangan yang diperiksa	Sarana	8	5.000.000	4.992.000	99,84	100,00	8.000								1	1



Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah sarana industri rumah tangga yang diperiksa		75	65.497.000,00	60.178.800,00	91,88	100,00	5.318.200				1	1				
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah sampel makanan minuman yang diperiksa	Sampel	12	65.497.000	60.178.800	91,88	100,00	5.318.200							1	1	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah distrik yang mendapatkan penguatan pemberdayaan masyarakat						-	-		1	1						
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah distrik terlaksana peran serta kemitraan masyarakat		4	125.452.000,00	125.452.000,00	100,00	100,00	-				1	1				
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan Promosi, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Distrik	4	125.452.000	125.452.000	100,00	100,00	-								1	1
JUMLAH				141.326.307.310,00	125.975.339.861,00	89,14	91,50	15.350.967.449	5	5	0	16	16	0	64	64	0
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						89,14	91,50										
PREDIKAT KINERJA						Tinggi	Tinggi										



Capaian realisasi Kinerja Tahun 2021

Capaian indikator Kinerja bidang Kesehatan yang didalamnya terkandung indikator SPM Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.12
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA PADA AWAL TAHUN 2017	TARGET 2021	CAPAIAN S.D 31 DES 2021		% Kinerja	Analisis Kinerja
					Absolut	Persen		
1. KUALITAS KESEHATAN								
1	Indeksi Kesehatan			73,1		72,2	98,8	
2	Angka Usia Harapan Hidup	TAHUN		67,9		67,16	98,9	
3	Prosentase Balita KURANG Gizi	%	1,24	<10	466	6,80	100,0	
	Prosentase balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100		100,00	100,0	
5	Angka Kematian Bayi	/1000 pddk	22,7	<23	4	30,67	75,0	
6	Angka Kematian Neonatal	/1000 pddk	21,1	<23	90	29,36	78,3	
7	Angka Kematian ibu	/100.000 pddk	188,8	<230	6	195,76	100,0	
8	Angka Kematian Balita	/1000 pddk	24,92	<30	14	33,93	88,4	
9	Prosentase Kunjungan K4	%	47,3	100	2302	77,27	77,3	
10	Prosentase Pertolongan Persalinan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	%	85	100	3.189	108,00	108,0	
11	Prosentase Komplikasi kebidanan yang ditangani	%	20,8	45	458	76,87	170,8	
12	Prosentase pelayanan nifas	%	61	90	3154	106,77	118,6	
	Prosentase Kunjungan Neonatus Lengkap (KN3)	%		100	3101	104,38	104,4	
13	Prosentase Neonatus komplikasi yang tertangani	%	55	50	211	45,80	91,6	
14	Prosentase Kunjungan Bayi	%	70	100	3638	61,90	61,9	
15	Prosentase pelayanan anak balita (8kali)	%	68	100	7807	58,78	58,8	
16	Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Tekanan Darah Tinggi/Hipertensi	%	2,25	100	2159	78,10	78,1	
17	Prosentase Penemuan dan penanganan Kasus Orang dengan Gangguan Kejiwaan	%	5	100	138	87,9	87,9	
18	Prosentase penemuan dan Penanganan kasus DM	%	0	100	1057	50	50,3	
19	Prevalensi HIV		2,18	<2.3		2,3	100,0	
	Prosentase Orang beresiko teinfeksi HIV mendapat pemeriksaan HIV	%		100	3.124	95,6	95,6	
20	Cakupan Kampung UCI	%	81,94%	90	116	81	90,0	
	Prosentase Anak usia 1 tahun yang dimunisasi Campak	%	95%	97	3.047	112,5	116,0	
21	Non Polio AFP rate per 100.000 pddk <15 tahun	/100.000 pddk <15 thn	>1	>1	4	10,2	100,0	
22	Prosentase Balita pneumonia yang ditangani	%	40	80	745	33,48	41,9	
24	Tingkat kematian karena TBC per 100.000 pddk	/100.000 pddk	23,9	16	689	25,3	63,2	
25	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita TBC BTA	%		100	3.329	78,70	78,7	
26	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	7	100,00	100,0	
27	Prosentase Stunting	%	16	32	619	9,03	100,0	



NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA PADA AWAL TAHUN 2017	TARGET 2021	CAPAIAN S.D 31 DES 2021		% Kinerja	Analisis Kinerja
					Absolut	Persen		
27	Penderita diare yang ditangani	%	95	100	1.782	48,48	48,5	
28	Angka Insidens Malaria (API) per 1000 Penduduk	/1000 pddk	171	70	26.195	192,40	36,4	
29	Tingkat Kematian akibat malaria	/100.000 pddk		0,5	-	-	100,0	
29	Prosenstase Usia 15-59 tahun mendapat screening kesehatan	%	0	100	51.678	56,7	56,7	
30	Prosenstase Usia Lansia mendapat screening kesehatan	%	0	100	5.049	96,40	96,4	
2. KUANTITAS/KUALITAS TENAGA MEDIS								
31	Puskesmas yang minimal memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan	unit	2	21	18	85,71	85,7	
3. KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA								
32	Rasio sarana kesehatan per 1000 pddk	/1000 pddk	0,82	0,90	110	0,83	100,0	
33	Rasio Rumah sakit per 1000 pddk	/1000 pddk		0,01	2	0,02	100,0	
34	Puskesmas Terakreditasi	unit	10	100	16	76,19	76,2	
35	Prosentase Rumah Tinggal bersanitasi	%	48	58	116.302	85,42	147,3	
36	Kampung SBS/ODF	%	27,08	65	46	31,90	84,9	
37	Cakupan sarana air bersih yang memenuhi syarat	%	79,23	87	82.800	60,8	69,9	
38	Persentase Kampung yang melaksanakan Posbindu	%	10,42	50	107	74,31	148,6	
39	Rasio Posyandu per satuan Balita	balita	15,77	<20	223	160,00	9,9	
4. KUALITAS PELAYANAN								
40	cakupan pelayanan rujukan bagi masyarakat miskin	%	90	100		100,00	100,0	
41	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa Pendidikan Dasar dan setingkat (Kelas 1 dan kelas 7)	%	90	100	2.418	68,80	68,8	
42	Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin	%	95	100	214.456	100,00	100,0	
43	Cakupan kampung/kel mengalami KLB dan bencana yang dilakukan penyelidikan epidemiolog dan penanganan <24 jam	%	100	100	-	100	100,0	
	Puskesmas mengembangkan Tanaman Obat Keluarga	Unit	0	18	15	15	83,3	
44	Persentase ketersediaan obat	%	95	>90	94	100,00	100,0	

Pada tabel diatas dapat dijelaskan hasil kinerja Kesehatan berdasarkan nilai target daerahyaitu:

- 1. Indikator yang mendapat penilaian kinerja sangat baik** adalah sebanyak 26 indikator atau 53,0%, turun dari 60,86 % pada tahun 2020.
- 2. Indikator yang mendapat penilaian Kinerja Tinggi** adalah sebanyak 11 indikator atau 22,4 % dari total indicator atau naik jika dibanding tahun 2020
- 3. Indikator yang mendapat penilaian sedang** adalah sebanyak 3 indikator atau 6,1 % dari total 49 indikator atau turun dibanding kondisi tahun 2020



4. **Indikator yang mendapat penilaian rendah** adalah sebanyak 5 indikator atau 10,2 % dari total 49 indikator atau naik dari kondisi tahun 2020
5. **Indikator yang mendapat penilaian sangat rendah** adalah sebanyak 4 indikator atau 8,1 % dari total 49 indikator dengan kondisi masih tetap jika dibandingkan tahun 2020

Jika dianalisis hasil kinerja Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2021 terhadap Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2019 yang memuat pelaksanaan SPM Kesehatan dengan target kinerja untuk seluruh indicator (12 Indikator) adalah 100 % maka satu indicator telah mencapai target yang ditetapkan yaitu Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dan pelayanan kesehatan ibu bersalin

Jika digambarkan dalam table maka dapat diperoleh hasil penerapan SPM Kesehatan DI Kabupaten Jayapura tahun 2020 yaitu :

Tabel 3.13
Capaian Kinerja SPM Tahun 2021

JENIS PELAYAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TAHUN 2021		
		Jumlah orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang dilayani	Capaian = (4) : (3) X 100%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	2.979	2.302	77,3 %
2. PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan fasilitas pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2.979	3.189	108,0 %
3. PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	2.971	3.101	104,4 %
4. PELAYANAN KESEHATAN BALITA	Jumlah Balita usia 12-59 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	13.281	7.807	59 %
5. PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3.366	2.418	68,8 %
6. PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	91.220	51.678	56,7 %
7. PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	Jumlah orang berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5.237	5.048	96,4 %



JENIS PELAYAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TAHUN 2021		
		Jumlah orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang dilayani	Capaian =(4) : (3)X100%
8. PELAYANAN PENDERITA HIPERTENSI	Jumlah penderita hipertensi usia >= 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.766	2.159	78,1 %
9. PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	Jumlah penderita diabetes mellitus usia >= 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.102	1.057	50,3%
10. PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN Jiwa BERAT	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	157	138	87,9 %
11. PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TB	Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.230	3.329	79,98%
12. PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	3.267	3.124	95,6 %

Analisis Permasalahan

Kendala dalam pelaksanaan SPM Kesehatan di Kabupaten Jayapura antara lain:

- 1) Secara umum, 12 SPM Kesehatan dilaksanakan kepada masyarakat walaupun belum mencapai 100 % untuk seluruh indikator, namun beberapa indikator mengalami peningkatan dari terget dengan kinerja tinggi dan sangat baik atau diatas 75,1 %
- 2) Pandemi Covid-19 di Kabupaten Jayapura menyebabkan kebijakan-kebijakan pembatasan aktivitas di masyarakat, juga mempengaruhi pelayanan yang dapat diberikan. Sebagaimana ditetapkan dalam berbagai pedoman pelayanan bahwa pelaksanaan janjitemu dan penggunaan media komunikasi menjadi strategi untuk pelayanan Kesehatan. Sehingga keterbatasan tersebut menyebabkan beberapa kinerja tidak tercapai seperti layanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar, dan pelayanan balita.



- 3) Pembatasan petugas Kesehatan, terutama yang beresiko, dalam bekerja di sarana Kesehatan. Hal ini terkait penanganan pandemic COvid-19 di Kabupaten Jayapura sehingga ketersediaan SDM Kesehatan terbatas dalam pelaksanaan layanan SPM.
- 4) Beberapa indikator SPM yang tidak mencapai target atau zona kuning dan merah yaitu pelayanan kesehatan balita, Pelayanan Kesehatan bagi penderita Diabetes Melitus sesuai standard, dan pelayanan Kesehatan pada usia produktif
- 5) Kemandirian Masyarakat masih kurang dalam membangun kesehatan diri dan keluarga dibuktikan juga dengan rasio posyandu per balita di masyarakat adalah 1:160 orang yang seharusnya 1:20 balita.
- 6) 76 % dari 144 Kampung/kelurahan di Kabupaten jayapura sudah memiliki sarana kesehatan sehingga masih ada 10-15 % kampung belum memiliki akses ke sarana kesehatan, dengan catatan bahwa tidak semua kampung harus memiliki sarana kesehatan karena jarak yang berdekatan dengan sarana kesehatan di kampung lainnya.
- 7) Dari 21 Puskesmas di Kabupaten jayapura, 18 Puskesmas yang sudah memiliki standard SDM Kesehatan sesuai permenkes 43 tahun 2019. Sedangkan 3 Puskesmas lainnya belum sesuai standard.
- 8) Keterbatasan logistik untuk pelayanan Diabetes Melitus oleh karena pembiayaan bahan habis pakai masih diprioritaskan pada pelaksanaan Penanganan Covid-19.
- 9) Pembiayaan SPM Kesehatan belum maksimal oleh karena DInas Kesehatan Kabupaten Jayapura mengelola anggaran yang didominasi sumber anggaran DAK dan OTSUS yang telah diatur menggunakan Petunjuk Teknis sehingga pelaksanaan kegiatan tidak bisa dilakukan dengan maksimal. Tahun 2021, postur anggaran DAK/OTSUS mencapai 73 % (Diluar Belanja Gaji PNS) walaupun ada peningkatan pada sumber anggaran DAU/DID/DBH oleh karena refocussing anggaran, namun petunjuk teknis penggunaan anggaran tersebut pada penanganan covid-19. Akibatnya juga pada manajemen pelaksanaan SPM Kesehatan.
- 10) Pengawasan secara berjenjang belum optimal oleh karena beban ganda pelaksanaan penanganan pandemic COvid-19.



Solusi

Dalam menghadapi kendala di atas beberapa solusi dapat diambil yaitu:

- 1) Kegiatan lebih banyak di danai oleh bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk puskesmas yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus. Pemanfaatan yang lebih efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.
- 2) Integrasi pelayanan yang belum mencapai target dengan Program PIS-PK
- 3) Penguatan sarana dan prasarana serta SDM Kesehatan
- 4) Pendekatan pembangunan kesehatan secara afirmasi agar kemandirian masyarakat bisa ditingkatkan.
- 5) Penguatan logistik Kesehatan, terutama dalam mendukung pelaksanaan SPM Kesehatan.
- 6) Melibatkan lintas sector di Distrik dan kampung dengan lebih kuat/solid agar Indikator SPM Kesehatan dapat ditunjang dengan kapasitas dan modal yang ada di kampung melalui dana ADK dan ADD.
- 7) Pengawasan yang berjenjang dalam pelaksanaan SPM Kesehatan di fasilitas kesehatan

Tindak Lanjut

Dalam mereduksi permasalahan dan memperkuat solusi yang diambil, maka tidak lanjut jangka pendek adalah perhitungan pembiayaan/costing SPM yang lebih efisien dan efektif dalam penetapan anggaran, penguatan pelaksanaan PIS-PK sebagai data dasar kesehatan dan melibatkan lintas sektor, membangun pengawasan yang lebih kuat dalam pelaksanaan layanan kesehatan di UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura.

Selain itu dengan adanya sensus penduduk 2021 maka jumlah penduduk sebagai target pelayanan kesehatan tidak lagi menjadi masalah dalam pelaksanaan manajemen penerapan SPM Kesehatan.

3.4. Capaian Kinerja terhadap RPJMD

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, terdapat Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci sebagai target pelayanan kesehatan. Pada tabel dibawah ini di gambarkan realisasinya yaitu :



Tabel 3.14
Kesesuaian Capaian Indikator revisi RPJMD dan Rensta Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUSI OPD	TARGET IKU (RPJMD)	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET SDG'S	TARGET RENSTRA DINAS KESEHATAN				REALISASI CAPAIAN TAHUN				RASIO CAPAIAN TAHUN				
						2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
	IKU																	
1	Indeks Kesehatan	73,2				71,78	72,2	72,5	73,1	71,78	72,2			100	100			
	IKK																	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT																	
1	Angka usia harapan hidup	68				66,9	67,3	67,7	67,9	66,66	66,93	67,05	67,6	100	99	100	100	
2	Presentase Stunting pada balita			15		23	20	17	16	0	16,67	16,37	9,03	0	100	100	100	
3	Presentasi Balita Gizi Kurang					<10	<10	<10	<10	1,73	7,64	9,21	6,8	100	100	100	100	
	Layanan Urusan Wajib Dasar																	
1	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan			100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup			<23		23	23	23	23	14,1	29,5	25,8	30,67	100	78	89	100	
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup			<30		30	30	30	30	15	33,2	27,4	33,93	50	90	100	100	
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup			<23		23	23	23	23	12,4	24,5	24,8	29,36	100	94	93	100	
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup			<235		23	240	235	230	119	167,8	24,8	195,8	100	100	100	100	
6	Persentase Distrik memiliki satu Puskesmas			100		100	100	100	100	100	100	24,8	100	100	100	25	100	
7	Rasio dokter per 100.000 Penduduk			20		28	26	24	20	9,3	16,7	24,8	58,5	100	100	100	34	
8	Rasio tenaga medis per satuan penduduk			347,39		4160	4162	4162	200	197,22	185,64	185,32	167,49	100	100	100	84	
9	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani			45		25	30	35	40	58,8	67,1	22,5	76,87	100	100	64	1000	
10	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan		100			88	91	93	96	91,1	95,1	96,3	108	100	100	100	113	
11	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)			95		85	85	85	90	89,58	84,03	83,33	81	100	99	98	90	
12	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan			100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak			97,5		95,5	96	96,5	97	101,2	101,61	97,55	112,5	100	100	100	100	
14	Cakupan balita pneumonia yang ditangani			90		50	60	70	80	164,6	90,7	134,9	33,48	100	100	100	42	
15	Cakupan orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100			100	100	100	100	100	96,67	100	79,98	100	97	100	80	
16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD			100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
17	Penderita diare yang ditangani			100		95	97	98	100	120,9	96,6	80,8	48,48	100	100	82,4	48	



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUSI OPD	TARGET IKU (RPJMD)	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET SDG'S	TARGET RENSTRA DINAS KESEHATAN				REALISASI CAPAIAN TAHUN				RASIO CAPAIAN TAHUN			
						2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
18	Angka kejadian Malaria			50		130	110	90	70	147,3	140,3	171,3	192,4	88	78	52,54	36
19	Cakupan orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		100			95	97	100	100	100	100	100	95,6	105	103	100,00	96
20	Cakupan kunjungan bayi		100			77	84	92	100	73,32	77,47	51,87	61,9	95	92	56,38	62
21	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4		100			55	60	63	100	57,7	68,9	68,8	77,27	105	114,8	109,21	77
22	Cakupan pelayanan nifas			90		65	70	75	80	99,5	90,7	91,7	106,8	100	100	100,00	100
23	Cakupan bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar			100		80	90	100	100	94,01	97,85	90,96	104,4	118	109	90,96	100
24	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani			60		56	57	58	59	41,1	36,3	51,8	45,8	73	64	89,31	78
25	Cakupan pelayanan balita		100			76	84	92	100	79,56	95,52	35,45	58,78	105	114	38,53	59
26	Cakupan anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		100			95	97	100	100	138,66	78,85	21,76	68,8	100	81	21,76	69
27	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)			100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100
28	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam			100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100
29	Cakupan orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		100			70	80	90	100	0	35,37	26,16	56,7	0	44,21	29,07	57
30	Cakupan orang berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		100			50	70	80	100	27,34	91,33	88,34	96,4	55	130,47	110,43	96
31	Cakupan penderita hipertensi usia >= 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100			80	90	95	100	80,8	160,8	73,6	78,1	101	100	77,47	78
32	Cakupan penderita diabetes mellitus usia >= 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100			80	90	95	100	24,7	102	56,4	50,3	31	100	59,37	50
33	Cakupan ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100			80	90	95	100	68,7	105,2	157,3	88	86	100	100,00	88

Dari Data diatas tergambar bahwa seluruh indikator pelayanan RPJMD 2017-2022 pada tahun 2021, baik indikator sasaaran, indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci dapat dilaksanakan di masa pandemi Covid-19, dengan hasil yang menunjukkan beberapa target belum tercapai.



Tabel 3.15
Analisis Kesesuaian Target dan Realisasi Tahun 2021 berdasarkan
Masukan DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2020

NO.	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	UPAYA PEMECAHAN MASALAH	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Menganalisis program kesehatan untuk menunjang capaian SPM kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat ➤ Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	19 Distrik	100 %	1 Seluruh SPM Kesehatan telah dilaksanakan tahun 2021 2 Surat Edaran pelaksanaan UKP dan UKM di masa pandemi Covid-19 Penguatan metode pelaksanaan layanan SPM di masa pandemi Covid-19 Refocussing anggaran yang proporsional antara penanganan covid-19 dan SPM Kesehatan	1 Mengintensifkan Posyandu sehingga Capaian Layanan Bayi dan Balita mengalami peningkatan 2 Memaksimalkan kader posyandu dalam tugas pelayanan
3	Penanganan Covid-19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat ➤ Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	19 Distrik	100 %	Refocussing Anggaran dan penetapan satu kegiatan baru dalam pelaksanaan penanganan covid-19	



NO.	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	UPAYA PEMECAHAN MASALAH	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
4	Meningkatkan Angka Harapan Hidup	<p>a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <p>c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman</p> <p>d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p>	21 Puskesmas	67,5 Tahun	<p>a. Menekan Angka Kematian Ibu</p> <p>b. Menekan Angka Kematian Bayi dan Balita</p> <p>c. Memperkuat layanan kesehatan sesuai standard bagi usia produktif</p> <p>d. Melaksanakan program posbindu dan poslansia</p>	1 Dinas Kesehatan lebih intens melaksanakan program dan kegiatan untuk meningkatkan angka kelangsungan hidup bayi setiap kelahiran
5	Menekan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita	<p>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>➤ Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p>	19 Distrik	<p>AKI 167,45 /100.000 KH</p> <p>AKB 2,34/ 1000 KH</p> <p>AKABA 2,34/ 1000 KH</p>	<p>a. Melaksanakan Layanan Rumah Tunggu Kelahiran</p> <p>b. Puskesmas non rawat inap mampu layanan rawat persalinan Menyediakan pembiayaan rujukan</p> <p>c. Menjalankan Review</p> <p>d. Maternal Perinatal Menyediakan sarpras dan alat kesehatan</p> <p>e. layanan KIA Memperkuat kapasitas bidan kampung</p> <p>f. Pemenuhan bidan di sarana kesehatan kampung</p> <p>g.</p>	



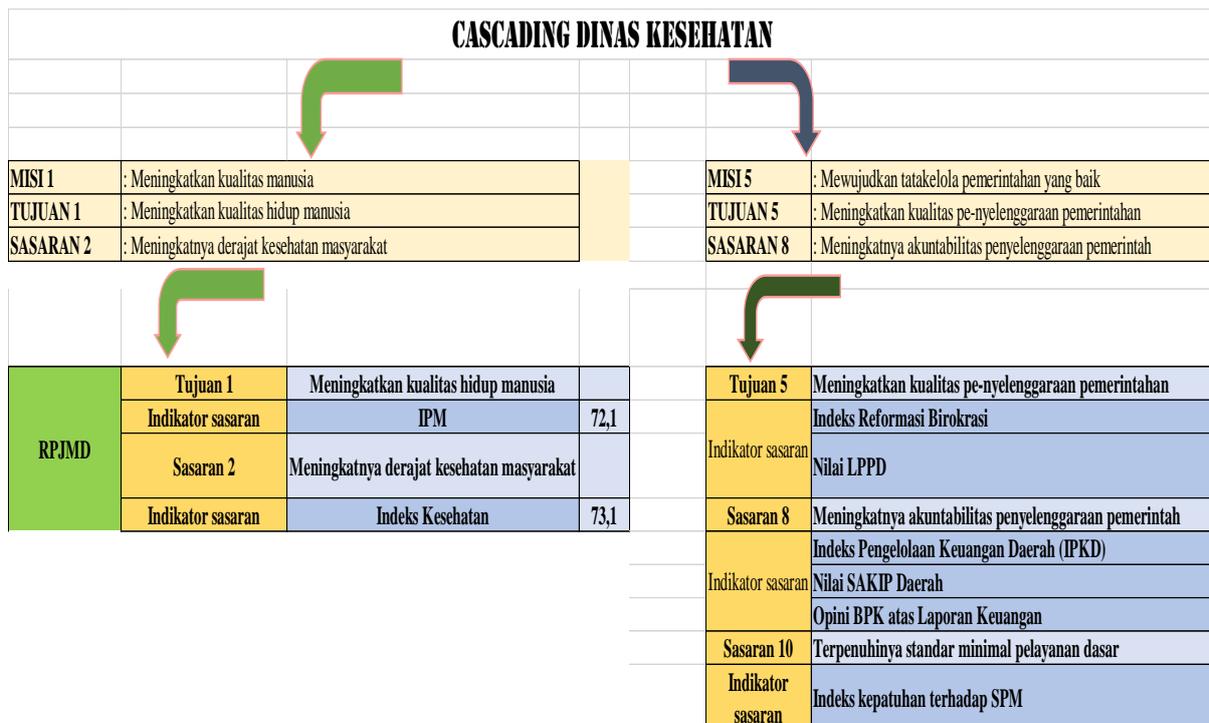
NO.	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	UPAYA PEMECAHAN MASALAH	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
6	Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat ➤ Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	19 distrik	20%	Melaksanakan 7 kegiatan penanggulangan Stunting baik dari sisi layanan, manajemen program serta koordinasi lintas sektor	
7	Penguatan Imunisasi Dasar Lengkap melalui Kampung UCI	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat ➤ Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	19 Distrik	81 %	1 Melaksanakan Posyandu 2 Sweeping Imunisasi pada daerah-daerah sulit 3 dijangkau Kunjungan Rumah untuk cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	1 posyandu sebagai pusat kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu, tersistem serta kontinyu atau berkesinambungan secara periodik
8	Eliminasi Malaria	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat ➤ Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	19 Distrik	API 177/1000 Penduduk	1 Memperluas Kampung Siaga malaria Pemberdayaan Kader 2 Kampung Penguatan pencegahan melalui Kelambu 3 Penguatan lintas sektor Penemuan kasus dan 4 Pelaksanaan pengobatan dengan 5 efektif	1 Memaksimalkan kader posyandu dalam tugas pelayanan



3.5 Cascading Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Dalam pelaksanaan Revisi RPJMD Kabupaten Jayapura 2017-2022, ditetapkan cascading kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dengan dua tujuandan 3 sasaran pembangunan sebagaimana dilihat pada gambar di bawah ini. Target yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja utama (IKU) adalah Indeks Kesehatan dengan target 73,1 di tahun 2021.

Gambar. 3.3
Cascading RPJMD 2017-2022 Sektor Kesehatan



Dalam melaksanakan kinerja sektor kesehatan tahun 2021 ditetapkan cascading kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2017-2022 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana digambarkan dibawah ini, dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2021.



Gambar. 3.4
Cascading Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2021

SASARAN 2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat						
	Tujuan 1	Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang merata		Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Anggaran	Target
	Sasaran 1	Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar sampai ke daerah terpencil dan masyarakat terasing	➔	Kegiatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP		
	Indikator	Prosentase Fasilitas Kesehatan di Kampung/Kebudayaan	75	Sub Kegiatan	Pembangunan Puskesmas	12.000.000.000	1 Unit
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	2.058.204.800	1 Unit
					Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	751.122.355	1 Unit
					Pengadaan Sarana Fasilitas Kesehatan	905.177.490	1 Paket
					Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Kesehatan	5.941.706.849	12 Unit
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	1.412.933.000	10 Set
					Relaksasi Kesehatan		
				Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
Renstra SKPD				Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP		
				Sub Kegiatan	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	1.366.648.201	1 dokumen
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	470.815.650	2 kampung
					Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		
	Sasaran 2	Tersedianya Fasilitas Layanan Kesehatan yang memadai merata dan terakreditasi	➔	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Anggaran	Target
	Indikator	Prosentase Puskesmas Terakreditasi	100	Kegiatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP		
				Sub Kegiatan	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.187.664.000	5 Puskesmas
	Sasaran 3	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan	➔	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Anggaran	Target
	Indikator	Ketersediaan Obat	>90	Kegiatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP		
				Sub Kegiatan	Pengadaan Obat dan Vaksin	3.329.660.059	1 paket
					Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.274.678.062	21 PKM
	Sasaran 4	Terlaksananya Pengembangan Obat Asli Kab. Jayapura	➔	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Anggaran	Target
	Indikator	Jumlah Puskesmas Mengembangkan TOGA	18	Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP		
				Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	34.885.000	1 dokumen
	Tujuan 2	Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas merata dan terjangkau		Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Anggaran	Target
	Sasaran 1	Terlaksananya upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	➔	Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP		
	Indikator	Puskesmas melaksanakan layanan Pencegahan Penyakit Menular	20	Sub Kegiatan	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	350.000.000	4230 orang
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	300.000.000	3267 orang
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.943.110.333	1 dokumen
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau berpotensi bencana	758.000.000	1 dokumen
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	200.700.000	1 dokumen
					Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Buruk Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	9.712.699.500	1 dokumen
					Operasional Pelayanan Puskesmas/ BOK Puskesmas		
	Sasaran 2	Terlaksananya upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit Tidak menular	➔	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Anggaran	Target
	Indikator	Puskesmas melaksanakan layanan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	20	Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP		
				Sub Kegiatan	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	135.800.000	91.220 orang
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		
	Sasaran 3	Terlaksananya Upaya Kesehatan bagi Ibu melahirkan	➔	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Anggaran	Target
	Indikator	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	230	Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP		
				Sub Kegiatan	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	961.392.530	2929 ibu
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	519.487.000	2929 ibu
					Operasional Pelayanan Puskesmas/ BOK Puskesmas	5.777.061.500	1 dokumen
	Sasaran 4	Terlaksananya Upaya Kesehatan bagi Bayi dan Balita	➔	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Anggaran	Target
	Indikator	Angka Kematian Bayi per 1000 KH	23	Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP		
				Sub Kegiatan	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	100.000.000	2971 bayi
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir		
	Sasaran 5	Terwujudnya perbaikan gizi masyarakat	➔	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Anggaran	Target
	Indikator	Prosentase Stunting	23	Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP		
				Sub Kegiatan	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	832.928.000	1 dokumen
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
	Sasaran 6	Terwujudnya Lingkungan yang sehat di Masyarakat	➔	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Anggaran	Target
	Indikator	Prosentase Kampung Stop Buang Air Besar Sembarangan	65	Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP		
				Sub Kegiatan	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	181.407.550	1 dokumen
					Operasional Pelayanan Puskesmas/ BOK Puskesmas	157.500.000	1 dokumen
	Sasaran 7	Terlaksananya Layanan Kesehatan Anak Sekolah, Remaja, dan Lanjut Usia	➔	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Anggaran	Target
	Indikator	Prosentase Anak Usia Pendidikan Dasar mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard	100	Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP		
				Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	50.000.000	1 dokumen
	Sasaran 8	Terlaksananya Upaya Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Kejiwaan	➔	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Anggaran	Target
	Indikator	Prosentase Penemuan dan penanganan Orang dengan Gangguan Kejiwaan	25	Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP		
				Sub Kegiatan	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	80.000.000	157 orang
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan jiwa berat		
	Tujuan 3	Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan Kesehatan					
	Sasaran 1	Terlaksananya promosi kesehatan sampai ke tingkat Kampung	➔	Program	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	Anggaran	Target
	Indikator	Rasio Posyandu per 100 balita	1,7	Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP		
				Sub Kegiatan	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	74.097.000	1 dokumen
					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
	Sasaran 2	Terwujudnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	➔	Program	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	Anggaran	Target
	Indikator	Prosentase Posyandu Aktif	100	Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP		
				Sub Kegiatan	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	2.529.714.000	1 dokumen
					Operasional Pelayanan Puskesmas/ BOK Puskesmas		
	Sasaran 3	Terwujudnya Deteksi Dini di semua masalah kesehatan dan tertanggulangnya KLB, wabah dan bencana	➔	Program	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	Anggaran	Target
	Indikator	Cakupan kampung/kel mengalami KLB dan bencana yang dilakukan penyelidikan epidemiologi dan penanganan <24 jam	100	Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP		
				Sub Kegiatan	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	49.850.000	1 dokumen
					Pelaksanaan Kewaspadaan dini dan respon wabah		
	Tujuan 4	Meningkatkan Pemerataan sumber daya Kesehatan					
	Sasaran 1	Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tersertifikasi	➔	Program	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Anggaran	Target
	Indikator	Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan	22	Kegiatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	6.586.400.000	1 dokumen
				Sub Kegiatan	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	24.701.805	1 dokumen
					Pembinaan dan Pengawasan SDM		
	Tujuan 5	Meningkatkan Pembiayaan Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Minimal					
	Sasaran 1	Terwujudnya jaminan kesehatan bagi masyarakat	➔	Program	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	Anggaran	Target
	Indikator	Prosentase Masyarakat dijamin oleh Jaminan Kesehatan	100	Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP		
				Sub Kegiatan	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	8.374.728.238	1 dokumen
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		



Renstra SKPD	SASARAN 8	: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah					
	Tujuan	Memenuhi kebutuhan penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan		Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran	Target
	Indikator	Nilai SAKIP OPD		Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.276.675	1 dokumen
				Program	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota		
				Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Integrasi		
				Sub Kegiatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	231.838.000	1 dokumen
	Sasaran	Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan urusan		Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran	Target
	Indikator	Rata-rata capaian kinerja PD		Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
		Rata-rata capaian SKP ASN		Sub Kegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	147.998.000	1 dokumen
	SASARAN 10	: Terpenuhinya standar minimal pelayanan dasar					
	Tujuan	Meningkatkan kualitas pemenuhan SPM					
Indikator	Indeks kepatuhan terhadap SPM	100	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran	Target	
Sasaran	Meningkatnya pemenuhan SPM pelayanan dasar kesehatan		Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator	Rata-rata capaian SPM urusan kesehatan	100	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	114.934.000	1 dokumen	
			Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.159.000	7 dokumen	



3.6 Pohon Kinerja

Pelaksanaan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten jayapura tahun 2021 tergambar dibawah ini melalui Pohon Kinerja.

Gambar. 3.5
Pohon Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2021





Pemerintah Kabupaten Jayapura

Sasaran 3	Terlaksananya Upaya Kesehatan bagi Ibu melahirkan			Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Target
Indikator	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	230	➔	Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	
				Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2929 ibu
				Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2929 ibu
				Sub Kegiatan	Operasional Pelayanan Puskesmas/ BOK Puskesmas	1 dokumen
Sasaran 4	Terlaksananya Upaya Kesehatan bagi Bayi dan Balita			Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Target
Indikator	Angka Kematian Bayi per 1000 KH	23	➔	Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	
				Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	2971 bayi
Sasaran 5	Terwujudnya perbaikan gizi masyarakat			Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Target
Indikator	Prevalensi Stunting	23	➔	Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	
				Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 dokumen
Sasaran 6	Terwujudnya Lingkungan yang sehat di Masyarakat			Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Target
Indikator	Prevalensi Kampung Stop Buang Air Besar Sembarangan	65	➔	Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	
				Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 dokumen
Sasaran 7	Terlaksananya Layanan Kesehatan Anak Sekolah, Remaja, dan Lanjut Usia			Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Target
Indikator	Prevalensi Anak Usia Pendidikan Dasar mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard	100	➔	Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	
				Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1 dokumen
Sasaran 8	Terlaksananya Upaya Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Kejiwaan			Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Target
Indikator	Prevalensi Penemuan dan penanganan Orang dengan Gangguan Kejiwaan	25	➔	Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	
				Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan jiwa berat	157 orang
Tujuan 3	Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan Kesehatan					
Sasaran 1	Terlaksananya promosi kesehatan sampai ke tingkat Kampung.			Program	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Target
Indikator	Rasio Posyandu per 100 halita	1,7	➔	Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	
				Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen
Sasaran 2	Terwujudnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)			Program	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Target
Indikator	Prevalensi Posyandu Aktif	100	➔	Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	
				Sub Kegiatan	Operasional Pelayanan Puskesmas/ BOK Puskesmas	1 dokumen
Sasaran 3	Terwujudnya Deteksi Dini di semua masalah kesehatan dan tertanggulangnya KLB, wabah dan bencana			Program	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Target
Indikator	Cakupan kampung/kecamatan mengalami KLB dan bencana yang dilakukan penyelidikan epidemiologi dan penanganan <24 jam	100	➔	Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	
				Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kewaspadaan dini dan respon wabah	1 dokumen
Tujuan 4	Meningkatkan Pemanfaatan sumber daya Kesehatan					
Sasaran 1	Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tersertifikasi			Program	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Target
Indikator	Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan	22	➔	Kegiatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
				Sub Kegiatan	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1 dokumen
				Sub Kegiatan	Pembinaan dan Pengawasan SDM	1 dokumen
Tujuan 5	Meningkatkan Pembiayaan Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Minimal					
Sasaran 1	Terwujudnya jaminan kesehatan bagi masyarakat.			Program	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Target
Indikator	Prevalensi Masyarakat dijamin oleh Jaminan Kesehatan	100	➔	Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	
				Sub Kegiatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dokumen



VISI	MSI 5	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	Tujuan 5	Meningkatkan kualitas pe-nyelenggaraan pemerintahan	Restra SKPD	SASARAN 8	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah													
	TUJUAN 5	Meningkatkan kualitas pe-nyelenggaraan pemerintahan	Indikator sasaran	Indeks Reformasi Birokrasi		Tujuan	Memenuhi kebutuhan penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan			Program	Program Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Target								
	SASARAN 8	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah		Nilai LPPD		Indikator	Nilai SAKIP OPD			Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Sasaran 8	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah						Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 dokumen						
			Indikator sasaran	Indeks Pengeloban Keuangan Daerah (IPKD)						Program	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota									
				Nilai SAKIP Daerah						Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Integrasi									
				Opini BPK atas Laporan Keuangan						Sub Kegiatan	Pengeloban Sistem Informasi Kesehatan			1 dokumen						
			Sasaran 10	Terperuhnya standar minimal pelayanan dasar																
			Indikator sasaran	Indeks kepatuhan terhadap SPM				Sasaran	Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan urusan		Program	Program Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Target							
								Indikator	Rata-rata capaian kinerja PD		Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
							Rata-rata capaian SKP ASN		Sub Kegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		1 dokumen								
						SASARAN 10	Terperuhnya standar minimal pelayanan dasar													
						Tujuan	Meningkatkan kualitas pemeban SPM													
						Indikator	Indeks kepatuhan terhadap SPM	100	Program	Program Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Target									
						Sasaran	Meningkatnya pemeban SPM pelayanan dasar kesehatan		Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
						Indikator	Rata-rata capaian SPM urusan kesehatan	100	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 dokumen								
									Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7 dokumen								

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan LAKIP Tahun 2021 berpedoman Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil evaluasi pelaksanaan sasaran kinerja beserta program dan kegiatan menunjukkan bahwa sasaran strategis Dinas Kesehatan Kab. Jayapura 5 program, dan 16 kegiatan dan 64 sub kegiatan pada tahun 2021, telah terlaksana seluruhnya. Berdasarkan capaian kinerja sasaran pada sekretariat dan bidang-bidang, maka rata-rata pencapaian kinerja realisasi fisik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2021 adalah 91.5% dan keuangan sebesar 89,14 %.

Pada evaluasi Kinerja terhadap indicator-indikator Kesehatan adalah :

1. **Indikator yang mendapat penilaian kinerja sangat baik** adalah sebanyak 26 indikator atau 53,0%, turun dari 60,86 % pada tahun 2020.
2. **Indikator yang mendapat penilaian Kinerja Tinggi** adalah sebanyak 11 indikator atau 22,4 % dari total indicator atau naik jika dibanding tahun 2020
3. **Indikator yang mendapat penilaian sedang** adalah sebanyak 3 indikator atau 6,1 % dari total 49 indikator atau turun dibanding kondisi tahun 2020
4. **Indikator yang mendapat penilaian rendah** adalah sebanyak 5 indikator atau 10,2 % dari total 49 indikator atau naik dari kondisi tahun 2020
5. **Indikator yang mendapat penilaian sangat rendah** adalah sebanyak 4 indikator atau 8,1 % dari total 49 indikator dengan kondisi masih tetap jika dibandingkan tahun 2020

Jika dianalisis hasil kinerja Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2021 terhadap Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2019 yang memuat pelaksanaan SPM Kesehatan dengan target kinerja untuk seluruh indicator (12 Indikator) adalah 100 %

maka satu indikator telah mencapai target yang ditetapkan yaitu Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dan pelayanan kesehatan ibu bersalin

Dari segi penerimaan pada tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mempunyai target penerimaan sebesar Rp 8.202.861.500 dengan realisasi sebesar Rp 7.361.125.300 atau capaian 89,73%. Realisasi Fisik dan Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Jayapura pada tahun 2020, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mendapat alokasi dana APBD sebesar **Rp** 141.326.307.310 dalam bentuk Belanja Gaji Pegawai sebesar Rp 60.690.415.912 dan Belanja Program Pelayanan Kesehatan sebesar Rp 80.635.891.398 yang terbagi atas belanja urusan penunjang pemerintahan sebesar Rp. 2.142.982.858 dan urusan wajib pelayanan dasar sebesar Rp. 78.492.908.540 (Sumber data: DPA Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 2021). Anggaran tersebut naik signifikan dari tahun 2020 oleh karena penambahan anggaran DAK dan kebijakan refocusing Anggaran DAU dalam membiayai penanganan Covid-19..

Anggaran untuk membiayai program wajib Pelayanan Dasar sesuai RPJMD Kabupaten Jayapura 2017-2022 adalah Rp 58.592.626.721 atau alokasi anggaran tahun 2021 sebesar 133,96 % dari ketetapan RPJMD untuk tahun 2021. Dengan realisasi keuangan belanja sebesar Rp 125.975.339.861,-atau89,14 %

Dari capaian kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2021 telah menunjukkan hasil yang baik dengan dicapainya kinerja yang baik dari sasaran-sasaran dan indikator-indikator yang ada. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat capaian kinerja yang harus ditingkatkan pada tahun kedepan.

Hal-hal yang harus lebih lagi ditingkatkan dan perlu mendapat perhatian adalah:

1. Kegiatan lebih banyak di danai oleh bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk puskesmas yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus. Pemanfaatan yang lebih efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.
2. Integrasi pelayanan yang belum mencapai target dengan Program PIS-PK
3. Penguatan sarana dan prasarana serta SDM Kesehatan
4. Pendekatan pembangunan kesehatan secara afirmasi agar kemandirian masyarakat bisa ditingkatkan.



5. Penguatan logistik Kesehatan, terutama dalam mendukung pelaksanaan SPM Kesehatan.
6. Melibatkan lintas sector di Distrik dan kampung dengan lebih kuat/solid agar Indikator SPM Kesehatan dapat ditunjang dengan kapasitas dan modal yang ada di kampung melalui dana ADK dan ADD.
7. Pengawasan yang berjenjang dalam pelaksanaan SPM Kesehatan di fasilitas kesehatan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA**

2019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **KHAIRUL LIE, SKM, M.Kes**

Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
JAYAPURA**

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

N a m a : **MATHIUS AWOITAUW,SE,M.Si**

Jabatan : **BUPATI JAYAPURA**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Januari 2020

PIHAK KEDUA
BUPATI JAYAPURA

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA

MATHIUS AWOITAUW,SE,M.Si

KHAIRUL LIE, SKM, M.Kes



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS KESEHATAN**

Jln. Raya Sentani Depapre No.1, Kompleks Kantor Bupati, Sentani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **dr. YOHANA KAUT , M.Kes**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN
JAYAPURA**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **KHAIRUL LIE, SKM, M.Kes**
Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
JAYAPURA**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Februari 2020

**PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN**

**PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA**

KHAIRUL LIE, SKM, M.Kes

dr. YOHANA KAUT , M.Kes



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS KESEHATAN**

Jln. Raya Sentani Depapre No.1, Kompleks Kantor Bupati, Sentani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **EDWARD SIHOTANG, S.Si, Apt**
Jabatan : **KEPALA SUBAG UMUM PROGRAM DAN
INFORMASI**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **dr. YOHANA KAUT , M.Kes**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN
JAYAPURA**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Februari 2020

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA

PIHAK PERTAMA
KASUBAG UMUM PROGAM
DAN INFORMASI

dr. YOHANA KAUT , M.Kes

EDWARD SIHOTANG, S.Si, Apt



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS KESEHATAN**

Jln. Raya Sentani Depapre No.1, Kompleks Kantor Bupati, Sentani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **ISAK OFIDE, S.IP**
Jabatan : **KEPALA SUBAG HUKUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **EDWARD MANIK SIHOTANG, S,SI, Apt**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Februari 2020

**PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA**

**PIHAK PERTAMA
KASUBAG HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**

EDWARD MANIK SIHOTANG, S.SI, APT

ISAK OFIDE, S.IP



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS KESEHATAN**

Jln. Raya Sentani Depapre No.1, Kompleks Kantor Bupati, Sentani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **MARIA AMAN**
Jabatan : **KEPALA SUBAG KEUANGAN DAN BMN**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **EDWARD MANIK S, S.SI, APT**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN
JAYAPURA**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Februari 2020

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA

PIHAK PERTAMA
KASUBAG KEUANGAN
DAN BMN

EDWARD MANIK S, S.SI, APT

MARIA AMAN



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS KESEHATAN**

Jln. Raya Sentani Depapre No.1, Kompleks Kantor Bupati, Sentani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **MARIA C.GRIAPON, SKM, M.Kes**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN
RUJUKAN, FASYANKES DAN PENINGKATAN MUTU**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **dr. YOHANA KAUT, M.KES**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Februari 2020

**PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG
PELAYANAN KESEHATAN**

**PIHAK PERTAMA
KASIE PEL.KESEHATAN RUJUKAN
FASYANKES DAN PENINGKATAN MUTU**

dr. YOHANA KAUT, M.KES

MARIA C.GRIAPON, SKM, M.Kes



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS KESEHATAN**

Jln. Raya Sentani Depapre No.1, Kompleks Kantor Bupati, Sentani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **YOKOBA A BAGRE, SE**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN
PRIMER DAN TRADISIONAL**

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

N a m a : **dr. YOHANA KAUT.,M.KES**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Februari 2020

**PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG
PELAYANAN KESEHATAN**

**PIHAK PERTAMA
KASIE PELAYANAN KESEHATAN
PRIMER DAN RUJUKAN**

dr. YOHANA KAUT, M.Kes

YAKOBA A BAGRE, SE



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS KESEHATAN**

Jln. Raya Sentani Depapre No.1, Kompleks Kantor Bupati, Sentani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **ANA RATIH AYU, SKM**
Jabatan : **KEPALA SEKSI ALAT KESEHATAN DAN SDM
KESEHATAN**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **dr. FARID YUSUF, MPH**
Jabatan : **KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Februari 2020

**PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG
SDM KESEHATAN**

**PIHAK PERTAMA
KASIE ALAT KESEHATAN
DAN SDM KESEHATAN**

dr. FARID YUSUF, MPH

ANA RATIH AYU, SKM



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS KESEHATAN**

Jln. Raya Sentani Depapre No.1, Kompleks Kantor Bupati, Sentani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **MARTHA LM TAMBUNAN , S.Si,Apt**

Jabatan : **KEPALA SEKSI KEFARMASIAN**

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

N a m a : **dr. FARID YUSUF, MPH**

Jabatan : **KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Februari 2020

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG
SDM KESEHATAN

PIHAK PERTAMA
KASIE KEFARMASIAN

dr. FARID YUSUF, MPH

MARTHA LM TAMBUNAN , S.Si,Apt



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS KESEHATAN**

Jln. Raya Sentani Depapre No.1, Kompleks Kantor Bupati, Sentani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : YENI FITRI , S.Si,Apt

Jabatan : KEPALA UPTD IFK

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

N a m a : KHAIRUL LIE, SKM.,M.KES

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Februari 2020

**PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN**

**PIHAK PERTAMA
KA. UPTD IFK**

KHAIRUL LIE,SKM.,M.KES

YENI FITRI , S.Si,Apt



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS KESEHATAN**

Jln. Raya Sentani Depapre No.1, Kompleks Kantor Bupati, Sentani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **YOSAFAT SATO, SKM**
Jabatan : **KEPALA UPTD PSC 119 HASALE HOKHOSOBO**

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

N a m a : **KHAIRUL LIE, SKM.,M.KES**
Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Februari 2020

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN

PIHAK PERTAMA
KA.UPTD PSC 119

KHAIRUL LIE, SKM.M.KES

YOSAFAT SATO, SKM



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS KESEHATAN**

Jln. Raya Sentani Depapre No.1, Kompleks Kantor Bupati, Sentani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : WA JUHRIA, SKM
**Jabatan : KEPALA SEKSI PENCEGAHAN, PENGENDALIAN
PENYAKIT MENULAR,SURVAELENS, IMUNISASI**

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

N a m a : PUNGUT SUNARTO, SKM
**Jabatan : KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Februari 2020

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT

PIHAK PERTAMA
KASIE PENCEGAHAN, PENGENDALIAN
PENY. MENULAR ,SURVAELENS,IMUNISASI

PUNGUT SUNARTO, SKM

WA JUHRIA, SKM



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS KESEHATAN**

Jln. Raya Sentani Depapre No.1, Kompleks Kantor Bupati, Sentani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **ROSSARIO AKIHARI, S.Kep.Ns**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PENCEGAHAN, PENGENDALIAN
PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESWA**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **PUNGUT SUNARTO, SKM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Februari 2020

PIHAK KEDUA
**KEPALA BIDANG PENCEGAHAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT**

PIHAK PERTAMA
**KASIE PENCEGAHAN, PENGENDALIAN
PENY. TIDAK MENULAR DAN KESWA**

PUNGUT SUNARTO, SKM

ROSSARIO AKIHARI, S.Kep..Ns



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS KESEHATAN**

Jln. Raya Sentani Depapre No.1, Kompleks Kantor Bupati, Sentani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **WASIK SOMAPARWIRO, SKM**
Jabatan : **KA. SEKSI PROMKES, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KESLING, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA**

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

N a m a : **DELILA MEHUE, S.ST, M.KES**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Februari 2020

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG
KESEHATAN MASYARAKAT

PIHAK PERTAMA
KASIE PROMKES, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KESLING, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA

DELILA MEHUE, S.ST, M.KES

WASIK SOMAPARWIRO, SKM



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS KESEHATAN**

Jln. Raya Sentani Depapre No.1, Kompleks Kantor Bupati, Sentani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **THOMAS MEBRI, SKM**

Jabatan : **KA. SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **DELILA MEHUE, S.ST, M.KES**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Februari 2020

**PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG
KESEHATAN MASYARAKAT**

**PIHAK PERTAMA
KASIE KESEHATAN KELUARGA
DAN GIZI**

DELILA MEHUE, S.ST, M.KES

THOMAS MEBRI, SKM



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS KESEHATAN**

Jln. Raya Sentani Depapre No.1, Kompleks Kantor Bupati, Sentani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **PUNGUT SUNARTO, SKM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **KHAIRUL LIE, SKM, M.Kes**
Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
JAYAPURA**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Februari 2020

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN

PIHAK PERTAMA
**KEPALA BIDANG PENCEGAHAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT**

KHAIRUL LIE, SKM, M.Kes

PUNGUT SUNARTO, SKM



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS KESEHATAN**

Jln. Raya Sentani Depapre No.1, Kompleks Kantor Bupati, Sentani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **dr. YOHANA KAUT., M.KES**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **KHAIRUL LIE, SKM, M.Kes**
Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
JAYAPURA**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Februari 2020

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN

PIHAK PERTAMA
**KEPALA BIDANG PELAYANAN
KESEHATAN**

KHAIRUL LIE, SKM, M.Kes

dr. YOHANA KAUT., M.Kes



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS KESEHATAN**

Jln. Raya Sentani Depapre No.1, Kompleks Kantor Bupati, Sentani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **dr.FARID YUSUF, MPH**
Jabatan : **KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **KHAIRUL LIE, SKM, M.Kes**
Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
JAYAPURA**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Februari 2020

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN

PIHAK PERTAMA
**KEPALA BIDANG SUMBER DAYA
KESEHATAN**

KHAIRUL LIE, SKM, M.Kes

dr. FARID YUSUF, MPH



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS KESEHATAN**

Jln. Raya Sentani Depapre No.1, Kompleks Kantor Bupati, Sentani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **DELILA MEHUE S.ST, M.KES**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **KHAIRUL LIE, SKM, M.Kes**
Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
JAYAPURA**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Februari 2020

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN

PIHAK PERTAMA
**KEPALA BIDANG KESEHATAN
MASYARAKAT**

KHAIRUL LIE, SKM, M.Kes

DELILA MEHUE, S.ST, M.KES

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2020

Sasaran RPJMD : Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
 Indikator Sasaran RPJMD : Angka harapan Hidup
 Target Kinerja Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2020 : 67.7 tahun

INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RENSTRA (2017)	TARGET CAPAIAN TAHUN 2020	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)
1. KUALITAS KESEHATAN			
Angka Usia Harapan Hidup		67.7	68
Prosentase Balita KURANG Gizl	1.24	<10	<10
Prosentase balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100
Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	22.7	<23	<23
Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup	21.1	<23	<23
Angka Kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	188.8	<235	<220
Angka Kematian Balita per 1000 Balita	24.92	<30	<30
Prosentase Ibu Hamil mendapat layanan ibu hamil (Prosentase Kunjungan K4)	47.3	63	70
Porsentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (Prosentase Pertolongan Persalinan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan)	85	93	100
Prosentase Komplikasi kebidanan yang ditangani	20.8	35	45
Prosentase pelayanan nifas	61	75	90
Prosentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (Prosentase Kunjungan Neonatus Lengkap)	71	85	95
Prosentase Kunjungan Bayi	70	92	100
Prosentase Kunjungan Balita yang mendapatkan layanan kesehatan balita sesuai standard (Prosentase pelayanan balita)	68	92	100
Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Tekanan Darah Tinggi/Hipertensi sesuai standard	2.25	<16.8	<16.8
Prosentase Penemuan dan penanganan Kasus Orang dengan Gangguan Kejiwaan	5	20	30
Prosentase penemuan dan penanganan kasus Diabetes Melitus Sesuai Standard	0	15	25
Prosentase orang beresiko HIV mendapat pemeriksaan HIV sesuai standard (Prevalensi HIV)	2.18	<2.3	<2.3
Cakupan Kampung UCI	81.94%	85%	95%
Prosentase Anak usia 1 tahun yang dimunisasi Campak	95%	96.50%	97.50%
Non Polio AFP rate per 100.000 pddk<15 tahun	<1	<1	<1
Prosentase Balita pneumonia yang ditangani	40	70	90
Tingkat kematian karena TBC per 100.000 pddk	23.9	16	10
Prosentase Orang TB mendapatkan Layanan Pelayanan TB Sesuai Standard (Prosentase Penemuan dan penanganan penderita TBC)	140.00	100	100
Prosentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100
Prosentase Penderita diare yang ditangani	95	98	100
Angka Insidens Malaria (API) per 1000 Penduduk	171	90	50
Tingkat Kematian akibat malaria		0.6	0.4
Prosenstase Usia 15-59 tahun mendapat screening kesehatan Sesuai Standard	0	40	50

INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RENSTRA (2017)	TARGET CAPAIAN TAHUN 2020	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)
Prosentase Usia Lansia mendapat screening kesehatan Sesuai Standard	0	40	50
2. KUANTITAS/KUALITAS TENAGA MEDIS		30	
Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan	2	20	22
3. KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA			
Rasio sarana kesehatan per 1000 pddk	0.82	0.87	1
Rasio Rumah sakit per 1000 pddk		0.01	0.01
Prosentase Puskesmas Terakreditasi	10	80	100
Prosentase Rumah Tinggal bersanitasi	48	56	60
Kampung SBS/ODF	27.08	57	70
Prosentase sarana air bersih yang memenuhi syarat	79.23	85	90
Prosentase Kampung yang melaksanakan Posbindu	10.42	40	60
Rasio Posyandu per satuan Balita	15.77	<20	<20
4. KUALITAS PELAYANAN			
Prosentase pelayanan rujukan bagi masyarakat miskin	90	100	100
Prosentase Anak Usia Pendidikan Dasar mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard (Prosentase penjangkauan kesehatan siswa Pendidikan Dasar dan setingkat)	90	100	100
Prosentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin	95	100	100
Prosentase kampung/kel mengalami KLB dan bencana yang dilakukan penyelidikan epidemiolog dan penanganani <24 jam	100	100	100
Jumlah Puskesmas mengembangkan Tanaman Obat Keluarga	0	15	20
Prosentase ketersediaan obat	95	>90	>90

ADALAH INDIKATOR SPM KESEHATAN

PIHAK KEDUA,
BUPATI JAYAPURA

SENTANI, Januari 2020
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA,

MATHIUS, AWOITAUW, SE.,M.SI

KHAIRUL LIE, SKM.M.KES

INDIKATOR KINERJA 2020

NO	SASARAN STRATEGIS ESELON II	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
					2020	RENCANA AKSI TARGET PER TW			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Meningkatnya ketersediaan obat dan BHP	Meningkatnya ketersediaan obat dan BHP	Jumlah Fasyankes yang mendapat distribusi obat dari IFK	kali	4	1	1	1	1
			Jumlah laporan Wajib terdokumentasi (E-Logistik)	%	100	0	100	100	100

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA,

KHAIRUL LIE, SKM.MKES

SENTANI, 14 Februari 2020
PIHAK PERTAMA,
KA. UPTD IFK

YENI FITRI, S.SI, APT

INDIKATOR KINERJA 2020

NO	SASARAN STRATEGIS ESELON II	SASARAN PROGRAM ESELON III (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
					2020	RENCANA AKSI TARGET PER TW			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	terselenggaranya STBM di kampung	Terlaksana pelayanan kesehatan dasar melalui kesehatan lingkungan	Jumlah Kampung dilaksanakan program KAMPUNG SBS	kampung	15	0	5	10	0
	Terlaksananya Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi	Terlaksana Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Rumah tunggu yang aktif	rumah tunggu	5	5	0	0	0
			Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan MTBS	Puskesmas	18	10	8	0	0
			Jumlah Puskesmas melaksanakan ANC berkualitas	Puskesmas	20	20	20	20	20
	Terlaksananya promosi kesehatan sampai ke tingkat Kampung.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat melalui Promosi Kesehatan	Puskesmas melaksanakan Promosi Kesehatan	%	100	100	100	100	100
	Terwujudnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat melalui Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Badan Peduli Kesehatan yang dibentuk	distrik	2	0	1	1	0
	Terwujudnya perbaikan gizi masyarakat	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Jumlah Puskesmas melaksanakan Progas	Puskesmas	1	0	1	0	0
	Terlaksananya pengembangan upaya kesehatan lingkungan	Terlaksana Perlindungan terhadap Sumber Air dan Tempat pengolahan makanan	Jumlah sampel dari Sarana baik Sumber Air, Tempat Pengolahan Makanan dan Tempat-Tempat Umum yang diperiksa	sampel	60	10	30	20	0
	Terlaksananya Perlindungan Masyarakat melalui K3	Terlaksana Layanan K3 di distrik	Jumlah Puskesmas melaksanakan Layanan K3	Puskesmas	18	18	18	18	18

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA

KHAIRUL LIE, SKM.MKES

SENTANI, 14 Februari 2020
PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG KESEHATAN
MASYARAKAT

DELILA MEHUE, SST, S.MKES

INDIKATOR KINERJA 2020

NO	SASARAN STRATEGIS ESELON II	SASARAN PROGRAM ESELON III (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
					2020	RENCANA AKSI TARGET PER TW			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Terlaksananya upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Penyakit IMS dan HIV/AIDS	Jumlah Kasus HIV/AIDS yang tertangani	%	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penanggulangan DBD	Jumlah Daerah Fokus Fogging	fokus	25	10	10	5	0
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Imunisasi	Pelayanan Bulan Imunisasi Anak Sekolah oleh Puskesmas	Distrik	20	0	0	20	0
			Prosentase Kampung UCI	%	85	20	20	40	5
		Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Penanggulangan TB dan Kusta	Prosentase Penderita TBC dan Kusta Diobati	%	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Pneumonia pada Anak	Jumlah Suspek	suspek	1.052	200	400	352	100
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Peanggulangan Malaria	Annual Paracyte incidence (API)	/1000 pddk	97	97	97	97	97
		Meningkatnya Surveilans Penyakit Untuk pencegahan wabah	Prosentase pelaksanaan Surveilans Penyakit oleh Puskesmas	%	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pelayanan kesehatan Filaria	Terlaksana TASK III di Puskesmas	Puskesmas	20	0	0	15	5
	Terlaksananya Layanan Kesehatan Lansia, Remaja, dan penyakit tidak menular	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Tidak Menular	Jumlah Posbindu yang aktif	Unit	43	20	10	10	3

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA

KHAIRUL LIE, SKM.MKES

SENTANI, 14 Februari 2020
PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT,

PUNGUT SUNARTO, SKM

INDIKATOR KINERJA 2020

NO	SASARAN STRATEGIS ESELON II	SASARAN PROGRAM ESELON III (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
					2020	RENCANA AKSI TARGET PER TW			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Tersedianya Alat Kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan	Meningkatnya ketersediaan obat dan BHP dan Alat Kesehatan	Ketersediaan obat	%	90	30	20	20	20
	Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	Meningkatnya pelayanan Kesehatan melalui ketersediaan SDM Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang dikontrak pemerintah	orang	135	135	0	0	0
			Terlaksana pelaporan rutin online SDM Kesehatan	bulan	12	3	3	3	3
		Meningkatnya Kapasitas SDM Kesehatan	Terlaksananya peningkatan kapasitas Aparatur	orang	38	0	0	38	0
	Terakreditasi sarana dan petugas kesehatan	Tersedia Petugas Kesehatan terakreditasi	Prosentase petugas kesehatan yang teregistrasi	%	100	100	100	100	100

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA,

KHAIRUL LIE, SKM.MKES

SENTANI, 14 Februari 2020
PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA
KESEHATAN

dr. FARID YUSUF, MPH

INDIKATOR KINERJA 2020

NO	SASARAN STRATEGIS ESELON II	SASARAN PROGRAM ESELON III (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
					2020	RENCANA AKSI TARGET PER TW			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat.	Meningkatnya Upaya Jaminan Kesehatan daerah	Prosentase jaminan kesehatan daerah untuk layanan rujukan dan rawat inap di puskesmas	%	100	30	30	30	10
	Tercapainya standar pembiayaan kesehatan sesuai ketentuan undang-undang.	Meningkatnya Ketersediaan Puskesmas yang terakreditasi	Jumlah Puskesmas yang didampingi dan terakreditasi	Puskesmas	3	0	0	0	3
	Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar sampai ke daerah terpencil dan daerah sulit	Meningkatnya Upaya Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan bagi Kampung yang sangat sulit dijangkau	kampung	2	1	1	0	0
			Prosentase Puskesmas melaksanakan layanan kesehatan bersumber dari BPJS	puskesmas	100	100	100	100	100
			Prosentase Puskesmas melaksanakan Layanan kesehatan preventif dan promotif	puskesmas	100	100	100	100	100
			Jumlah Puskesmas melaksanakan TOGA	Puskesmas	13	10	3	0	0
	Tersedianya Fasilitas Layanan Kesehatan yang memadai dan merata	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas ditingkatkan sarana dan prasarananya	puskesmas	6	0	3	2	1
			Jumlah Pustu ditingkatkan sarana dan Prasarana	pustu	4	0	0	0	4

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA

KHAIRUL LIE, SKM.MKES

SENTANI, 14 Februari 2020
PIHAK PERTAMA,
Pit. KEPALA BIDANG PELAYANAN
KESEHATAN

MARIA GRIAPON, SKM.,M.KES

INDIKATOR KINERJA 2020

NO	SASARAN STRATEGIS ESELON III	SASARAN KEGIATAN ESELON IV (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
					2020	RENCANA AKSI TARGET PER TW			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Penyakit IMS dan HIV/AIDS	Terlaksana Pencegahan dan penanggulangan Penyakit IMS, HIV dan AIDS di Puskesmas	Pertemuan Evaluasi Program untuk 20 Puskesmas	kali	1	0	0	1	0
			Penguatan program melalui Validasi Data, LKB SUFA, KDS dan Aplikasi SIHA	kali	4	0	2	1	1
			Jumlah pertemuan rutin LBPHA	kali	12	3	3	3	3
			Jumlah Petugas Magang Program HIV	orang	15	0	15	0	0
			Jumlah Petugas mendapat peningkatan Kapasitas	orang	25	0	25	0	0
			Prosentase administasi KPA beroperasi baik	%	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penanggulangan DBD	Terlaksana Fogging pencegahan DBD	Jumlah Fokus Fogging	fokus	25	5	10	10	0
	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Imunisasi	Terlaksana Layanan BIAS di Sekolah	Jumlah Sekolah dilakukan BIAS	Sekolah	207	0	0	207	0
		Terlaksana Pekan Imunisasi MR	Jumlah Puskesmas melaksanakan Imunisasi MR	Puskesmas	20	0	0	20	0
	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Penanggulangan TB dan Kusta	Terlaksana Pelayanan TBC dan Kusta di Puskesmas	Jumlah petugas mendapatkan peningkatan kapasitas (SITT)	orang	21	0	2	1	0
			terlaksana Sosialisasi (KPD) bagi kader	orang	50	0	50	0	0
			terlaksana evaluasi program dan OJT puskesmas	kali	3	0	1	0	2
	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Pneumonia pada Anak		Terlaksana Monev ISPA	kali	1	0	0	0	1

	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Peanggunan Malaria		Penguatan program malaria di puskesmas (Pertemuan rutin baik internal dan dengan swasta)	kali	4	1	1	1	1
			Terlaksana peningkatan kapasitas petugas	orang	14	0	14	0	0
			Jumlah Kampung Siaga Malaria	Kampung	30	0	0	30	0
			Terlaksana MBS di distrik	Distrik	1	0	1	0	0
	Meningkatnya Surveilans Penyakit Untuk pencegahan wabah		terlaksana investigasi dan penanggulangan KLB	lokasi	9	2	2	3	2
	Meningkatnya Pelayanan kesehatan Filaria		Tersedia Pembiayaan TASK III di Puskesmas	Puskesmas	20	0	0	15	5

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT,

PUNGUT SUNARTO, SKM

SENTANI, 14 Februari 2020

PIHAK PERTAMA,

KEPALA SEKSI P2M, SURVEILANS
DAN IMUNISASI

WA JUHRIA, SKM

INDIKATOR KINERJA 2020

NO	SASARAN STRATEGIS ESELON II	SASARAN KEGIATAN ESELON IV (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
					2020	RENCANA AKSI TARGET PER TW			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Meningkatnya ketersediaan obat dan BHP	Meningkatnya ketersediaan obat dan BHP	Jumlah Jenis Obat dan BHP yang tersedia	jenis	146	20	56	39	31
			Jumlah penyediaan prasarana IFK	unit	10	10	0	0	0
			Jumlah Laporan Perencanaan terdokumentasi (E-Desk, SIPNAP)	%	100	100	100	100	100

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA
KESEHATAN

dr. FARID YUSUF, MPH

SENTANI, 14 Februari 2020
PIHAK PERTAMA,

KASIE KEFARMASIAN

MARTHA TAMBUNAN, S.SI, APT

INDIKATOR KINERJA 2020

NO	SASARAN STRATEGIS ESELON III	SASARAN KEGIATAN ESELON IV (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
					2020	RENCANA AKSI TARGET PER TW			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Terlaksana Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Meningkatnya layanan kesehatan ibu di Puskesmas	Tersedia Pembiayaan bagi 5 Rumah Tunggu Kelahiran	bulan	12	3	3	3	3
			Terlaksana pertemuan RMP	kali	4	1	1	1	1
			Terlaksana peningkatan kapasitas bidan kamping	orang	18	0	18	0	0
			Jumlah Bidan yang mendapatkan penguatan kapasitas	orang	28	0	28	0	0
			Tersedia Klaim Jampersal	Klaim	1980	300	600	600	480
	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat		Terlaksana Program Progras untuk anak sekolah	orang	300	0	300	0	0
			Terlaksana pemantauan layanan Ibu hamil KEK	puskesmas	18	0	10	8	0

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG KESEHATAN
MASYARAKAT

DELILA MEHUE, S.ST, M.KES

SENTANI, 14 Februari 2020
PIHAK PERTAMA,
KASIE KESEHATAN KELUARGA
DAN GIZI

THOMAS MEBRI, SKM

INDIKATOR KINERJA 2020

NO	SASARAN STRATEGIS ESELON III	SASARAN KEGIATAN ESELON IV (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
					2020	RENCANA AKSI TARGET PER TW			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Terlaksana pelayanan kesehatan dasar melalui kesehatan lingkungan	Meningkatnya Jumlah Kampung yang dipicu dan terverifikasi SBS	Jumlah Kampung mendapat pemicuan SBS	kampung	15	0	5	10	0
			Jumlah kampung dilakukan Verifikasi Program Kampung SBS	Kampung	30	0	0	10	20
	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat melalui Promosi Kesehatan	Meningkatnya layanan Promosi Kesehatan di Puskesmas	Jumlah Media Promkes diadakan	%	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat melalui Organisasi Kemasyarakatan	Terbentuknya Badan Penyantun Puskesmas	Jumlah Pertemuan pembentukan BPK di 2 distrik	kali	0	0	2	1	0
	Terlaksana Perlindungan terhadap Sumber Air dan Tempat pengolahan makanan	Meningkatnya pengkajian dan perlindungan lingkungan sehat	Tersedia Pembiayaan pengambilan dan pemeriksaan sampel Air dan TT pengoilahan makanan	sampel	60	10	30	20	0
	Terlaksana Layanan K3 di distrik	Meningkatnya Perlindungan masyarakat melalui K3	Pertemuan penguatan program K3	kali	2	0	1	0	1

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG KESEHATAN
MASYARAKAT

DELILA MEHUE, S.ST, M.KES

SENTANI, 14 Februari 2020
PIHAK PERTAMA,
KASIE PROMKES, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DAN KESJAOR

WASIK SOMAPARWIRO, SKM

INDIKATOR KINERJA 2020

NO	SASARAN STRATEGIS ESELON III	SASARAN KEGIATAN ESELON IV (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
					2020	RENCANA AKSI TARGET PER TW			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Tidak Menular	Terlaksana Pembentukan Posbindu dan layanan bagi ODGJ	terlaksana Penguatan Posbindu di kampung	lokasi	6	0	0	0	6
			terlaksana Penjaringan Orang dengan Gangguan Jiwa di Puskesmas	puskesmas	17	0	7	10	0
			terlaksana OJT layanan PTM di Puskesmas	puskesmas	18	0	9	9	0

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT,

PUNGUT SUNARTO, SKM

SENTANI, 14 Februari 2020
PIHAK PERTAMA,

KASIE P2TM DAN KESEHATAN
JIWA

ROSSARIO AKIHARI, S.KEP.,NERS

INDIKATOR KINERJA 2020

NO	SASARAN STRATEGIS ESELON III	SASARAN KEGIATAN ESELON IV (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
					2020	RENCANA AKSI TARGET PER TW			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	Meningkatnya pelayanan Kesehatan melalui ketersediaan SDM Kesehatan	Tersedia Petugas Kesehatan Kontrak	Terbayarnya Honor Petugas Kontrak Kesehatan setiap bulan	orang	135	135	135	135	135
			Terlaksana pelaporan rutin online SDM Kesehatan	bulan	12	3	3	3	3
2	Meningkatnya Kapasitas SDM Kesehatan	Tersedia Petugas Kesehatan yang memiliki kapasitas	Terlaksananya peningkatan kapasitas Aparatur	orang	38	0	0	38	0
3	Tersedia Petugas Kesehatan terakreditasi	Tersedia petugas Kesehatan yang teregistrasi	Prosentase petugas kesehatan yang teregistrasi	%	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya ketersediaan obat dan BHP dan Alat Kesehatan	Terdistribusi Alat Kesehatan di Puskesmas	terdistribusi Alat Kesehatan untuk 7 puskesmas	lokasi	7	0	0	7	0

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA
KESEHATAN

dr. FARID YUSUF, MPH

SENTANI, 14 Februari 2020
PIHAK PERTAMA,
KASIE ALKES DAN SDM
KESEHATAN

ANNA RATIH AYU, SKM

INDIKATOR KINERJA 2020

NO	SASARAN STRATEGIS ESELON III	SASARAN KEGIATAN ESELON IV (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
					2020	RENCANA AKSI TARGET PER TW			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Meningkatnya Upaya Jaminan Kesehatan daerah	Meningkatnya layanan kesehatan dasar, rujukan dan rawat inap melalui Jaminan Kesehatan daerah	Jumlah Klaim Rujukan	klaim	362	50	100	100	112
	Meningkatnya Ketersediaan Puskesmas yang terakreditasi	Terlaksana Proses Akreditasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas didampingi dan terakreditasi	Puskesmas	3	0	0	0	3

PIHAK KEDUA,

Plt. KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

MARIA GRIAPON, SKM.,M.KES

SENTANI, 14 Februari 2020

PIHAK PERTAMA,
KASIE PELAYANAN KESEHATAN
RUJUKAN FASYANKES DAN
PENINGKATAN MUTU

MARIA GRIAPON, SKM.,M.KES

INDIKATOR KINERJA 2020

NO	SASARAN STRATEGIS ESELON III	SASARAN KEGIATAN ESELON IV (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
					2020	RENCANA AKSI TARGET PER TW			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Meningkatnya Upaya Jaminan Kesehatan daerah	Meningkatnya layanan kesehatan dasar, rujukan dan rawat inap melalui Jaminan Kesehatan daerah	Jumlah Klaim Rawat Inap	klaim	600	100	200	200	100
	Meningkatnya Upaya Kesehatan Dasar	Meningkatnya layanan kesehatan bagi kampung yang sangat sulit dijangkasu	Jumlah kegiatan mobile klinik di 2 kampung	kali	3	1	1	1	0
		Meningkatnya Layanan kesehatan Kuratif di Puskesmas	Puskesmas melaksanakan layanan Kuratif melalui dana JKN	bulan	12	3	3	3	3
			Jumlah pendampingan layanan spesialisik di puskesmas	puskesmas	3	0	1	2	0
		Meningkatnya Layanan kesehatan Promotif dan Preventif di Puskesmas	Puskesmas melaksanakan layanan Promotif dan preventif melalui Dana BOK	bulan	12	3	3	3	3
		Meningkatnya pelayanan kesehatan obat tradisional	Jumlah Puskesmas mendapatkan pelatihan tanaman Obat Keluarga	puskesmas	13	10	3	0	0
	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya	Terlaksana peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	Jumlah Puskesmas baru dibangun	unit	1	0	0	0	1
			Jumlah Puskesmas Pembantu	unit	4	0	0	0	4
			Jumlah Puskesmas mendapat alat kesehatan	Puskesmas	7	0	7	0	0
			Jumlah Puskesmas ditingkatkan sarananya (bangunan)	Puskesmas	3	0	0	2	1
			Jumlah Distrik di evaluasi pelaksanaan peningkatan sarpras	distrik	10	1	2	3	4

SENTANI, 14 Februari 2020

PIHAK KEDUA,
Pit. KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

PIHAK PERTAMA,
KASIE PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN TRADISIONAL

MARIA GRIAPON, SKM.,M.KES

YAKOBA BAGRE, SE

INDIKATOR KINERJA 2020

NO	SASARAN STRATEGIS ESELON III	SASARAN KEGIATAN ESELON IV (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
					2020	RENCANA AKSI TARGET PER TW			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	terlaksana pelayanan aparatur dan administrasi perkantoran dengan baik	Terlaksana pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian PNS	puskesmas	12	4	4	4	0
			Terlaksana Pengurusan kenaikan pangkat pegawai dan KGB dari target ditetapkan	%	100	0	50	0	100
			Terlaksana sosialisasi produk hukum	kali	1	0	1	0	0

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA,

SENTANI, 14 Februari 2020
PIHAK PERTAMA,
KASUBAG HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN

dr. YOHANA KAUT, M.KES

ISAK OFIDE, S.IP

INDIKATOR KINERJA 2020

NO	SASARAN STRATEGIS ESELON III	SASARAN KEGIATAN ESELON IV (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
					2020	RENCANA AKSI TARGET PER TW			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	terlaksana pelayanan aparatur dan administrasi perkantoran dengan baik	Terlaksana pelayanan administrasi perkantoran	Terbayarnya kewajiban 2 layanan internet dan RRI	bulan	12	3	3	3	3
			Tersedianya pemeliharaan alat kantor	unit	11		5	5	1
			Terbayarnya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	unit	32	5	13	10	4
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	bulan	12	3	3	3	3
			Terbayarnya paket Alat Tulis kantor	jenis	47	47	-	-	-
			Terbayarnya Penggandaan dokumen administrasi sekretariat	lembar	67,250	10,000	20,000	20,000	7,250
			Tersedianya operasional kendaraan operasional	liter	16,910	3,910	5,000	5,000	3,000
			terbayarnya Biaya Perjalanan dinas aparatur	kali	8	1	3	2	2
			terlaksana kunjungan dalam daerah	hari	150	20	50	50	30
			terlaksana penyelenggaraan hari besar dan agenda penting daerah	kali	2	-		1	1
			terpeliharanya kendaraan operasional dinas kesehatan dan puskesmas	bulan	12	3	3	3	3

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA,

SENTANI, 14 Februari 2020
PIHAK PERTAMA,
KASUBAG KEUANGAN DAN BMN

dr. YOHANA KAUT,M.KES

MARIA AMAN

INDIKATOR KINERJA 2020

NO	SASARAN STRATEGIS ESELON III	SASARAN KEGIATAN ESELON IV (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
					2020	RENCANA AKSI TARGET PER TW			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	terlaksana pelayanan aparatur dan administrasi perkantoran dengan baik	Terlaksana pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah dokumen surat dikirim	paket surat	10	2	2	2	4
			Terbayarnya paket kebersihan kantor (honor+bhn habis pakai)	bulan	12	3	6	9	12
			Terbayarnya paket perlengkapan kantor aparatur						
			tersedia perlengkapan kantor	unit	7	7	0	0	0
			Tersedianya paket peralatan kebersihan kantor	jenis	13	5	5	3	0
			tersedia dua bahan bacaan informasi	bulan	12	3	6	9	12
			Tersedianya paket bahan makanan dan minuman	jenis	6	6	0	0	0
			Terlaksana pemeliharaan peralatan gedung kantor	unit	26	6	10	10	0
	terlaksana penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Kinerja pemerintah	Terlaksananya pelaporan kinerja kesehatan baik offline dan Online	Terlaksana Pelaporan Perencanaan melalui Aplikasi Online (SIPP, Papua Pu Rencana, E-Renggar, KRISNA)	%	0	100	0	0	0
			Terlaksana Pelaporan Evaluasi Online(SICKAT, E-Monev, KOMDAT, ESR)	%	100	25	50	75	100
			Terlaksana penyusunan dokumen Pelaporan Kinerja (Profil, LAKIP, LPPD)	Dokumen	3	3	0	0	0
	terlaksana pelayanan kesehatan yang terstandarisasi	Terlaksana Penyusunan dokumen standard pelayanan kesehatan	tersusunnya dokumen Renstra Perangkat daerah dan Puskesmas	dokumen	0	0	0	0	0
			tersusunnya dokumen RAD	dokumen	0	0	0	0	0

NO	SASARAN STRATEGIS ESELON III	SASARAN KEGIATAN ESELON IV (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
					2020	RENCANA AKSI TARGET PER TW			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Meningkatnya pelayanan manajemen kesehatan yang baik	terlaksana layanan SIKDA daerah	terlaksana rapat kerja kesehatan	kali	1	1	0	0	0
			terlaksana pertemuan SIKDA Puskesmas	kali	4	1	1	1	1

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA,

SENTANI, 14 Februari 2020
PIHAK PERTAMA,
KASUBAG UMUM, PROGRAM DAN
INFORMASI

dr. YOHANA KAUT,M.KES

EDWARD SIHOTANG, S.SI APT

INDIKATOR KINERJA 2020

NO	SASARAN STRATEGIS ESELON II	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
				2020	RENCANA AKSI TARGET PER TW						
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan	Prosentase ketersediaan obat	%	>90	20	30	30	10	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	-
										Pemerataan Obat dan Perbekkes	-
	Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar sampai ke daerah terpencil dan daerah sulit	Prosentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	470,815,650
	Tersedianya Fasilitas Layanan Kesehatan yang memadai dan merata	Prosentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	1,327,000,000
										Penyediaan Kapitasi JKN bagi FKTP	8,152,860,500
	Terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat.	Prosentase pelayanan rujukan bagi masyarakat miskin	%	100	20	20	30	30		Integrasi Penyediaan Kapitasi JKN bagi FKTP	
		Prosentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100		Integrasi Penyediaan Kapitasi JKN bagi FKTP	
	Terlaksananya upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Prevalensi HIV	%	<2.3	<1	<1	<2	<2.3		Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit menular dan wabah (HIV/AIDS dan IMS)	275,000,000
	Terlaksananya Layanan Kesehatan Kerja bagi Sarana Swasta									Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	290,000,000
	Terlaksananya Pengembangan Obat Asli Kab. Jayapura	Jumlah Puskesmas mengembangkan Tanaman Obat Keluarga	puskesmas	15	10	0	5	0	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Pengembangan dan Penerapan SP3T	22,800,000
	terselenggaranya STBM di kampung	Prosentase Kampung SBS/ODF	%	57	20	0	0	37		Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	430,000,000
	Terlaksananya Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi	Prosentase Pertolongan Persalinan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	%	93	25	25	30	13		Penyediaan Bantuan Operasional KB	1,731,035,000
	Terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat.	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	67.7	66.9	66.9	66.9	67.3		Penyediaan Dana BOK Puskesmas	18,029,581,000

NO	SASARAN STRATEGIS ESELON II	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
				2020	RENCANA AKSI TARGET PER TW						
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
		Prosentase Usia Lansia mendapat screening kesehatan	%	40	10	10	20	0	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	150,000,000
	Terlaksananya Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi	Prosentase Komplikasi kebidanan yang ditangani	%	<23	5	5	10	5			
		Prosentase pelayanan nifas	%	75	20	20	20	15			
		Prosentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (Prosentase Kunjungan Neonatus Lengkap)	%	85	25	25	25	10			
		Prosentase Kunjungan Bayi	&	92	25	25	30	12			
		Prosentase pelayanan anak balita	%	92	25	25	30	12			
		Prosentase Anak usia 1 tahun yang dimunisasi Campak	%	96.5	25	25	30	16.5			
		Rasio Posyandu per satuan Balita	/balita	<20	<20	<20	<20	<20			
	Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan	0	18	18	0	0	0		Rekrutmen Tenaga pelayanan Kesehatan	-
										Penyediaan Insentif Dokter dan paramedis	-
	Terlaksananya Layanan Kesehatan Lansia, Remaja, dan penyakit tidak menular	Prosentase Kampung yang melaksanakan Posbindu	%	40	10	10	20	0		Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit tidak menular	307,000,000
		Prosentase Penemuan Kasus Tekanan Darah Tinggi/Hipertensi	%	<16.8	<16.8	<16.8	<16.8	<16.8			
		Prosentase Penemuan dan penanganan Kasus Orang dengan Gangguan Kejiwaan	%	20	0	10	10	0			
		Prosentase penemuan kasus DM	%	15	0	5	10	0			
		Prosentase Usia 15-59 tahun mendapat screening kesehatan	%	40	10	10	20	0			

NO	SASARAN STRATEGIS ESELON II	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
				2020	RENCANA AKSI TARGET PER TW						
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
	Terlaksananya promosi kesehatan sampai ke tingkat Kampung.	Prosentase sarana air bersih yang memenuhi syarat	%	85	20	30	20	15	#REF!	Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat	50,000,000
		Prosentase Kampung SBS/ODF	%	57	37	0	0	20		Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	110,795,000
	Terwujudnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Jumlah Badan Peduli Kesehatan yang dibentuk	distrik	10	8	0	0	2		Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan	221,398,000
	Terwujudnya perbaikan gizi masyarakat	Prosentase Balita KURANG Gizi	%	<10	<10	<10	<10	<10	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Peningkatan Gizi Masyarakat	192,000,000
		Prosentase balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100		#REF!	750,000,000
	Terlaksananya pengembangan upaya kesehatan lingkungan	Prosentase sarana air bersih yang memenuhi syarat	%	100	83	83	83	83	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	603,000,000
		Prosentase Rumah Tinggal bersanitasi	%	56	10	20	26	0			
	Terlaksananya upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Prosentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	Program Pencegahan dan Penanggulangan Peny Menular	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	250,000,000
										Pengadaan Alat Fogging dan bahan Fogging	105,000,000
		Prosentase penjarangan kesehatan siswa Pendidikan Dasar dan setingkat	%	100	100	100	100	100		Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	114,000,000
		#REF!	orang	50	5	15	20	10		Pelayanan pencegahan dan Penanggulangan Peny. Menular	60,000,000
		Angka Parasit Insidens Kab Jayapura/1000 pddk	/1000 pddk	90	90	90	90	90		Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik (Pengendalian)	600,000,000
		Persentase Kampung UCI	%	85	85	85	85	85		Peningkatan Imunisasi	250,000,000
		Prosentase kampung/kel mengalami KLB dan bencana yang dilakukan penyelidikan epidemiolog dan penanganani <24 jam	%	100	100	100	100	100		Peningkatan Surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah	54,000,000

NO	SASARAN STRATEGIS ESELON II	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
				2020	RENCANA AKSI TARGET PER TW						
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
		Prosentase Orang TB mendapatkan Layanan Pelayanan TB Sesuai Standard (Prosentase Penemuan dan penanganan penderita TBC)	/100.000 pddk	100	100	100	100	100		#REF!	297,430,150
	tersedia dokumen standard pelayanan kesehatan	Dokumen Standard Pelayanan Kesehatan	dokumen	21	21	0	0	0	Program Stadarisasi Pelayanan Kesehatan	Penyusunan Standard Pelayanan Kesehatan	35,809,500
		Jumlah Dokumen Data Dasar Kesehatan yang tersedia dalam menunjang Pencapaian standard	dokumen	1	0	0	0	1		Pembangunan dan Pemuthairan data dasar SPK	65,515,000
	Terlaksananya upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Prosentase Balita pneumonia yang ditangani	%	70	10	20	20	0	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Penanggulangan ISPA	49,000,000
		Non Polio AFP rate per 100.000 pddk<15 tahun	/100.000	<1	<1	<1	<1	<1		Penanggulangan Penyakit Cacingan	100,000,000
	Tersedianya Fasilitas Layanan Kesehatan yang memadai dan merata	Rasio sarana kesehatan per 1000 pddk	/1000 pddk	0.87	0.82	0.82	0.82	0.87	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu/dan Jaringan	Pembangunan Puskesmas	7,965,514,000
		cakupan pelayanan rujukan bagi masyarakat miskin								Pengadaan Ambulance	2,500,000,000
		Rasio sarana kesehatan per 1000 pddk	puskesmas	0.87	0.82	0.82	0.82	0.87		Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	6,706,984,000
		Rasio sarana kesehatan per 1000 pddk	puskesmas	0.87	0.82	0.82	0.82	0.87		#REF!	98,420,000
	Terlaksananya Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dan balita	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	<23	<23	<23	<23	<23	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kemitraan Peningkatan Kualitas dokter dan paramedis	220,000,000
		Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup	/1000 pddk	<23	<23	<23	<23	<23			
		Angka Kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	/ 100.000 KH	<235	<235	<235	<235	<235			
		Angka Kematian Balita per 1000 Balita	/1000 KH	<30	<30	<30	<30	<30			
		Prosentase Kunjungan Balita yang mendapatkan layanan kesehatan balita sesuai standard (Prosentase pelayanan balita)	%	92	25	25	30	12	#REF!	#REF!	290,000,000

NO	SASARAN STRATEGIS ESELON II	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
				2020	RENCANA AKSI TARGET PER TW						
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
	Terlaksananya Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi	Prosentase Kunjungan K4	%	63	10	20	20	13	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	#REF!	380,000,000
		Prosentase Pertolongan Persalinan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	%	93	25	25	30	13		#REF!	96,000,000
	Terakreditasinya sarana pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta.	Prosentase Puskesmas Terakreditasi	%	80	75	0	0	5	Program registrasi dan Akreditasi Bidang Kesehatan	Registrasi dan Akreditasi Kesehatan	2,087,800,000
	Tercapainya standar pembiayaan kesehatan sesuai ketentuan undang-undang.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang dihasilkan untuk mendukung kebijakan pembiayaan pembangunan kesehatan	dokumen	1	1	0	0	0	Program Peningkatan Manajemen Kesehatan	Rapat Kerja Kesehatan	88,131,250
		Jumlah Dokumen SIKDA yang dihasilkan untuk mendukung kebijakan pembiayaan pembangunan kesehatan	dokumen	3	1	0	1	1		Pengembangan SIKDA Kab. Jayapura	167,262,500

PIHAK KEDUA,
BUPATI JAYAPURA

SENTANI, 14 Februari 2020
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA,

MATHIUS, AWOITAUW, SE.,M.SI

KHAIRUL LIE, SKM.M.KES

INDIKATOR KINERJA 2020

NO	SASARAN STRATEGIS ESELON III	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
					2020	RENCANA AKSI TARGET PER TW			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Meningkatnya Upaya Jaminan Kesehatan daerah	Meningkatnya layanan kesehatan dasar, rujukan dan rawat inap melalui Jaminan Kesehatan daerah	Jumlah Klaim Rujukan PRE-Hospital	klaim	200	30	30	30	30
			Prosentase Kendaraan beroperasi dengan baik	%	100	100	100	100	100

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA

SENTANI, 14 Februari 2020
PIHAK PERTAMA,
Kepala UPTD PSC 119

KHAIRUL LIE, SKM.MKES

YOSAFAT SATO, SKM

Jenis Layanan Dasar	Indikator	TARGET				
		2018	2019	2020	2021	2021
1 Pelayanan kesehatan ibu hamil	Prosentase K4	100	100	100	100	100
2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Prosentase Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan	100	100	100	100	100
3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Prosentase Kunjungan Bayi 4 kali	100	100	100	100	100
4 Pelayanan kesehatan balita	Prosentase Pelayanan balita 8 kali	100	100	100	100	100
5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Prosentase Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar Kelas 1 dan Kelas 7	100	100	100	100	100
6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Prosentase Pelayanan Kesehatan pada Usia 15-59 tahun	100	100	100	100	100
7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Prosentase Pelayanan Kesehatan pada Usia diatas 60 Tahun (Lanjut Usia)	100	100	100	100	100
8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Prosentase penemuan dan penanganan hipertensi	100	100	100	100	100
9 Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Prosentase penemuan dan penanganan DM	100	100	100	100	100
10 Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Prosentase penemuan dan penanganan OGJ berat	100	100	100	100	100
11 Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Prosentase Penemuan dan Penanganan orang dengan TB	100	100	100	100	100
12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Prosentase Penemuan dan Penanganan Obat Orang terinfeksi HIV	100	100	100	100	100



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **KHAIRUL LIE, SKM, M.Kes**
Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
JAYAPURA**

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

N a m a : **MATHIUS AWOITAUW,SE,M.Si**
Jabatan : **BUPATI JAYAPURA**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Januari 2021

PIHAK KEDUA
BUPATI JAYAPURA



MATHIUS AWOITAUW,SE,M.Si

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA



KHAIRUL LIE, SKM, M.Kes

PERJANJIAN KINERJA (PK)

Nama SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran Program dan Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Tahun		Disusun berdasarkan DPA TA 2021 (sebelum Perubahan)	Disusun berdasarkan DPA TA 2021 (sebelum Perubahan)		
		Angka usia harapan hidup	Tahun	67,9				
		Persentase stunting	Persen	20				
		Prevalensi balita gizi kurang	Persen	<10				
				LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR				
				Persentase balita gizi buruk	Persen	<3,68		
				Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100		
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran hidup	<23		
				Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran hidup	<30		
				Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran hidup	<23		
				Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	/100.000 Kelahiran hidup	<230		
				Persentase Distrik memiliki satu Puskesmas	Persen	100		
				Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	90		
		Angka kejadian Malaria (APD)	/ 1000 Penduduk	70				
		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100				
		Rata-rata Capaian SPM Kesehatan	Persen	100				
Total Anggaran Indikator Sasaran Strategis						Rp.72.232.060.471		

Jumlah anggaran untuk keseluruhan program baik program Utama dan program Pendukung (rutin) adalah :

Program	Anggaran	Sumber Dana (APBD, APBN)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.883.002.228	APBD
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	63.888.126.551	APBD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.575.741.805	APBD
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	390.572.000	APBD
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	328.982.500	APBD

Jumlah anggaran keseluruhan program (Utama&Rutin) Rp. 119.006.425.084,-

Sentani, Februari 2021

PIHAK PERTAMA,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Jayapura


KHAIRUL LIE, SKM, M.KES

PIHAK KEDUA,
BUPATI JAYAPURA


MATHIUS AWOITAUW, SE, M.SI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : EDWARD MANIK SIHOTANG, S.SI, APT
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN
JAYAPURA

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

N a m a : KHAIRUL LIE, SKM, M.Kes
Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
JAYAPURA

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Februari 2021

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN



KHAIRUL LIE, SKM, M.Kes

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA



APT. EDWARD M SIHOTANG, S.SI

PERJANJIAN KINERJA (PK)

NAMA PROGRAM (Eselon III) : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Sasaran Strategis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome)	Satuan Indikator	Target	
					2021	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah	Dokumen Sistem Kesehatan Daerah yang tersusun	Dokumen	1	TW 1 = 0 TW 2 = 0 TW 3 = 0 TW 4 = 1

NAMA PROGRAM (Eselon III) : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sasaran Strategis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome)	Satuan Indikator	Target	
					2021	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah	% Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	Persen	100	TW 1 = 100 TW 2 = 100 TW 3 = 100 TW 4 = 100
			% Pelayanan Jasa Keuangan dan laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	Persen	100	TW 1 = 100 TW 2 = 100 TW 3 = 100 TW 4 = 100
			% administrasi dan sarana prasarana perkantoran yang terpenuhi	Persen	100	TW 1 = 100 TW 2 = 100 TW 3 = 100 TW 4 = 100

Sentani, februari 2021

**PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Kesehatan**



KHAIRUL LIE, SKM, M.KES

**PIHAK PERTAMA,
Sekretaris Dinas**



EDWARD SIHOTANG, S.SI, APT, M.KES



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **DEMETRIUS KAITU, SKM**
Jabatan : **KEPALA SUBAG UMUM PROGRAM DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

N a m a : **EDWARD MANIK SIHOTANG, S.SI, APT**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Februari 2021

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA



APT. EDWARD M SIHOTANG, S.SI

PIHAK PERTAMA
KASUBAG UMUM PROGRAM
DAN INFORMASI



DEMETRIUS KAITU, SKM

PERJANJIAN KINERJA (PK)

NAMA KEGIATAN (Eselon IV) : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2021	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah	Tersedia dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Terlaksana Sub kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	sub kegiatan	3	TW 1 = 50 TW 2 = 60 TW 3 = 80 TW 4 = 100

NAMA KEGIATAN (Eselon IV) : Administrasi Umum Perangkat Daerah

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2021	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah	Terlaksana Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksana Sub Kegiatan Administrasi Umum	Sub Kegiatan	7	TW 1 = 30 TW 2 = 60 TW 3 = 90 TW 4 = 100

NAMA KEGIATAN (Eselon IV) : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2021	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah	Terlaksana Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Sub Kegiatan	1	TW 1 = 30 TW 2 = 60 TW 3 = 90 TW 4 = 100

**NAMA KEGIATAN (Eselon IV) : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah**

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2021	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Terlaksana Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedia Layanan Pemeliharaan BMD	Sub Kegiatan	1	TW 1 =70 TW 2 = 75 TW 3 = 90 TW 4 = 100

NAMA KEGIATAN (Eselon IV) : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Integrasi

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2021	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Terlaksana Layanan Kesehatan UKM dan UKP Sesuai Standard	Terlaksana Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	Sub Kegiatan	2	TW 1 =0 TW 2 = 30 TW 3 = 90 TW 4 = 100

Sentani, Februari 2021

PIHAK KEDUA,


EDWARD SIHOTANG, S.SI, APT, M.KES

PIHAK PERTAMA,
**Kepala Sub Bagian Umum,
 Program dan Informasi**

DEMENTRIUS KAITU, SKM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **FERONIKA GENOHONG**
Jabatan : **KEPALA SUBAG KEUANGAN DAN BMN**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **EDWARD MANIK S, S.SI, APT**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN
JAYAPURA**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Februari 2021

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA



EDWARD MANIK S, S.SI, APT

PIHAK PERTAMA
KASUBAG KEUANGAN
DAN BMN



FERONIKA GENOHONG

PERJANJIAN KINERJA (PK)

NAMA KEGIATAN (Eselon IV) : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2021	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Terlaksana Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksana Sub kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	sub kegiatan	2	TW 1 = 30 TW 2 = 60 TW 3 = 90 TW 4 = 100

NAMA KEGIATAN (Eselon IV) : Administrasi Umum Perangkat Daerah

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2021	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Terlaksana Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksana Sub Kegiatan Administrasi Umum	Sub Kegiatan	3	TW 1 =30 TW 2 = 60 TW 3 = 90 TW 4 = 100

NAMA KEGIATAN (Eselon IV) : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2022	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Terlaksana Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Sub Kegiatan	2	TW 1 =30 TW 2 = 60 TW 3 = 90 TW 4 = 100

**NAMA KEGIATAN (Eselon IV) : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah**

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2021	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah	Terlaksana Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedia Layanan Pemeliharaan BMD	Sub Kegiatan	1	TW 1 = 30 TW 2 = 60 TW 3 = 90 TW 4 = 100

Sentani, Februari 2021

PIHAK KEDUA, &



EDWARD SIHOTANG, S.SI, APT, M.KES

PIHAK PERTAMA,
**Kepala Sub Bagian Keuangan
Dan Aset**

FERONIKA GENOHONG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **JENI PAKODONG, SKM**

Jabatan : **PLT. KEPALA SUBAG HUKUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

N a m a : **EDWARD MANIK SIHOTANG, S,SI, Apt**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Februari 2021

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA *


EDWARD MANIK SIHOTANG, S.SI, APT

PIHAK PERTAMA
PLT.KASUBAG HUKUM DAN



JENI PAKODONG, SKM

PERJANJIAN KINERJA (PK)

NAMA KEGIATAN (Eselon IV) : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2021	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Terlaksana Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksana Sub kegiatan Administrasi kepegawaian	sub kegiatan	2	TW 1 = 30 TW 2 = 60 TW 3 = 100 TW 4 = 0

Sentani, Februari 2021

PIHAK KEDUA, *



EDWARD SIHOTANG, S.SI, APT, M.KES

PIHAK PERTAMA,
Plt. Kepala Sub Bagian Kepegawaian
Dan Hukum



JENI PAKODONG, SKM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : dr. YOHANA KAUT., M.KES
Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

N a m a : KHAIRUL LIE, SKM, M.Kes
Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
JAYAPURA

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Februari 2021

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN



KHAIRUL LIE, SKM, M.Kes

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PELAYANAN
KESEHATAN



dr. YOHANA KAUT., M.Kes

PERJANJIAN KINERJA (PK)

NAMA PROGRAM (Eselon III) : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Sasaran Strategis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome)	Satuan Indikator	Target	
					2021	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah	Dokumen Sistem Kesehatan Daerah yang tersusun	Dokumen	1	TW 1 = 0 TW 2 = 0 TW 3 = 0 TW 4 = 1

NAMA PROGRAM (Eselon III) : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sasaran Strategis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome)	Satuan Indikator	Target	
					2021	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah	x Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia x Pelayanan Jasa Keuangan dan laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu x administrasi dan sarana prasarana perkantoran yang terpenuhi	Persen	100	TW 1 = 100 TW 2 = 100 TW 3 = 100 TW 4 = 100 TW 1 = 100 TW 2 = 100 TW 3 = 100 TW 4 = 100 TW 1 = 100 TW 2 = 100 TW 3 = 100 TW 4 = 100

Sentani, februari 2021

PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Kesehatan



KHAIRUL LIE, SKM.,M.KES

PIHAK PERTAMA,
Sekretaris Dinas

dr. YOHANA KAUT, M.KES



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : MARIA C.GRIAPON, SKM, M.Kes
Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN
RUJUKAN, FASYANKES DAN PENINGKATAN MUTU

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

N a m a : dr. YOHANA KAUT, M.KES
Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Februari 2021

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG
PELAYANAN KESEHATAN

dr. YOHANA KAUT, M.KES

PIHAK PERTAMA
KASIE PEL.KESEHATAN RUJUKAN
PELAYANAN KESEHATAN DAN PENINGKATAN MUTU

MARIA C.GRIAPON, SKM, M.Kes

PERJANJIAN KINERJA (PK)

NAMA KEGIATAN (Eselon IV) : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2021	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar sampai ke daerah terpencil dan masyarakat terasing.	Terlaksana Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	Tersedia Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP dengan Telemedicine	sub kegiatan	1	TW 1 = 0 TW 2 = 100 TW 3 = 0 TW 4 = 0
	Tersedianya Fasilitas Layanan Kesehatan yang memadai merata dan terakreditasi	Terlaksana Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	Terlaksana Akreditasi Puskesmas	sub kegiatan	1	TW 1 = 0 TW 2 = 30 TW 3 = 90 TW 4 = 100

Sentani, Februari 2021

PIHAK KEDUA,



DR. YOHANA KAUT, M.KES

PIHAK PERTAMA,

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Fasyankes Dan Peningkatan Mutu



MARIA GRIAPON, SKM.,M.KES



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **YOKOBA A BAGRE, SE**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN
PRIMER DAN TRADISIONAL**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **dr. YOHANA KAUT.,M.KES**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Februari 2021

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG
PELAYANAN KESEHATAN


dr. YOHANA KAUT, M.Kes

PIHAK PERTAMA
KASIE PELAYANAN KESEHATAN
PRIMER DAN RUJUKAN


YAKOBA A BAGRE, SE

PERJANJIAN KINERJA (PK)

NAMA KEGIATAN (Eselon IV) : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2021	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar sampai ke daerah terpencil dan masyarakat terasing.	Terlaksana Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	Tersedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	sub kegiatan	7	TW 1 = 20 TW 2 = 70 TW 3 = 100 TW 4 = 0

NAMA KEGIATAN (Eselon IV) : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2021	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar sampai ke daerah terpencil dan masyarakat terasing.	Terlaksana Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	Tersedia Pelayanan PIS-PK	sub kegiatan	1	TW 1 = 0 TW 2 = 50 TW 3 = 100 TW 4 = 0
	Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar sampai ke daerah terpencil dan masyarakat terasing.	Terlaksana Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	Tersedia Operasional Puskesmas untuk Layanan UKM dan UKP	sub kegiatan	2	TW 1 = 30 TW 2 = 60 TW 3 = 90 TW 4 = 100
	Terwujudnya jaminan kesehatan bagi masyarakat	Terlaksana Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	Tersedia Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat	sub kegiatan	1	TW 1 = 30 TW 2 = 60 TW 3 = 90 TW 4 = 100

Sentani, Februari 2021

PIHAK KEDUA,



DR. YOHANA KAUT, M.KES

PIHAK PERTAMA,
**Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
Dan Kesehatan Tradisional**



YAKOBA BAGRE, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **DELILA MEHUE S.ST, M.KES**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT**

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

N a m a : **KHAIRUL LIE, SKM, M.Kes**
Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
JAYAPURA**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Februari 2021

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN



KHAIRUL LIE, SKM, M.Kes

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG KESEHATAN
MASYARAKAT



DELILA MEHUE, S.ST, M.KES

PERJANJIAN KINERJA (PK)

**NAMA PROGRAM (Eselon III) : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

No	Sasaran Strategis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome)	Satuan Indikator	Target	
					2021	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Terlaksana Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Bersalin	Prosentase Ibu Bersalin mendapat Pelayanan Sesuai Standard	Persen	100	TW 1 = 30 TW 2 = 70 TW 3 = 100 TW 4 = 100
		Terlaksana Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Bersalin	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	45	TW 1 = 0 TW 2 = 10 TW 3 = 30 TW 4 = 45
		Terlaksana Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Bersalin	Cakupan pelayanan nifas	Persen	100	TW 1 = 30 TW 2 = 50 TW 3 = 70 TW 4 = 100
		Terlaksananya Layanan Kesehatan Anak Sekolah dan Remaja	Prosentase Anak Usia Pendidikan Dasar mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard	Persen	100	TW 1 = 30 TW 2 = 70 TW 3 = 100 TW 4 = 100
		Terlaksananya Layanan Kesehatan bagi Lanjut usia	Prosentase Lanjut Usia mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard	Persen	100	TW 1 = 30 TW 2 = 70 TW 3 = 100 TW 4 = 100
		Terlaksana Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil	Prosentase Ibu Hamil mendapat Pelayanan Sesuai Standard	Persen	100	TW 1 = 30 TW 2 = 70 TW 3 = 100 TW 4 = 100
		Terlaksana Pelayanan Kesehatan bagi Bayi baru Lahir	Prosentase Bayi Baru Lahir mendapat Pelayanan Sesuai Standard	Persen	100	TW 1 = 30 TW 2 = 70 TW 3 = 100 TW 4 = 100
		Terlaksana Pelayanan Kesehatan bagi Bayi baru Lahir	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	50	TW 1 = 10 TW 2 = 30 TW 3 = 40 TW 4 = 50
		Terlaksana Pelayanan Kesehatan bagi Balita	Prosentase Balita mendapat Pelayanan Sesuai Standard	Persen	100	TW 1 = 30 TW 2 = 70 TW 3 = 100 TW 4 = 100
		Terwujudnya Lingkungan yang sehat di Masyarakat	Prosentase Kampung Stop Buang Air Besar Sembarangan	Persen	65	TW 1 = 45 TW 2 = 45 TW 3 = 50 TW 4 = 65

NAMA PROGRAM (Eselon III) : Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

No	Sasaran Strategis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome)	Satuan Indikator	Target	
					2022	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Terlaksananya promosi kesehatan sampai ke tingkat Kampung	Rasio Posyandu per 100 balita	/100 Balita	2,00	TW 1 = 1 TW 2 = 1 TW 3 = 1,75 TW 4 = 2,00
		Terwujudnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Prosentase Posyandu Aktif	100	100	TW 1 = 30 TW 2 = 70 TW 3 = 100 TW 4 = 100

Sentani, februari 2021

PIHAK KEDUA, 
Kepala Dinas Kesehatan


KHAIRUL LIE, SKM., M.KES

PIHAK PERTAMA,
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat


DELILA MEHUE, S.ST, M.KES



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **THOMAS MEBRI, SKM**
Jabatan : **KA. SEKSI PROMKES, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KESLING, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **DELILA MEHUE, S.ST, M.KES**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Februari 2021

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG
KESEHATAN MASYARAKAT

DELILA MEHUE, S.ST, M.KES

PIHAK PERTAMA
KASIE PROMKES, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KESLING, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA



THOMAS MEBRI, SKM

PERJANJIAN KINERJA (PK)

NAMA KEGIATAN (Eselon IV) : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2022	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Lingkungan yang sehat di Masyarakat	Terlaksana Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	Terlaksana Pelayanan Kesehatan Lingkungan Masyarakat	Sub Kegiatan	1	TW 1 = 30 TW 2 = 60 TW 3 = 90 TW 4 = 100
2	Terlaksananya promosi kesehatan sampai ke tingkat Kampung	Terlaksana Penyediaan Layanan Promosi Kesehatan	Terlaksana Pelayanan Promosi Kesehatan	Sub Kegiatan	1	TW 1 = 0 TW 2 = 50 TW 3 = 100 TW 4 = 0

NAMA KEGIATAN (Eselon IV) : Advokasi , Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2022	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Terlaksana Pemberdayaan dan Kemitraan Masyarakat dan Lintas Sektor	Terlaksana Pelayanan Kesehatan Lingkungan Masyarakat	Sub Kegiatan	1	TW 1 = 0 TW 2 = 50 TW 3 = 100 TW 4 = 00

Sentani, Februari 2021

PIHAK KEDUA,



DELILA MEHUE, S.ST, M.KES

PIHAK PERTAMA,
Kepala Seksi Promosi, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Olahraga

THOMAS MEBRI, SKM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : YANES OHEE, S.ST
Jabatan : KA. SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

N a m a : DELILA MEHUE, S.ST, M.KES
Jabatan : KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Februari 2021

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG
KESEHATAN MASYARAKAT

DELILA MEHUE, S.ST, M.KES

PIHAK PERTAMA
KASIE KESEHATAN KELUARGA
DAN GIZI

10000
SEPULUH RIBU RUPAH
TR. 20
METERAI
TEMPEL
5BA3X570721483
YANES OHEE, S.ST



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : PUNGUT SUNARTO, SKM
Jabatan : KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

N a m a : KHAIRUL LIE, SKM, M.Kes
Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
JAYAPURA

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Februari 2021

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN



KHAIRUL LIE, SKM, M.Kes

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT



PUNGUT SUNARTO, SKM

PERJANJIAN KINERJA (PK)

NAMA PROGRAM (Eselon III) : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Sasaran Strategis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome)	Satuan Indikator	Target	
					2021	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Terlaksananya upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Puskesmas melaksanakan layanan Pencegahan Penyakit Menular	Puskesmas	20	TW 1 = 20 TW 2 = 20 TW 3 = 20 TW 4 = 20
		Terlaksananya upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	80	TW 1 = 30 TW 2 = 50 TW 3 = 70 TW 4 = 80
		Terlaksananya upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	TW 1 = 30 TW 2 = 70 TW 3 = 100 TW 4 = 100
		Terlaksananya upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Penderita diare yang ditangani	Persen	100	TW 1 = 30 TW 2 = 70 TW 3 = 100 TW 4 = 100
		Terlaksananya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit Tidak menular	Puskesmas melaksanakan layanan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	Puskesmas	20	TW 1 = 20 TW 2 = 20 TW 3 = 20 TW 4 = 20
		Terlaksananya Upaya Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Kejiwaan	Prosentase Penemuan dan penanganan Orang dengan Gangguan Kejiwaan	Prosentase	100	TW 1 = 30 TW 2 = 70 TW 3 = 100 TW 4 = 100
		Terlaksananya Upaya Kesehatan bagi Usia Produktif	Prosentase usia Produktif mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard	Prosentase	100	TW 1 = 30 TW 2 = 70 TW 3 = 100 TW 4 = 100
		Terlaksananya Upaya Kesehatan bagi Penderita Hipertensi	Prosentase Penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard	Prosentase	100	TW 1 = 30 TW 2 = 70 TW 3 = 100 TW 4 = 100
		Terlaksananya Upaya Kesehatan bagi Penderita Diabetes Melitus	Prosentase Penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard	Prosentase	100	TW 1 = 30 TW 2 = 70 TW 3 = 100 TW 4 = 100
		Terwujudnya Deteksi Dini di semua masalah kesehatan dan tertanggulangnya KLB, wabah dan bencana	Cakupan kampung/kel mengalami KLB dan bencana yang dilakukan penyelidikan epidemiolog dan penanganan <24 jam	Prosentase	100	TW 1 = 100 TW 2 = 100 TW 3 = 100 TW 4 = 100

No	Sasaran Strategis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome)	Satuan Indikator	Target	
					2021	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Terlaksananya Upaya Kesehatan bagi Penderita TBC	Prosentase Penderita TBC mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard	Prosentase	100	TW 1 = 30 TW 2 = 70 TW 3 = 100 TW 4 = 100
		Terlaksananya Upaya Kesehatan bagi Penderita HIV/AIDS	Prosentase Penderita HIV/AIDS mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard	Prosentase	100	TW 1 = 30 TW 2 = 70 TW 3 = 100 TW 4 = 100
		Terlaksana Upaya Layanan Kesehatan Imunisasi	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persentase	97	TW 1 = 30 TW 2 = 50 TW 3 = 70 TW 4 = 97

Sentani, 18 Januari 2022

PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Kesehatan

KHAIRUL LIE, SKM, M.KES



PIHAK PERTAMA,
Kepala Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit

PUNGUT SUNARTO, SKM, MM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ROSSARIO AKIHARI, S.Kep.Ns
Jabatan : KEPALA SEKSI PENCEGAHAN, PENGENDALIAN
PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESWA

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

N a m a : PUNGUT SUNARTO, SKM
Jabatan : KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Februari 2021

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT

PUNGUT SUNARTO, SKM

PIHAK PERTAMA
KASIE PENCEGAHAN, PENGENDALIAN
PENY. TIDAK MENULAR DAN KESWA



ROSSARIO AKIHARI, S.Kep..Ns

PERJANJIAN KINERJA (PK)

NAMA KEGIATAN (Eselon IV) : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2021	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya Upaya Kesehatan bagi Usia Produktif	Terlaksana Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	Terlaksana Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat usia Produktif	sub kegiatan	1	TW 1 = 30 TW 2 = 60 TW 3 = 100 TW 4 = 0
2.	Terlaksananya Upaya Kesehatan bagi Penderita Hipertensi	Terlaksana Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	Terlaksana Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Hipertensi	sub kegiatan	1	TW 1 = 0 TW 2 = 50 TW 3 = 100 TW 4 = 0
3.	Terlaksananya Upaya Kesehatan bagi Penderita Diabetes Mellitus	Terlaksana Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	Terlaksana Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Diabetes Mellitus	sub kegiatan	1	TW 1 = 0 TW 2 = 100 TW 3 = 0 TW 4 = 0
4.	Terlaksananya Upaya Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Kejiwaan	Terlaksana Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	Terlaksana Pelayanan Kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Kejiwaan	sub kegiatan	1	TW 1 = 0 TW 2 = 0 TW 3 = 50 TW 4 = 100

Sentani, Februari 2021



PUNGUT SUNARTO, SKM, MM

PIHAK PERTAMA,
**Kepala Seksi Pencegahan Penyakit
Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa**

ROSARIO AKIHARY, S.KEP, NERS, M.KES



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **WA JUHRIA, SKM**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PENCEGAHAN, PENGENDALIAN
PENYAKIT MENULAR, SURVAELENS, IMUNISASI**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **PUNGUT SUNARTO, SKM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Februari 2021

PIHAK KEDUA
**KEPALA BIDANG PENCEGAHAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT**



PUNGUT SUNARTO, SKM

PIHAK PERTAMA
**KASIE PENCEGAHAN, PENGENDALIAN
PENY. MENULAR, SURVAELENS, IMUNISASI**



WA JUHRIA, SKM

PERJANJIAN KINERJA (PK)

NAMA KEGIATAN (Eselon IV) : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2021	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya Upaya Kesehatan bagi Penderita TBC	Terlaksana Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	Terlaksana Pelayanan Kesehatan bagi Penderita TBC	sub kegiatan	1	TW 1 = 30 TW 2 = 60 TW 3 = 100 TW 4 = 0
2.	Terlaksananya Upaya Kesehatan bagi Penderita HIV/AIDS	Terlaksana Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	Terlaksana Pelayanan Kesehatan bagi Penderita HIV/AIDS	sub kegiatan	1	TW 1 = 30 TW 2 = 60 TW 3 = 100 TW 4 = 0
3	Terlaksananya upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Terlaksana Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	Terlaksana Pelayanan Kesehatan Untuk Pencegahan dan Pemberantasan penyakit Menular	sub kegiatan	2	TW 1 = 30 TW 2 = 60 TW 3 = 90 TW 4 = 100
4	Terlaksana Upaya Layanan Kesehatan Imunisasi	Terlaksana Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	Terlaksana Pelayanan Kesehatan Imunisasi	sub kegiatan	1	TW 1 = 30 TW 2 = 60 TW 3 = 90 TW 4 = 100
5	Terwujudnya Deteksi Dini di semua masalah kesehatan dan tertanggulangnya a KLB, wabah dan bencana	Terlaksana Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	Terlaksana Penanggulangan KLB, Wabah dan Bencana	sub kegiatan	1	TW 1 = 30 TW 2 = 60 TW 3 = 90 TW 4 = 100

Sentani, Februari 2021

PIHAK KEDUA,



PUNGUT SUNARTO, SKM, MM

PIHAK PERTAMA,
**Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Menular,
Surveilans dan Imunisasi**

WA JUHRIA, SKM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : dr.FARID YUSUF, MPH
Jabatan : KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

N a m a : KHAIRUL LIE, SKM, M.Kes
Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
JAYAPURA

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Februari 2021

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN



KHAIRUL LIE, SKM, M.Kes

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA
KESEHATAN



dr. FARID YUSUF, MPH

PERJANJIAN KINERJA (PK)

NAMA PROGRAM (Eselon III) : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Sasaran Strategis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome)	Satuan Indikator	Target	
					2021	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan .	Ketersediaan Obat	Persen	>90	TW 1 = 40 TW 2 = 60 TW 3 = 90 TW 4 = >90

NAMA PROGRAM (Eselon III) : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

No	Sasaran Strategis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome)	Satuan Indikator	Target	
					2021	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tersertifikasi	Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan	Puskesmas	21	TW 1 = 21 TW 2 = 21 TW 3 = 21 TW 4 = 21
			Rasio dokter per 100.000 Penduduk	/ 100.000 Penduduk	20	TW 1 = 20 TW 2 = 20 TW 3 = 20 TW 4 = 20
			Rasio tenaga medis per satuan penduduk	/Satuan Penduduk	200	TW 1 = 200 TW 2 = 200 TW 3 = 200 TW 4 = 200

Sentani, Februari 2021

PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Kesehatan


KHAIRUL LIE, SKM.,M.KES

PIHAK PERTAMA,
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan


DR FARID YUSUF, MPH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ANA RATIH AYU, SKM
Jabatan : KEPALA SEKSI ALAT KESEHATAN DAN SDM
KESEHATAN

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

N a m a : dr. FARID YUSUF, MPH
Jabatan : KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Februari 2021

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG
SDM KESEHATAN



dr. FARID YUSUF, MPH

PIHAK PERTAMA
KASIE ALAT KESEHATAN
DAN SDM KESEHATAN



ANA RATIH AYU, SKM

PERJANJIAN KINERJA (PK)

NAMA KEGIATAN (Eselon IV) : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP

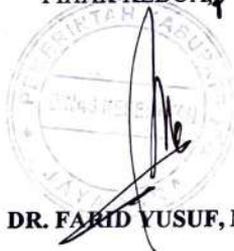
No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2021	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar sampai ke daerah terpencil dan masyarakat terasing.	Terlaksana Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	Tersedia jasa kalibrasi Peralatan Kesehatan yang sesuai standard	sub kegiatan	1	TW 1 = 30 TW 2 = 60 TW 3 = 90 TW 4 = 100

NAMA KEGIATAN (Eselon IV) : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2021	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tersertifikasi	Terlaksana Perencanaan dan Pemenuhan SDM Kesehatan Untuk UKP dan UKM	Tersedia SDM Kesehatan untuk Layanan UKP dan UKM	sub kegiatan	2	TW 1 = 30 TW 2 = 60 TW 3 = 90 TW 4 = 100

Sentani, Februari 2021

PIHAK KEDUA,



DR. FARID YUSUF, MPH

PIHAK PERTAMA,
Kepala Seksi Alat Kesehatan dan
SDM



ANA RATIH AYU, SKM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : MARTHA LM TAMBUNAN , S.Si,Apt
Jabatan : KEPALA SEKSI KEFARMASIAN

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

N a m a : dr. FARID YUSUF, MPH
Jabatan : KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sentani, Februari 2021

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG
SDMK KESEHATAN



dr. FARID YUSUF, MPH

PIHAK PERTAMA
KASIE KEFARMASIAN



MARTHA LM TAMBUNAN , S.Si,Apt

PERJANJIAN KINERJA (PK)

NAMA KEGIATAN (Eselon IV) : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2021	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar sampai ke daerah terpencil dan masyarakat terasing.	Terlaksana Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	Tersedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	sub kegiatan	2	TW 1 = 0 TW 2 = 70 TW 3 = 100 TW 4 = 0

Sentani, Februari 2021

PIHAK KEDUA,



DR. FARID YUSUF, MPH

PIHAK PERTAMA,
Kepala Seksi Kefarmasian



MARTHA TAMBUNAN, S.S.I, APT

MISI 1	Menghasilkan kualitas manusia	Tujuan 1	Membudayakan budaya kerja manusia	74,1
URAIAN 1	Menghasilkan kualitas yang memuaskan	Indikator utama	IPK	
SARAN 2	Menghasilkan tingkat kesehatan masyarakat	Sarana 2	Menghasilkan derajat kesehatan masyarakat	
		Indikator utama	Indeks Kesehatan	78,1

SARAN 2	Menghasilkan derajat kesehatan masyarakat			
Rencana RPJPD	Tujuan 1	Meningkatkan akseptabilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau		
	Indikator	Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar sampai ke tingkat desa		

Program	Pelayanan Kesehatan Dasar	Target	Tertarget
Kegiatan	Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat I dan UKP		
Sub Kegiatan	Pembangunan, Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Perawatan Fasilitas Kesehatan	1 Unit	1 Unit

MISI 5	Menghasilkan tingkat pemertanian yang baik	Tujuan 5	Menghasilkan kualitas per-nyayungan pemertanian	
URAIAN 5	Menghasilkan kualitas per-nyayungan pemertanian	Indikator utama	Indeks Reformasi Birokrasi	
SARAN 8	Menghasilkan akseptabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Sarana 8	Menghasilkan akseptabilitas penyelenggaraan pemerintahan	
		Indikator utama	Indeks Pengukuran Kinerja Daerah (IPKD) dan KIPD	
SARAN 10	Terselenggaranya standar minimal pelayanan dasar	Indikator utama	Indeks Kesehatan Masyarakat (IKM)	

SARAN 8	Menghasilkan akseptabilitas penyelenggaraan pemerintahan			
Rencana RPJPD	Tujuan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan		
	Indikator	Nilai SAKIP OPD		

Program	Program Pemertanian	Target	Tertarget
Kegiatan	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Akhungan	1 Akhungan

SARAN 10	Terselenggaranya standar minimal pelayanan dasar			
Rencana RPJPD	Tujuan	Meningkatkan kualitas pemertanian		
	Indikator	Indeks Kesehatan Masyarakat (IKM)		

SARAN 10	Terselenggaranya standar minimal pelayanan dasar			
Rencana RPJPD	Tujuan	Meningkatkan kualitas pemertanian		
	Indikator	Indeks Kesehatan Masyarakat (IKM)		

Program	Pelayanan Kesehatan Dasar	Target	Tertarget
Kegiatan	Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat I dan UKP		
Sub Kegiatan	Pembangunan, Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Perawatan Fasilitas Kesehatan	1 Unit	1 Unit

SARAN 10	Terselenggaranya standar minimal pelayanan dasar			
Rencana RPJPD	Tujuan	Meningkatkan kualitas pemertanian		
	Indikator	Indeks Kesehatan Masyarakat (IKM)		

SARAN 10	Terselenggaranya standar minimal pelayanan dasar			
Rencana RPJPD	Tujuan	Meningkatkan kualitas pemertanian		
	Indikator	Indeks Kesehatan Masyarakat (IKM)		

Program	Pelayanan Kesehatan Dasar	Target	Tertarget
Kegiatan	Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat I dan UKP		
Sub Kegiatan	Pembangunan, Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Perawatan Fasilitas Kesehatan	1 Unit	1 Unit

SARAN 10	Terselenggaranya standar minimal pelayanan dasar			
Rencana RPJPD	Tujuan	Meningkatkan kualitas pemertanian		
	Indikator	Indeks Kesehatan Masyarakat (IKM)		

SARAN 10	Terselenggaranya standar minimal pelayanan dasar			
Rencana RPJPD	Tujuan	Meningkatkan kualitas pemertanian		
	Indikator	Indeks Kesehatan Masyarakat (IKM)		

Program	Pelayanan Kesehatan Dasar	Target	Tertarget
Kegiatan	Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat I dan UKP		
Sub Kegiatan	Pembangunan, Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Perawatan Fasilitas Kesehatan	1 Unit	1 Unit